

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Melaksanakan Pungutan Bea Masuk Terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan**

(Studi Di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta).

Identitas Penulis

a. Nama : **Ganang Bhaskoro Yudhityawan**
b. NIM : **125010107111142**
Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**
Jangka Waktu penelitian : **7 Bulan**

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Tunggal Anshari SN., S.H., M.H.
 NIP.195905241986011001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
 NIP. 196008101986011002

Mengetahui,
 Ketua Bagian
 Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
 NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM MELAKSANAKAN PUNGUTAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

(Studi Di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jakarta).

Oleh :

Ganang Bhaskoro Yudhityawan

125010107111142

Skripsi ini Telah Disahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H.
NIP.195905241986011001

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Lutfi Effendi, S.H., MHum.
NIP. 196008101986011002

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T, Tuhan yang memiliki segalanya, Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah yang sangat terpercaya dan kepada para sahabat serta seluruh keluarganya

Ini adalah skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dalam Melaksanakan Pungutan Bea Masuk Terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta)”** yang disusun untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum, pada jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Di dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan tidak akan terselesaikan dengan mudah tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Puji Syukur Kepada Allah SWT yang selalu memberikan ide-ide dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Slamet Wahyudhi dan Ibu Soelistyawati yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama.

5. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pendamping dan ketua bagian hukum administrasi negara fakultas hukum universitas brawijaya.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staff kayawan dilingkungan fakultas hukum universitas brawijaya.
7. Semua Pegawai di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai, terimakasih atas waktu dan tempatnya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah memberikan kelembutan dan menambah kebaikan kepada semua orang yang berusaha membantu penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membaca dan mempelajarinya.

Hanyak kepada Allah SWT tempat memohon dan ampunan dan pertolongan-Nya demi kelembutan hamba-Nya dan akhir dari doa, *Alhamdulillahirabbil'alamin.*

Malang, 19 Desember 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
Ringkasan.....	xiii
<i>Summary</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum.....	15
B. Kajian Umum Tentang Kepabeanan.....	25
C. Kajian Umum Tentang Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	27
D. Ekspor.....	34
E. Kajian Umum Tentang Direktorat Jendral Bea dan Cukai	35
F. Jenis Pelanggaran Di Bidang Kepabeanan.....	36
G. Sanksi Administratif.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	43

C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis Dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Populasi dan Sampel	46
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai	48
1. Sejarah Bea dan Cukai.....	48
2. Visi, Misi, Strategi dan Fungsi Utama Bea dan Cukai	50
3. Kedudukan, Tugas, Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	53
4. Struktur Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai ..	55
5. Total Jumlah Transaksi/Kegiatan Impor TPT di Indonesia.....	56
B. Tahapan Penelitian Untuk Penentuan Nilai Pabean	59
1. Penerapan <i>Self Assesment System</i>	59
2. Database Nilai Pabean	63
3. Uji Kewajaran.....	65
4. Informasi Nilai Pabean dan Deklarasi Nilai Pabean	67
5. Konsultasi	68
6. Penetapan Nilai Pabean	70
7. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).....	71
C. Ketentuan Penetapan Nilai Pabean.....	80
1. Metode I : Nilai Transaksi	80
1.1 Definisi.....	80
1.2 Barang Impor Yang Bersangkutan.....	81
1.3 Penjualan.....	81
1.4 Pedoman Dalam Menentukan Suatu Barang Merupakan Hasil Penjualan/Bukan.....	84
1.5 Dijual Untuk Diekspor ke Negara Pengimpor	84
1.6 Harga Yang Sebenarnya Di Bayar	85

1.7 Diskon	94
1.8 Biaya Yang Harus Ditambahkan Pada Harga Yang Sebenarnya Atau Seharusnya Dibayar	96
1.9 Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk Didasarkan Atas Harga Penyerahan CIF	115
1.10 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Agar Nilai Transaksi Dapat Diterima dan Ditetapkan Sebagai Nilai Pabean	117
1.11 Tata Cara Penelitian Pengaruh Hubungan Antara Penjual dan Pembeli Terhadap Harga Barang	125
1.12 <i>Test Value</i>	135
1.13 Pembatasan Penggunaan Metode Nilai Transaksi	140
2. Metode II : Nilai Transaksi Barang Identik	143
2.1 Definisi	143
2.2 Hal Hal Yang Relevan	144
2.3 Barang Identik	145
2.4 Contoh Barang Identik	146
2.5 Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang	148
2.6 Tiga Tingkat Perdagangan Yang Paling Umum	148
2.7 Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang	150
2.8 Penerapan Di Lapangan	155
3. Metode III : Nilai Transaksi Barang Serupa	156
3.1 Definisi	156
3.2 Hal Hal Yang Relevan	156
3.3 Barang Serupa	156
3.4 Contoh Barang Serupa	157
4. Metode IV : Metode Deduksi	158
4.1 Definisi	158
4.2 Hal Hal Yang Relevan	159

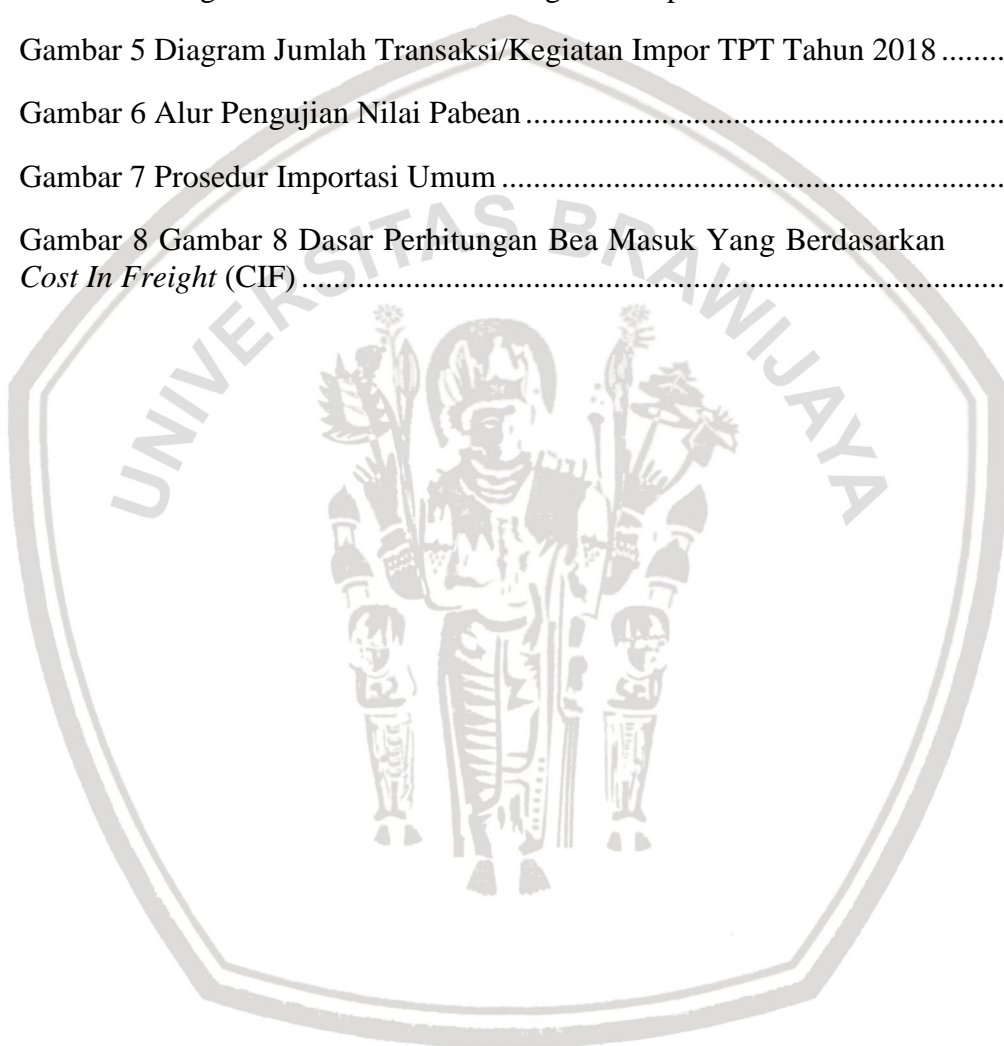
4.3 Pemilihan Harga Satuan.....	161
4.4 Keadaan Yang Sama Ketika Diimpor.....	162
4.5 Waktu Penjualan	163
4.6 Yang Laku Terjual Dalam Jumlah Terbanyak.....	163
4.7 Contoh Pemilihan Harga Satuan Dengan Memperhatikan Persyaratan Yang Laku Terjual Dalam Jumlah Terbanyak.....	164
4.8 Biaya Pengurangan	165
4.9 Tata Cara Penghitungan Nilai Pabean Berdasarkan Metode Deduksi	168
4.10 Tata Cara Memperlakukan Barang Yang Telah Di Proses Lebih Lanjut	170
4.11 Penerapan Dilapangan	170
5. Metode V : Metode Komputasi	172
5.1 Definisi.....	172
5.2 Hal Hal Yang Relevan	173
5.3 Biaya dan Harga Baku	174
5.4 Keuntungan dan Pengeluaran Umum	175
5.5 Jenis atau Kelas Yang Sama	176
5.6 Biaya Atau Nilai Pengeluaran Lainnya.....	176
5.7 Pemberitahuan Kepada Pembeli	176
5.8 Penerapan Di Lapangan	177
6. Metode VI : Metode <i>Fallback</i>	178
6.1 Definisi.....	178
6.2 Dalam Penetapan Nilai Pabean Dengan Metode Pengulangan.....	179
6.3 Hal Hal Yang Relevan	179
6.4 Konsisten Dengan Prinsip Prinsip <i>WTO Valuation Agreement</i> dan Pasal VII GATT.....	181
6.5 Data Yang Terdapat Pada Negara Pengimpor	182



6.6 Contoh Fleksibilitas Dengan Menggunakan Metode I.....	182
6.7 Contoh Fleksibilitas Dengan Menggunakan Metode II dan III.....	184
6.8 Contoh Fleksibilitas Dengan Menggunakan Metode IV	184
6.9 Penerapan Di Lapangan	191
D. Pengawasan Nilai Pabean.....	191
1. Garis Besar.....	191
2. Empat Fase Pengawasan Nilai Pabean	193
3. Pendekatan Manajemen Resiko Pada Pengawasan Nilai Pabean	201
4. Database Harga (DBH).....	247
E. Bagaimana Kendala dan Upaya Yang Dilaksanakan Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Bea Masuk Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan?	253
1. Pelanggaran Nilai Pabean (<i>Valuation Fraud</i>) dan Langkah Langkah Menanggulangannya.....	253
1.1 Pendahuluan.....	253
1.2 Motif Pelanggaran.....	254
1.3 Jenis Jenis Pelanggaran.....	255
1.4 Langkah Yang Harus Di Tempuh Untuk Menanggulangi Pelanggaran Nilai Pabean	273
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	276
B. Saran	277
DAFTAR PUSTAKA	

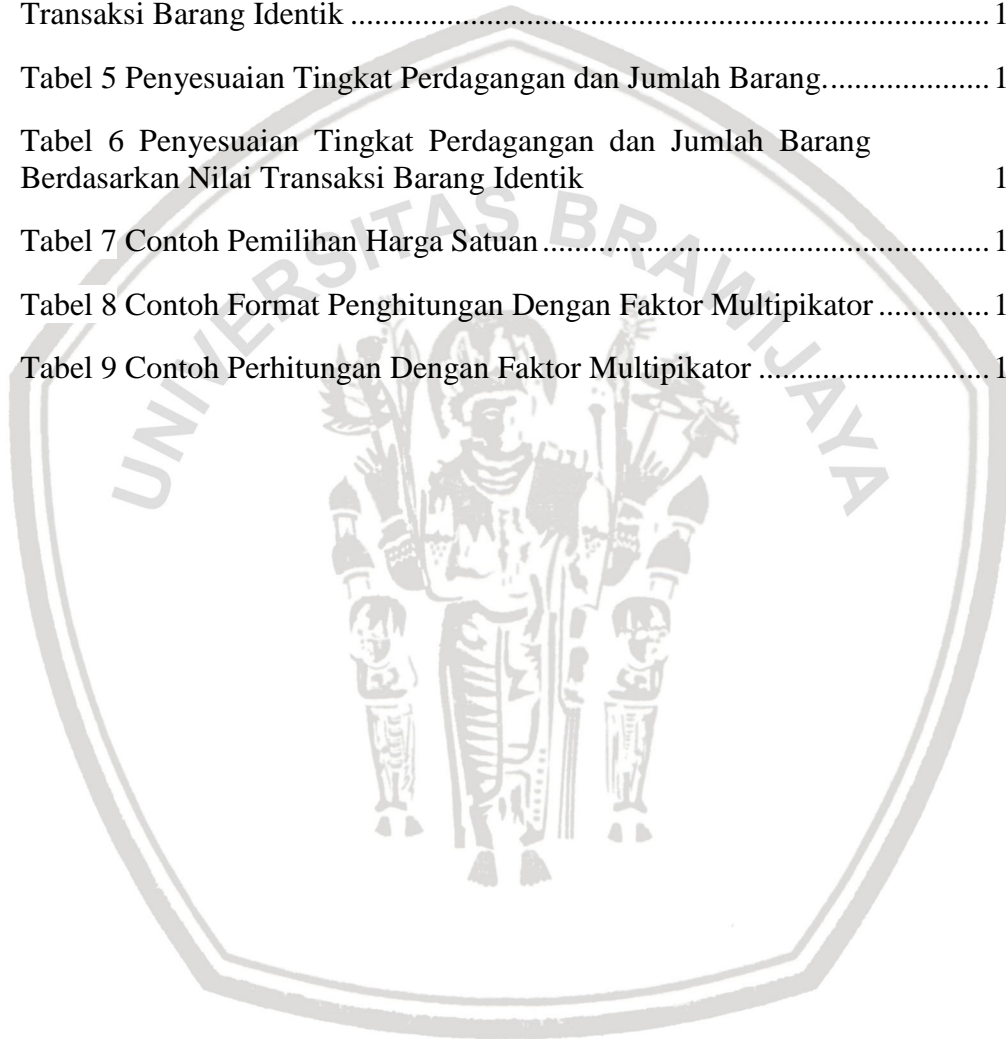
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	51
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai	55
Gambar 3 Diagram Jumlah Transaksi/Kegiatan Impor TPT Tahun 2016	56
Gambar 4 Diagram Jumlah Transaksi/Kegiatan Impor TPT Tahun 2017	57
Gambar 5 Diagram Jumlah Transaksi/Kegiatan Impor TPT Tahun 2018	58
Gambar 6 Alur Pengujian Nilai Pabean	65
Gambar 7 Prosedur Importasi Umum	73
Gambar 8 Gambar 8 Dasar Perhitungan Bea Masuk Yang Berdasarkan <i>Cost In Freight</i> (CIF)	114



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyesuaian Jumlah Barang.....	150
Tabel 2 Penyesuaian Jumlah Barang Berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik.....	150
Tabel 3 Penyesuaian Tingkat Perdagangan.....	152
Tabel 4 Penyesuaian Tingkat Perdagangan Berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik	152
Tabel 5 Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang.....	153
Tabel 6 Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang Berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik	154
Tabel 7 Contoh Pemilihan Harga Satuan	164
Tabel 8 Contoh Format Penghitungan Dengan Faktor Multipikator	187
Tabel 9 Contoh Perhitungan Dengan Faktor Multipikator	190



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Survey
- Lampiran 2 Balasan Surat Permohonan Izin Survey
- Lampiran 3 Informasi Nilai Pabean (INP)
- Lampiran 4 Deklarasi Nilai Pabean (DNP)
- Lampiran 5 *Sales Contract*
- Lampiran 6 Kontrak Pembelian Barang
- Lampiran 7 Buku Hutang
- Lampiran 8 Informasi Rekening
- Lampiran 9 Pemberitahuan Impor Barang
- Lampiran 10 *Invoice*
- Lampiran 11 *Packing List*
- Lampiran 12 *Bill of loading*
- Lampiran 12 *Schedule of Cargo Policy*
- Lampiran 14 *Certificate of Origin*
- Lampiran 15 Laporan Surveyor
- Lampiran 16 Izin Impor TPT oleh Kemendag
- Lampiran 17 Contoh Penelitian Barang Karena Kesalahan Pos Tarif
- Lampiran 18 Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- Lampiran 19 *Invoice*
- Lampiran 20 *Packing List*
- Lampiran 21 *Bill of Loading*
- Lampiran 22 Lembar LPPT
- Lampiran 23 Hasil Pengujian

RINGKASAN

Penegakan hukum oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam melaksanakan pungutan bea masuk di dasarkan kepada hasil uji kewajaran dari nilai pabean yang dilaporkan oleh pihak importir. Karena undang undang kepabeanan memberikan kebebasan kepada importir untuk mengisi dan menghitung sendiri nilai pabean, dan pajak yang dilaporkannya, dan dalam hal hasil kewajaran menunjukan bahwa nilai yang dilaporkannya lebih rendah di atas 5%, berdasarkan database I, dan database II (tidak wajar). Bea dan cukai menerbitkan informasi nilai pabean (INP) dan dibalas dengan deklarasi nilai pabean (DNP), atau konsultasi. DNP disini berupa pemanggilan pihak importir oleh bea dan cukai dengan disertai dokumen dokumen pelengkap impor seperti *invoice*, *packing list*, *bill of loading*, *airway bill*, *letter of credit*, dll.

Dan apabila dalam hasil DNP ataupun konsultasi tidak pula dapat menyakinkan pihak bea dan cukai bahwa nilai pabean yang dilaporkan adalah nilai pabean dari harga barang yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Pihak bea dan cukai menetapkan nilai pabean yang bersangkutan secara *official assessment* berdasarkan 6 metode yang dilakukan secara hirarki, berikut 6 metode penentuan nilai pabean :

1. Metode nilai transaksi
2. Metode Barang Identik, yaitu penentuan nilai pabean berdasarkan karakter, kualitas , reputasi, dan material barang yang identik.

3. Metode barang serupa, yaitu penentuan nilai pabean berdasarkan karakter dan material barang yang serupa.
4. Metode deduksi, yaitu penentuan nilai pabean berdasarkan harga satuan barang.
5. Metode komputasi, yaitu penentuan nilai pabean berdasarkan keuntungan dan pengeluaran umum, dan berdasarkan biaya atau bahan baku.
6. Metode fallback, yaitu penentuan nilai pabean berdasarkan pengulangan metode I sampai dengan metode V dengan fleksibilitas tertentu dan dengan menggunakan data yang terdapat pada negara pengimpor.

Setelah penetapan secara *official assessment* yang dilakukan oleh bea dan cukai telah dilakukan, dan syarat syarat untuk pengeluaran barang impor sudah terpenuhi seperti larangan dan pembatasan barang impor, penjaluran (merah, kuning, dan hijau), pemeriksaan fisik barang telah dilakukan, dan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) telah terpenuhi oleh importir. Bea dan cukai menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

SUMMARY

Law enforcement by the Directorate General of Customs and Excise in carrying out import duty levies is based on the results of the fairness test of the customs value reported by the importer. Because the customs law gives freedom to importers to fill in and calculate their own customs value, and the tax reported, and in the case of fairness results it shows that the reported value is lower than 5%, based on database I, and database II (unnatural). Customs and excise issues customs value information and is repaid by a customs value declaration, or consultation. Customs value declaration here is in the form of calling importers by customs and excise accompanied by imported supplementary documents such as invoices, packing lists, bill of loading, airway bills, letters of credit, etc.

And if the customs value declaration or consultation results are not able to convince the customs and excise that the reported customs value is the customs value of the price of goods actually paid or supposed to be paid. The customs and excise assigns the customs value concerned by official assessment based on 6 methods carried out in a hierarchical manner, following 6 methods for determining customs value:

- 1. Method of transaction value*
- 2. Identical Method, which is the determination of customs value based on identical character, quality, reputation, and material goods.*
- 3. The method of similar goods, namely the determination of customs value based on similar character and material goods.*

4. *Method of deduction, which is the determination of customs value based on the unit price of goods.*
5. *Computational methods, namely the determination of customs value based on general profits and expenses, and based on costs or raw materials.*
6. *Fallback method, which is the determination of customs value based on repetition of method I to method V with certain flexibility and by using data contained in the importing country.*

After official assessment has been carried out by customs and excise, the conditions for the issuance of imported goods have been fulfilled, such as prohibitions and restrictions on imported goods, tracking (red, yellow and green), physical inspection of goods, and payment of import duties and import tax has been fulfilled by importers. Customs and excise issues a letter of approval for goods expenditure.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia dan dalam rangka menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang menjadi tujuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan Negara. Dalam hal ini pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sumber hukum di Indonesia. Sebagai sumber hukum di Indonesia, maka pancasila merupakan pijakan yang mendasari segala peraturan yang dibuat. Artinya bahwa segala peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai nilai luhur Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan pancasila demi terwujudnya negara yang sejahtera. Negara sejahtera adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, sehingga menempatkan kewajiban kepastian sebagai kewajiban kenegaraan dalam melaksanakan pungutan negara melalui pembayaran bea masuk, melalui

peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari asas kepastian hukum harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, lalu lintas arus barang ekspor, dan impor, orang, dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong laju pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional melalui pungutan negara bea masuk telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi ekspor impor dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang maka pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sekarang diubah melalui Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya, maka peraturan perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal yang menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong laju pembangunan nasional.

Meskipun demikian, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memberikan akses yang sebebaskan untuk pemasukan barang dari negara lain, bahkan di negara-negara yang menganut sistem pasar bebas sekalipun. Tugas untuk mencegah hambatan masuknya barang impor dari negara lain selalu dibebankan pada institusi kepabean masing-masing negara. Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda¹.

Karena kepentingan setiap negara berbeda beda, maka berbeda beda pula aturan setiap negara dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor dalam daerah pabean Indonesia. Pungutan bea masuk adalah salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang impor². Dalam hal impor tekstil dan produk tekstil (TPT), perhitungan nilai pabean yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional sebagaimana tertuang dalam *WTO Valuation Agreement* atau yang secara formal dikenal dengan *Agreement On Implementation of Article VII of the*

¹ Roselyne Hutabarat, 1997, *Transaksi Ekspor-Impor*, Jakarta: Erlangga, Hal.1

² Pasal 1 butir ke 15 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Agreement on Tariff and Trade (GATT Valuation Agreement). Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyediakan sistem tunggal yang adil, seragam dan netral untuk penilaian barang-barang impor untuk tujuan bea dan cukai, sesuai dengan realitas komersial dan melarang penggunaan nilai pungutan sembarang atau fiktif. Perjanjian dengan konsep nilai positifnya, mengakui bahwa penilaian bea dan cukai harus sedapat mungkin didasarkan pada harga aktual barang yang akan dinilai. Dengan mayoritas perdagangan dunia dinilai berdasarkan metode nilai transaksi, Perjanjian ini memberikan lebih banyak prediktabilitas, stabilitas dan transparansi untuk perdagangan, sehingga memfasilitasi perdagangan internasional sementara pada saat yang sama memastikan kepatuhan dengan hukum dan peraturan nasional³. Nilai pabean yang ditetapkan harus berdasarkan tatacara yang konsisten dengan prinsip penetapan nilai pabean, yaitu mencerminkan keadaan yang sebenarnya, fair, netral dan tidak sewenang-wenang.

Dasar hukum lain yang melandasi adanya bea masuk impor adalah pasal 12 ayat (1) Undang Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan dengan memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Adapun dalam Undang Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang nomor 10 Tahun 1995 pasal ini tidak dirubah sama sekali. Hal ini berarti dalam melaksanakan pungutan bea masuk impor, yang menjadi dasar hukum adalah Undang Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 12

³World Customs Organization, **WTO Valuation Agreement**, situs *Online* di akses pada tanggal 16 November 2018, pukul 21.45 WIB. (<http://www.wcomd.org>).

ayat 1 dan bukan Undang Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, selanjutnya disebut dengan undang undang kepabeanan. Sedangkan pengecualian maupun perubahan atas besaran tarif mengikuti ketentuan lain, baik itu pasal dan ayat selain pasal 12 ayat (1) maupun atas keputusan dan peraturan dari kementerian keuangan yang membawahi direktorat jendral bea dan cukai.

Pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabea dilaksanakan oleh direktorat jendral bea dan cukai yang menekankan kepada pelayanan prima, yaitu penyelesaian prosedur yang sederhana, cepat dan akurat. Pelayanan di bidang kepabea ini sangat didambakan oleh dunia usaha, karena jika barang-barang dapat diurus dengan lancar dan biaya yang dikeluarkan akan dapat ditekan dan biaya yang tinggi akan dapat dihindari. Pengawasan terhadap sarana pengangkut dan barang yang diangkutnya merupakan suatu hal yang penting agar petugas bea dan cukai dapat menganalisis dan mengantisipasi kejadian atau risiko yang akan timbul. Semua kegiatan di bidang kepabea yang terkait dengan impor akan berhubungan dengan pengangkutan, pembongkaran, penyimpanan serta penimbunan yang wajib dilakukan oleh orang yang melakukan kegiatan kepabea. Pada awal importir melakukan kegiatan impor harus melewati beberapa prosedur dalam mekanisme impor. Penelitian terkini oleh berbagai organisasi internasional termasuk oleh Bank Dunia menyarankan bahwa aturan dan prosedur administratif dalam proses impor mempunyai efek yang penting dalam arus perdagangan antar negara. Prosedur-prosedur tersebut beserta penerapannya

bisa secara nyata digunakan sebagai pembatas yang signifikan bagi perdagangan internasional⁴.

Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadi semakin pesat perkembangannya seiring dengan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat dan bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan manusia. Kepabean dapat berfungsi ganda yaitu mengawasi keluar masuknya barang dan sebagai aparat pengaman yang berhubungan dengan keuangan, perdagangan nasional maupun internasional. Penegakan hukum di bidang kepabean perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pemasukan barang dari luar negeri. Selain diawasi juga mewajibkan memenuhi ketentuan pabean yang ada, karena dengan semakin meningkatnya volume impor dimungkinkan akan semakin mengundang potensi pelanggaran impor. Peningkatan volume impor dapat dilihat dari peningkatan yang signifikan dalam hal realisasi penerimaan bea masuk⁵.

Realisasi penerimaan Bea dan Cukai telah melampaui target sebelum tutup tahun. Dengan total target penerimaan tahun 2017 adalah Rp276.437.700.000 dan per 31 Desember 2017 telah tercapai Rp304.842.329.041 atau sebesar 110,28% dari target penerimaan. Pencapaian tersebut terdiri penerimaan bea masuk sebesar Rp 178.670.665.491 atau 110,15% dari target penerimaan bea

⁴ Bala Ramasamy, An Analysis Of Import-Export Procedures And Processes In China, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No 88 December 2010, hal 2

⁵ Ali Purwito M, Kepabeanan Konsep dan Aplikasi, Samudra Ilmu, Jakarta, 2006, hal 34

masuk dan penerimaan cukai sebesar Rp 126.171.663.550 atau 110,46% dari target penerimaan cukai⁶.

Prinsip yang dianut oleh UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam pembayaran bea masuk adalah *self assesment*⁷. Dimana dalam prinsip ini Undang Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan memberikan kepercayaan kepada importir untuk memberitahukan sendiri harga transaksi yang dibayarkan melalui pemberitahuan impor barang (PIB). Untuk pemberitahuan tersebut importir dituntut jujur dan bertanggung jawab melalui pembayaran bea masuk sebagai bagian dari kewajiban bernegara. Sepanjang penjual dan pembeli memberitahukan secara benar atau jujur atas nilai transaksinya, maka hak penjual dan pembeli serta hak negara atas penerimaan bea masuk akan terjamin. Permasalahan akan timbul apabila ternyata penjual dan pembeli melakukan kecurangan dalam memberitahukan nilai transaksinya dengan cara melakukan praktek *underinvoice*, *underpricing*, *undervaluation*, *overpricing*, yaitu mencantumkan harga impor tidak sesuai dengan harga sebenarnya untuk menghindari biaya bea masuk.

Terhadap pengawasan di bidang kepabeanan dan pungutan negara melalui bea masuk bea dan cukai membuat jalur hijau dan jalur merah⁸. Hijau bagi barang yang dianggap aman, sehingga hanya dokumennya yang diperiksa. Contohnya bahan baku yang diimpor pabrik-pabrik di Indonesia sedangkan yang masuk jalur merah diperiksa baik dokumen maupun barangnya. Dalam praktik lebih dari 80% barang diimpor melalui jalur hijau. Penanganan barang

⁶Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Tutup Tahun 2017, Penerimaan Bea dan Cukai Melampaui Target*, situs *Online*, di akses pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 21.56 WIB. (<http://www.beacukai.go.id>).

⁷ Pasal 16 Undang Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

⁸ Pasal 3 Undang Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kepabeanan

memang relatif lebih lancar dibandingkan dengan jika semua produk diperiksa satu per satu secara fisik namun jalur hijau justru menjadi ajang importir untuk melakukan *underinvoice*, *underpricing*, *undervaluation*, *overpricing*. Importir menyalahgunakan aturan yang mewajibkan pengusaha mengisi dokumen sendiri dan menghitung nilai pabeannya sendiri (*self assesment*), Cara ini dipakai importir untuk memainkan angka. Oleh karenanya untuk penetapan secara *official assesment* dilakukan sesuai sesuai dengan undang undang kepabeanan dan ketentuan penetapan nilai pabean peraturan menteri keuangan (PMK nomor 160/PMK 04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk), dalam hal terbukti adanya kasus *underinvoicing*, *underpricing*, *undervaluation*, *overpricing*, harus dikenakan tambahan biaya dan sanksi administrasi berupa denda, dan dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila unsur pidana terpenuhi⁹.

Maraknya pelanggaran di daerah pabean adalah impor ilegal sebagian besar masuk dengan cara impor borongan dan remebesan kawasan berikat, adapula yang bertindak nakal dengan cara *underinvoicing*, *underpricing*, *undervaluation*, *overvaluation*, dan pelarian kepada HS yang bea masuknya 0% (nol persen) atau kesalahan pada nilai pada pos tarif. Menurut Ade Sudrajat, Ketua API, mengatakan impor ilegal menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat. Praktek *underinvoice*, *underpricing*, *undervaluation*, *overpricing* menyebabkan harga barang rendah akibat pengenaan bea masuk dan pajak impor lainnya kecil¹⁰. Praktik tersebut memalsu harga di dokumen invoice tidak sesuai dengan harga barang yang sebenarnya sudah banyak

⁹ Bala Ramasamy, loc. cit

¹⁰ Industri Bisnis, *Impor Tekstil Mencapai 310.000 Ton*, situs Online, di Akses Pada Tanggal 15 Maret 2018, Pukul 01.00 WIB (<http://industri.bisnis.com>)

dikeluhkan pengusaha dalam negeri. Sampai sekarang, pembobol bea masuk memang tidak pernah masuk ke pengadilan. Kalaupun ada importir yang tertangkap di lapangan, pihak Bea dan Cukai tidak bisa memidanakan pengusaha itu. Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berlaku sekarang, importir yang ketahuan mencantumkan harga produk lebih rendah daripada yang seharusnya hanya dikenai denda administrasi sebesar 100% (seratus persen) dan denda maksimal sebesar 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar¹¹. Tuntutan pidana baru dikenakan bagi yang menggunakan faktur palsu. Selain adanya praktek main tekan harga, banyak pula ulah curang lainnya. Misalnya memalsu nama barang, mengaku sebagai importir produsen agar bisa masuk ke jalur hijau, serta menggunakan nama importir lain.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melaksanakan penelitian terhadap pelanggaran pelanggaran di kepabeanan khususnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui direktorat jendral bea dan cukai sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran kepabean khususnya praktik *underinvoice*, *underpricing*, *undervaluation*, *overvaluation* di kantor pusat direktorat jendral bea dan cukai jakarta, karena dengan maraknya praktik pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kerugian negara karena menyebabkan pungutan negara melalui bea masuk dan pajak impor lainnya menjadi tidak maksimal. Dengan tidak maksimalnya penerimaan pungutan negara melalui bea masuk ini maka perwujudan negara yang sejahtera maupun perwujudan dari pembangunan

¹¹ Pasal 16 butir ke 4 Undang Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

nasional terhadap masyarakat terhambat karena penerimaan negara melalui bea masuk tidak maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis memilih judul penelitian skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Penegakan Hukum oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Melaksanakan Pungutan Bea Masuk terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”**.



B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang dipergunakan dalam pembahasan agar dapat memberikan gambaran yang jelas, serta dapat tercapai sasaran yang sesuai dengan judul yang dipilih. Perumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terhadap pelanggaran kepabeanan khususnya pelanggaran *underinvoice* yang dilakukan oleh importir?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pungutan bea masuk berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami, mendiskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan pada daerah pabean oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta.
2. Untuk memahami, mendiskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan pada daerah pabean oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini juga berupaya mengkaji dan mendeskripsikan peranan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan sebagai bentuk upaya meningkatkan pendapatan negara melalui Bea Masuk.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi bagi penelitian sejenis di masa depan.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih memperketat sistem kepabeanan dalam melaksanakan tugas pengawasan guna memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi masyarakat luas dalam memahami prosedur sistem impor barang sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan pungutan negara melalui bea masuk yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai tujuan tercapainya kesejahteraan rakyatnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini di bagi 5 (lima) Bab yang berurutan dan saling berkaitan satu sama lain. Berikut ini uraian secara singkat pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas pada tiap babnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum terkait penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Bea dan Cukai sebagai aparat yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pungutan negara berupa bea masuk berdasarkan Undang Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait.

BAB III : METODE PENELITIAN

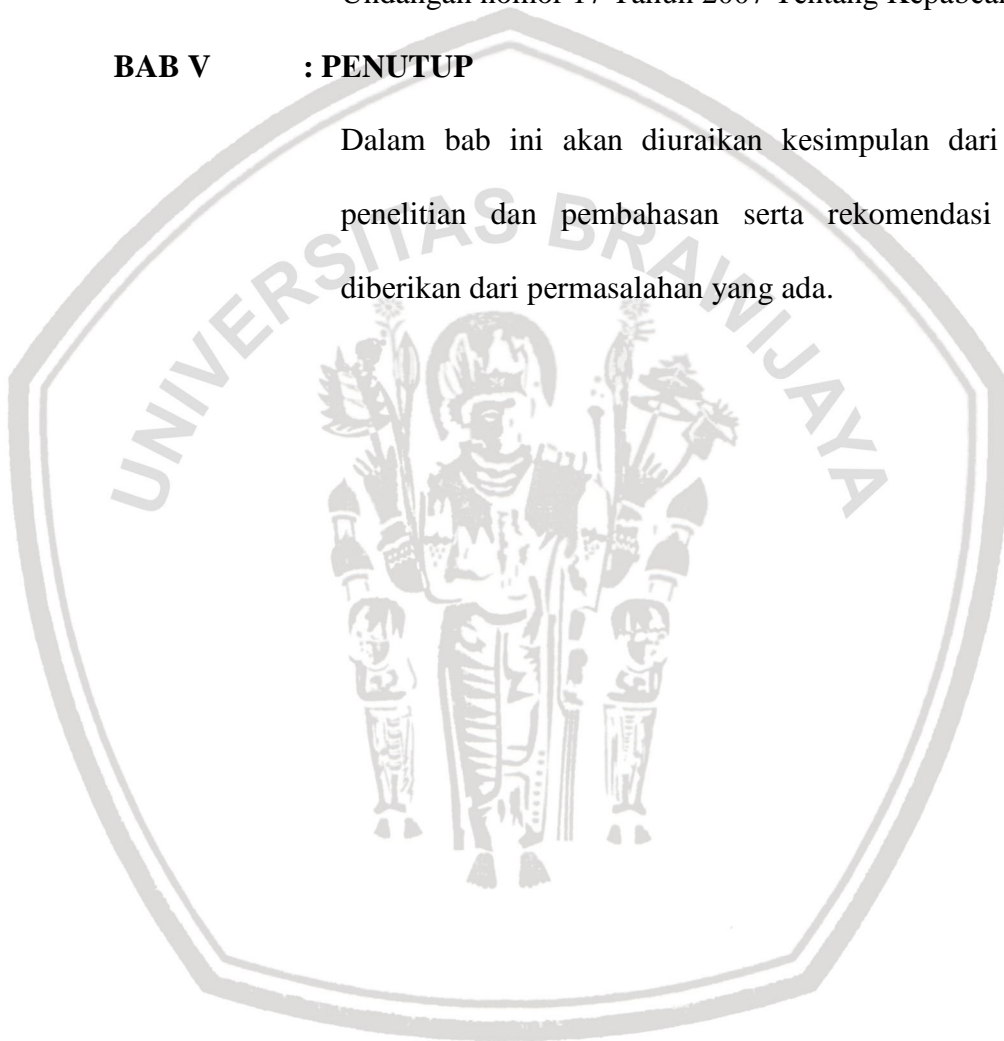
Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan bahan sumber hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, serta definisi konseptual dan kerangka berpikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam upaya memberantas pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kepabeanan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi yang diberikan dari permasalahan yang ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal².

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:³

1. Di tinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

¹ Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

² Shant Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm 33.

³ Ibid.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :⁴

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang undang. Dalam tahap ini pembentuk undang undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum) oleh aparat aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,

⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 173.

kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat pelaksana. Dalam tahap ini aparat pelaksana bertugas menegakkan peraturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang undang melalui penerapan peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang undang. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (*legislator*) dengan memperhatikan nilai nilai keadilan.

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

1. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah hanya pelaksaan perundang undangan atau penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Apabila hanya

pelaksanaan perundang undangan atau keputusan keputusan hakim saja maka ketika hal tersebut mengganggu kedalam di dalam pergaulan hidup maka hal tersebut adalah kelemahan. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor faktor tersebut, adalah :⁵

1.1 Faktor Hukum

Faktor hukum mengenai berlakunya undang undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas asas tersebut antara lain:

- a. Undang undang tidak berlaku surut artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang hanya dibuat oleh penguasa yang tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang undang bersifat khusus menyampingkan undang undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luasa ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

⁵Soerjono Soekanto, op. cit. hlm42.

- d. Undang undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, agar pembuat undang undang tidak sewenang wenang atau supaya undang undang tersebut tidak menjadi huruf mati.

Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang undang yaitu pertama, tidak diikutinya asas asas berlakunya undang undang. Kedua, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang. Ketiga, ketidakjelasan arti kata kata di dalam undang undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

1.2 Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu.

Setiap aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan dan pemberian sanksi.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yaitu peranan yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga negara masyarakat lainnya, harus mempunyai beberapa kedudukan atau peranan sekaligus. Namun apabila terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Dalam penegakan hukum yang seringkali menjadi masalah yaitu mengenai peranan penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum dilihat dari segi pengambilan keputusan atau bagaimana ia menjalankan peranannya. Pengambilan keputusan ini dilakukan karena tidak ada perundang-undangan

yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan dalam menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Disamping itu, di dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, maka penegak hukum sebaiknya mampu untuk mengambil suatu keputusan serta bertindak sesuai dengan fakta dan menjunjung tinggi keadilan. Walaupun dalam kenyataannya banyaknya penegak hukum yang dipengaruhi oleh hal-hal lain, seperti misalnya, interest groups dan juga public opinion yang mungkin mempunyai dampak positif ataupun negatif.

1.3 Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal penegak hukum mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang komputer, dalam pelanggaran tertentu yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis penegak hukum dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh aparat hukum begitu luas dan banyak.

1.4 Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Baik dari masyarakat tentu ada hubungan dengan faktor faktor lainnya, yaitu undang undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat tertentu mengenai pengertian hukum. Ada pandangan yang mengatakan hukum adalah ilmu pengetahuan, hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai jalinan nilai, hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa. Dari sekian banyaknya pengertian hukum yang diberikan, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya, bahwa baik buruknya suatu hukum dinilai dengan pola perilaku penegak hukum tersebut dimana menjadi cerminan

terhadap hukum sebagai struktur maupun proses. Di dalam kehidupan sehari-hari akan sering dicumpai macam macam latar belakang manusia mengenai hukum. Di antara mereka ada yang menaati hukum, ada yang pura-pura taat terhadap hukum, dan ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, serta adapula yang secara terang-terangan melawan hukum. Masalah yang sering timbul ketika mereka yang pura pura menaati hukum, karena mencari peluang di mana penegak hukum berasa dalam kurang siaga maka ia berpotensi melakukan pelanggaran begitupula dengan mereka yang tidak mengacuhkan hukum ataupun yang terang terangan melawan hukum.

1.5 Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya permasalahan terkait sistem nilai nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur,substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut. Termasuk cakupan tatanan lembaga lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga lembaga tersebut, hak hak dan kewajiban kewajibannya. Susbstansi ini mencakup isi norma norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai niai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Khususnya di indonesia memiliki hukum adat, dimana hukum adat sangat berkembang di masyarakat. Tiap daerah memiliki hukum adatnya masing-

masing. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Disamping itu, berlaku pula hukum tertulis yang timbul dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

B. Kajian Umum Tentang Kepabeanan

Pengertian Kepabeanan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah :

“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.”

Adapun pengertian dari daerah pabean sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah :

“Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.”

Pengertian kantor pabean dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah :

“Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Adapun Instansi yang diberikan tugas dalam hal kepabeanan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah:

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan cukai”.

1. Kawasan Pabean dan Daerah Pabean

Daerah pabean dalam pasal 1 butir 2 Undang Undang no 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Kawasan Kepabeanan dalam pasal 1 butir 3 Undang Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batasan tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, maupun tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai

C. Kajian Umum Tentang Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

1. Pengertian impor

Impor adalah memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku⁶. Selanjutnya, Hamdani juga mengartikan impor sebagai membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan⁷. Sebagaimana uraian pengertian impor dan barang yang telah dipaparkan diatas, maka pengertian impor barang dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Pengertian Tekstil dan Produk Tekstil

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 85/-M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk menyatakan “Tekstil dan produk tekstil, yang selanjutnya disingkat TPT adalah serat, benang filamen, kain lembaran, dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau penolong”.⁸

⁶ Djauhari Ahsjar, 2007, Pedoman Transaksi Ekspor & Impor, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 153.

⁷ Hamdani, 2003, Seluk Beluk Perdagangan Ekspor, Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, Jakarta, hlm 2.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

3. Legalitas Importir⁹

Kegiatan Impor, merupakan kegiatan memasukan barang dari daerah pabean negara lain ke daerah pabean di Indonesia. Daerah pabean, adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang perlu diketahui bagi importir adalah persyaratan atau legalitas bagi importir, langkah atau tahapan dalam memesan barang importir dan dokumen yang terkait, serta jaringan perdagangan impor yang terkait.

Legalitas sebagai importir, impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (selanjutnya disingkat API) Peraturan Menteri Perdagangan nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 tentang perubahan atas Permendag nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor. Apabila perusahaan belum mempunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.

API terbagi menjadi dua, yaitu API umum dan API Produsen, bagi Usaha Kecil Menengah, A dapat API tersebut dapat diurus di Dinas Perdagangan Setempat. Sedangkan untuk perusahaan migas, perusahaan modal asing perusahaan modal dalam negeri masing-masing dapat diurus di Kementerian

⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Prosedur dan Dokumen Impor*, Situs Online, di Akses Pada Tanggal 4 Juli 2018, Pukul 21.59 WIB. (www.kemendag.go.id).

Perdagangan yaitu Perdagangan Luar Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Importir lebih dahulu diharuskan dapat memahami Permendag No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, termasuk dalam kelompok produk impor yang mana yang produknya akan di Impor. Barang Impor dikelompokkan menjadi 3 yaitu produk yang diatur, dilarang dan bebas impornya. Masing masing kelompok ini memiliki persyaratan yang terpisah dan berbeda.

Selanjutnya izin importasi dapat diberikan bagi importir yang telah memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Sehingga perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke direktorat jendral bea dan cukai untuk mendapatkan NIK/SPR. Perusahaan yang belum memiliki NIK/SPR maka hanya diizinkan melakukan importasi sekali saja.

Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) adalah sebagai berikut:

1. Importir mencari *supplier* barang sesuai dengan yang akan diimpor
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C (*Letter Of Credit*) di Bank Devisa dengan melampirkan PO (*Purchase Order*) mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi *Supplier* dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
3. Barang-barang dari *supplier* siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.

4. *Supplier* mengirim faks ke Importir dokumen B/L (*Bill of Lading*), Invoice, *Packing List*, dan beberapa dokumen lain jika di isyaratkan (Sertifikat Karantina, Form E, Form D, dan seterusnya).
5. Original Dokumen dikirim via Bank/ original kedua ke importir
6. Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang), jika importir mempunyai Modul PIB dan EDI sistem sendiri maka importir bisa melakukan pengimputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB.
7. Dari PIB yang dibuat, akan diketahui berapa bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB (*Invoice, Packing List, Bill of Loading, Airway Bill, Asuransi*).
8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) bea dan cukai secara *online* melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).
10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer (SKP) Bea dan Cukai secara *online* melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal *Indonesia National Single Window* (INSW) untuk diproses validasi kebenaran pengisian

dokumen PIB dan proses verifikasi perizinan (*Analizing Point*) terkait Lartas.

12. Jika ada kesalahan maka PIB akan di *reject* dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB.
13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai,
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan *Analizing Point* di SKP.
15. Jika data benar akan dibuat pengaluran.
16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan ada pemeriksaan dokumen sebelum pejabat bea dan cukai mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh Pejabat Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
18. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencamtumkan dokumen asli dan SPPB.

Beberapa Hal yang membuat dokumen mendapat jalur Merah antara lain :

1. Impor Baru
2. Profil Importir High Risk
3. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
4. Barang Impor sementara

5. Ada Informasi Intelejen
6. Terkena sistem acak atau *random*
7. Barang Impor yang termasuk dalam kondisi berisiko tinggi dan/atau berasal dari Negara yang berisiko tinggi.

4. Dasar Perhitungan Bea Masuk Nilai Pabean

Undang Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean menyatakan nilai pabean sebagai berikut:¹⁰

1. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
2. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dari barang identik.
3. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa.
4. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas permintaan importir, urutan penentuan nilai

¹⁰ Pasal 15 Undang Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan mendahului ayat (4).

5. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode deduksi.
6. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode komputasi.
7. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.
8. Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa nilai pabean adalah nilai dari barang impor yang bersangkutan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan pungutan negara berupa bea masuk.

D. Ekspor

Pengertian ekspor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean¹¹. Barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2). Barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2). nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan, untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diekspor¹².

¹¹ Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

¹² Pasal 1 butir (15a) Undang Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Dengan demikian ekspor terjadi jika barang sudah keluar dari daerah pabean, jika sudah diajukan pemberitahuan pabean dan sudah dimuat ke sarana pengangkut untuk dibawa keluar daerah pabean.

E. Kajian Umum Tentang Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Di negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jendral bea dan Cukai yang merupakan bagian dari World Customs Organization (WCO)¹³. Sebagai sebuah instansi kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah:

1. Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Semedi Bambang, **Pengawasan Kepabeanan**, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013, hal. 22.

4. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok dari direktorat jenderal bea dan cukai adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan dibidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabea dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pengutan negara yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁴.

F. Jenis Pelanggaran di Bidang Kepabeanan.

Pelanggaran kepabeaen sebagaimana dimaksud dalam konvensi Kyoto adalah “*Customs offence, means any breach, or attempted breach of custom law*” (pelanggaran pabeaen adalah setiap pelanggaran, atau percobaan pelanggaran, terhadap UU kepabeanan)¹⁵. Pelanggaran dimaksud dikelompokkan ke dalam dua kelompok yakni pelanggaran ketentuan

¹⁴ Mochamad Anwar, **Segi segi Hukum Masalah Penyelundupan**, Alumni, Bandung, 2001, hl 159.

¹⁵ Eddhi Sutarto, **Rekonstruksi Hukum Pabea Di Indonesia**, Erlangga:Jakarta, 2010. Hlm 103.

administrasi yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum ketentuan perundang-undangan serta penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi. Yang kedua adalah pelanggaran ketentuan pidana yang ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan diproses sesuai hukum acara pidana. Pelanggaran kepabeanan menurut *WCO Handbook for commercial Fraud Investigators* dipilah menjadi enam belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Penyelundupan adalah memasukkan dan mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan.
2. Uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
3. Pelanggaran nilai barang dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi yang lebih besar.
4. Pelanggaran negara asal barang memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar untuk memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
5. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah
Tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.

¹⁶ Ibid.

6. Pelanggaran impor sementara tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran perizinan ekspor/impor Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran transit barang barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindar bea masuk.
9. Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota
10. Pelanggaran tujuan pemakaian misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal asing tetapi dijual untuk pihak lain.
11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam UU spesifikasi barang atau perlindungan konsumen.
12. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual barang palsu atau bajakan yang diimpor atau diekspor dalam suatu negara.
13. Transaksi gelap transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan illegal.
14. Pelanggaran pengembalian bea klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.

15. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringan pajak secara tidak sah.
16. Likuidasi palsu perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak.

Berdasarkan keterangan di atas *underinvoice*, *underpricing*, *undervaluation*, *overpricing* adalah pelanggaran kepabeanan yang termasuk pada nomor ketiga yaitu, pelanggaran nilai barang (nilai pabean) atau pelanggaran pos tarif dapat terjadi secara sengaja/maupun tidak sengaja dengan mengubah nilai harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk dan pajak lainnya atau penekanan harga sehingga nilai yang seharusnya dibayar atau seharusnya dibayar menjadi lebih kecil dari harga yang seharusnya dibayar. Dalam praktik pelanggaran kepabeanan di atas penerapan sanksi hanya berupa sanksi administratif saja.

G. Sanksi Administratif

Dalam praktik kepabeanan penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fiskal yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda. Hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu, peraturan kepabeanan diharapkan tidak menjadi penghalang bagi perkembangan perdagangan tersebut. Dalam undang undang kepabeanan yang merupakan bagian dari hukum fiskal, beberapa ketentuan yang diatur

didalamnya telah diselaraskan dengan praktik kepabeanan internasional yang didasarkan pada persetujuan dan konvensi internasional di bidang kepabeanan dan perdagangan, antara lain ketentuan yang menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran yang tidak bersifat serius dapat diselesaikan dengan pengenaan sanksi administrasi.

Undang undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk atau bea keluar yang terhutang oleh importir atau eksportir (*self assesment*). Sistem *self assesment* memberikan kepercayaan yang besar kepada para pengguna jasa kepabeanan. Namun, kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan undang undang yang berlaku. Dalam hal pengguna jasa kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang undang kepabeanan, maka diatur pengenaan sanksi administrasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran tersebut.

Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-undang, dengan demikian sanksi administrasi tersebut harus merupakan sarana fiskal yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karena sanksi administrasi merupakan kewajiban yang dapat memberatkan mereka yang terkena, maka penerapannya harus memenuhi kriteria yang transparan agar dapat dicegah terjadinya ketidakpastian dalam menetapkan sanksi dimaksud. Untuk kepastian penyelenggaraannya, kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan sanksi administrasi dapat

dilaksanakan oleh kepala kantor pabean atas nama direktur jenderal bea dan cukai.¹⁷

Pengenaan denda administrasi yang dihitung berdasarkan persentase bea masuk dirasa cukup memenuhi rasa keadilan karena besar kecilnya sanksi dapat diterapkan secara proporsional dengan berat ringannya pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Namun, dalam era globalisasi ekonomi, kebijaksanaan umum di bidang tarif ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif sehingga akan terdapat beberapa jenis barang yang tarif bea masuknya nol persen. Apabila demikian halnya, pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari Bea Masuk tidak dapat lagi diterapkan secara proporsional, sedangkan pelanggaran yang timbul atas tidak dipenuhinya suatu ketentuan tetap harus diberikan sanksi. Oleh karena itu, pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan yang dilakukan terhadap impor barang yang tarif atau tarif akhirnya nol persen, dikenai sanksi administrasi berdasarkan satuan jumlah dalam rupiah. Penetapan penyesuaian besarnya sanksi administrasi dan besarnya bunga dengan peraturan pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi adanya perubahan nilai mata uang.¹⁸

Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda di bidang kepabeanan memberikan penjelasan mengenai sanksi administratif sebagai berikut¹⁹:

¹⁷ Penjelasan peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan.

¹⁸ Penjelasan pasal 114 Undang Undang nomor 11 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan.

1. Sanksi administratif berupa denda hanya pelanggaran yang diatur dalam undang undang.
2. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya dinyatakan dalam:
 - a. Nilai rupiah tertentu nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum.
 - b. Presentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar
 - c. Presentasi tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;atau
 - d. Presentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Dan sanksi administratif untuk pelanggaran nilai pabean yang di atur dalam undang undang kepabeanan menerapkan sanksi administratif terhadap importir yang terbukti memasukan nilai pabean tidak sesuai dengan nilai pabean yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, di atur dalam Undang Undang Kepabeanan yang menyatakan sebagai berikut²⁰:

“Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.”

²⁰ Pasal 16 butir 4 Undang Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Alasan penulis memilih yuridis adalah berdasarkan judul yang diangkat yaitu Penegakan Hukum oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam Dalam Melaksanakan Pungutan Bea Masuk Terhadap Barang Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Berdasarkan Undang Undang no 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berkaitan dengan pungutan negara berupa bea masuk terhadap barang impor TPT yang melalui pemberitahuan impor barang (PIB) dengan cara pengisian dokumen *invoice* secara *self assesment* oleh importir banyak disalah gunakan dengan memberikan nilai pabean tidak sesuai dengan nilai pabean yang sebenarnya (praktik *under invoice*, *under pricing*).

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai dataawalnya,

yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang mana penelitian tersebut meneliti tentang penegakan hukum suatu Undang Undang dan ingin mencari korelasi antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya yang terdiri dari studi dokumen, observasi dan wawancara¹. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji Undang Undang no 17 Tahun 2007 dan Peraturan menteri terkait terhadap pungutan bea masuk. Yang seharusnya importir yang mengimpor barang wajib memberikan nilai pabean yang sesuai dengan nilai pabean sebenarnya, yang pada kenyataannya maraknya pihak importir barang memberitahukan nilai pabean tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Maka dari itu penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah dan dampak yang ditimbulkan akibat ketidaktertiban tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota DKI Jakarta, khususnya di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta. Alasan penulis ingin melakukan penelitian di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta adalah karena Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta adalah instansi yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya di bidang Kepabeanan dalam perumusan, penyusunan dan melaksanakan tugas pokok terkait kepabeanan dan cukai

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata, tindakan dan tambahan data seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2, yaitu² :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan³. Data primer yaitu informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain). Data primer diperoleh dari wawancara dengan Pejabat atau Pegawai yang berwenang di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan cagar budaya dan peraturan tata ruang, jurnal, skripsi, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, sehingga analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis. Teknik yang digunakan berupa data primer yang menggunakan observasi untuk menelaah lebih dalam mengenai permasalahan yang didukung dengan studi literatur wawancara serta dokumentasi yang dilakukan kepada pihak Kantor Pusat

² Mukhtar. 2013. **Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif**. Jakarta : GP Press Group. Hal. 100

³ Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 121

Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta. Berdasarkan teknik tersebut peneliti dapat membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga padaakhirnya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai akibat ketidaktahuan dan ketidaktertiban importir.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan atau yang akan diteliti sebagaimana sejalan dengan pengertian yang dipaparkan oleh Sugiyono bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁴. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah pegawai pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk petugas dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti

⁴ Sugiyono. 2014. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)**. Bandung : Alfabeta. Hal 80

menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menggambarkan pelaksanaan dan interpretasi data sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan *deskriptif analitis* yaitu cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

⁵ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta: Jakarta, 2004, hlm. 91

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai

1. Sejarah Bea dan Cukai¹

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.

Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea dan cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi bea dan cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah bea dan cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas bea dan cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama

¹Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Sejarah Bea dan Cukai*, situs Online, di Akses Pada Tanggal 5 Juli 2018, Pukul 00.22 WIB (<http://www.beacukai.go.id>).

resmi bea dan cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor atau keluar), dan *accijnzen* (*excise* atau cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea dan cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga bea dan cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi jawatan bea dan cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

2. VISI, MISI, strategi dan fungsi utama bea dan cukai²

a. Visi

“Menjadi Institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia”

Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

b. Misi

Terdapat 3 (tiga) misi yang dimiliki oleh kantor pusat direktorat jenderal bea dan cukai, yaitu:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. Peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki lambang yang menggambarkan bidang yang menjadi tugasnya dalam pemerintahan.

Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah bentuk suatu kesatuan gambar dan tulisan terdiri dari³:

² Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Visi, Misi dan Fungsi Utama*, situs Online, di Akses Pada Tanggal 5 Juli 2018, Pukul 00.22 WIB (<http://www.beacukai.go.id>).

Gambar 1.

Logo Direktorat Jendral Bea dan Cukai



Logo tersebut berlukiskan segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya, Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya, Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar, Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran. Sedangkan maknanya terdiri dari beberapa hal, yakni:

1. Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila.
2. Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.
3. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin.
4. Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober, dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

³Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Logo Direktorat Jendral Bea dan Cukai*, situs *Online*, di Akses Pada Tanggal 5 Juli 2018, Pukul 00.30 WIB (<http://www.beacukai.go.id>)

5. Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan, dan.

6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai terletak di jalan Jendral Ahmad Yani (By pass) Rawamangun, Jakarta Timur. Kantor Pusat DJBC ini terletak strategis di tengah kota Jakarta dengan kemacetan dan segala hiruk pikuknya. Walau begitu kantor pusat tetap bisa dijangkau dengan akses jalan tol lingkaran dalam yang memudahkan perjalanan untuk menuju Kantor Pusat DJBC ini dari segala penjuru kota Jakarta mulai dari pelabuhan, bandara, maupun daerah pabean sekitarnya, sehingga memudahkan koordinasi antara kantor wilayah maupun kantor pelayanan bea dan cukai di sekitarnya.

a. Tugas⁴

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Adapun fungsi direktorat jenderal bea dan cukai sebagai berikut:

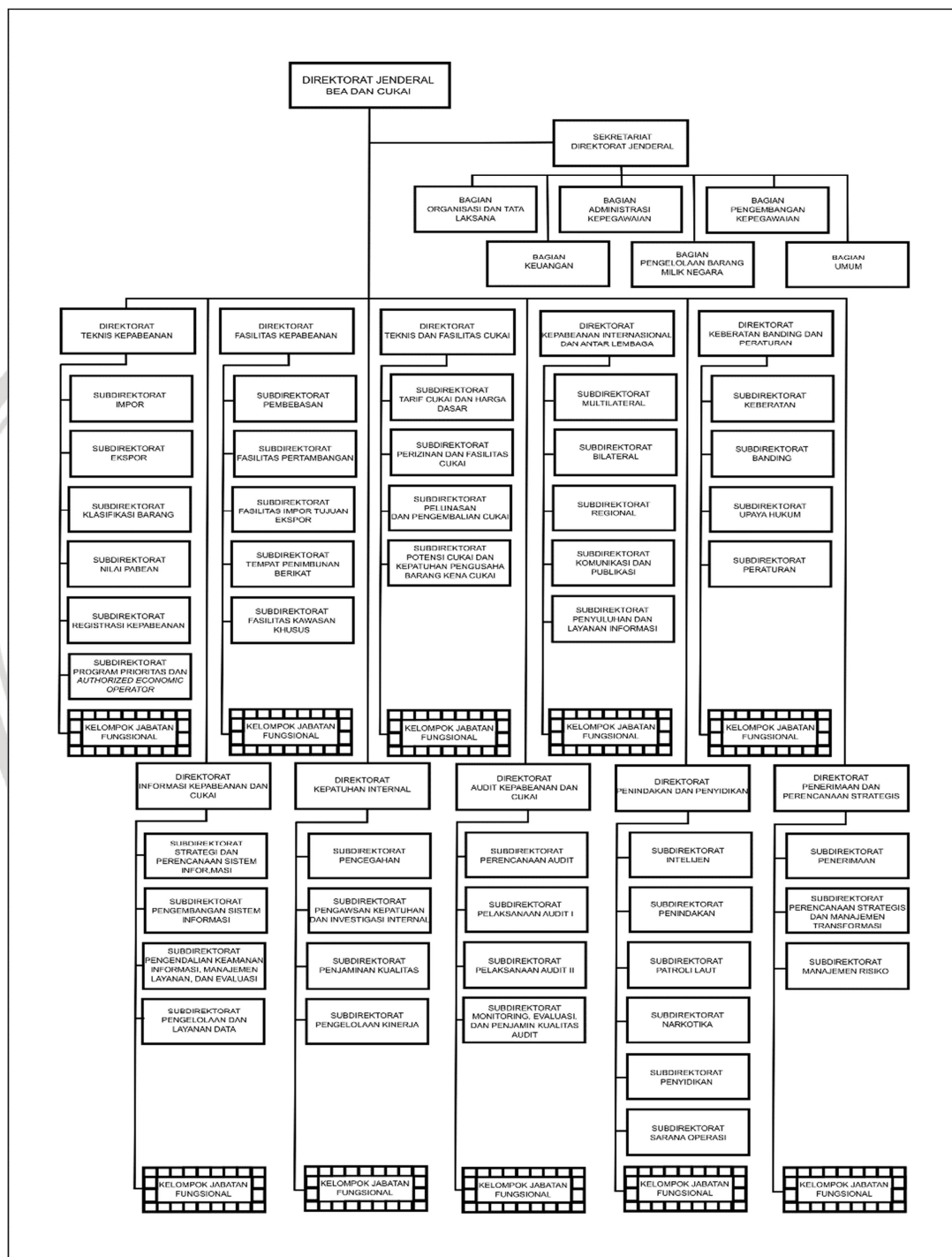
⁴ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Tugas dan Fungsi*, situs Online, di Akses Pada Tanggal 5 Juli 2018, Pukul 00.40 WIB (<http://www.beacukai.go.id>)

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

4. Struktur Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai⁵

Gambar 2

Struktur Organisasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok



⁵ Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Struktur Organisasi*, situs Online, di Akses Pada Tanggal 5 Juli 2018, Pukul 00.45 WIB (<http://www.beacukai.go.id>)

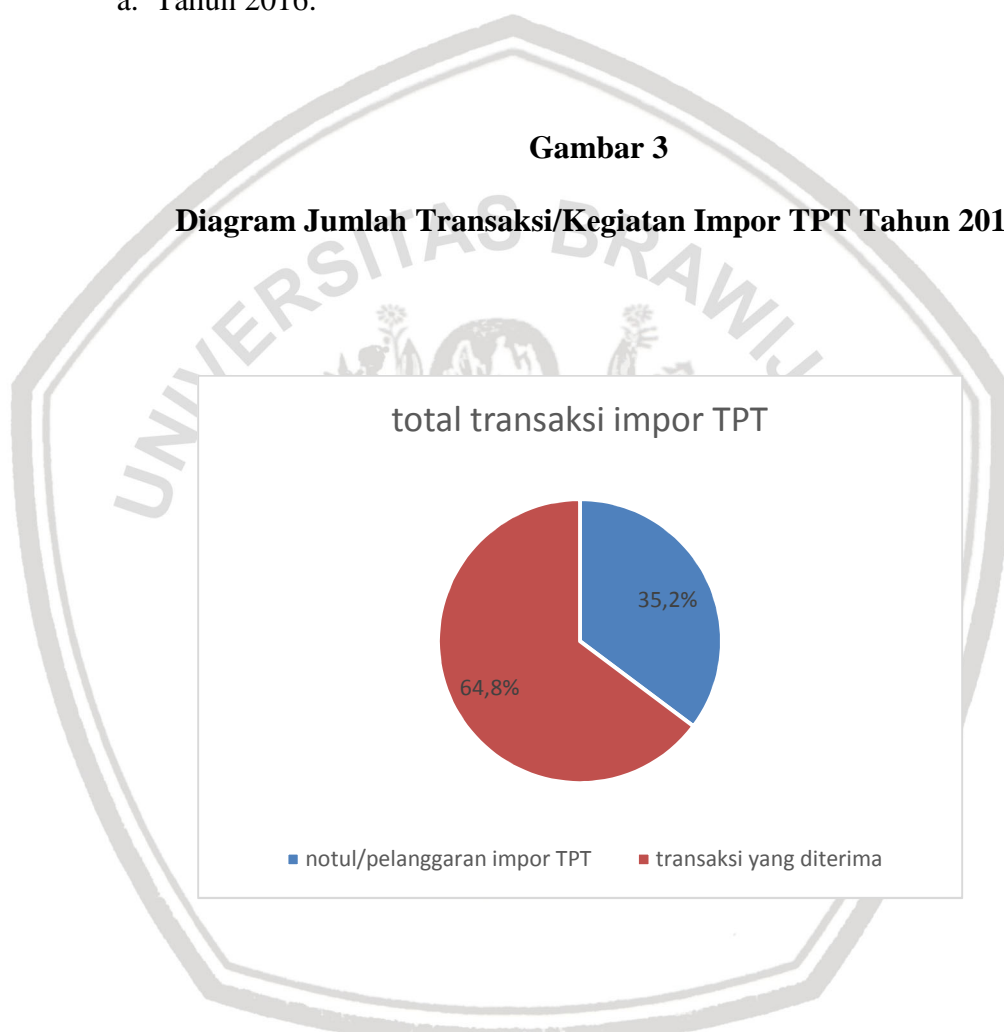
5. Total Jumlah Transaksi/Kegiatan Impor TPT di Indonesia⁶

Berdasarkan judul di atas peneliti mengambil data yang berasal dari Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai, berdasarkan data dari 2016 sampai Agustus 2018 ini terdapat 1888 transaksi barang impor tekstil dan produk tekstil, berikut data:

a. Tahun 2016:

Gambar 3

Diagram Jumlah Transaksi/Kegiatan Impor TPT Tahun 2016



Pada tahun 2016 total transaksi impor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada sepanjang tahun 2016 dari total 617 transaksi impor TPT, terdapat pengenaan notul maupun pelanggaran impor TPT sebanyak 217, dan transaksi yang diterima atau tanpa pelanggaran terdapat 399 transaksi impor

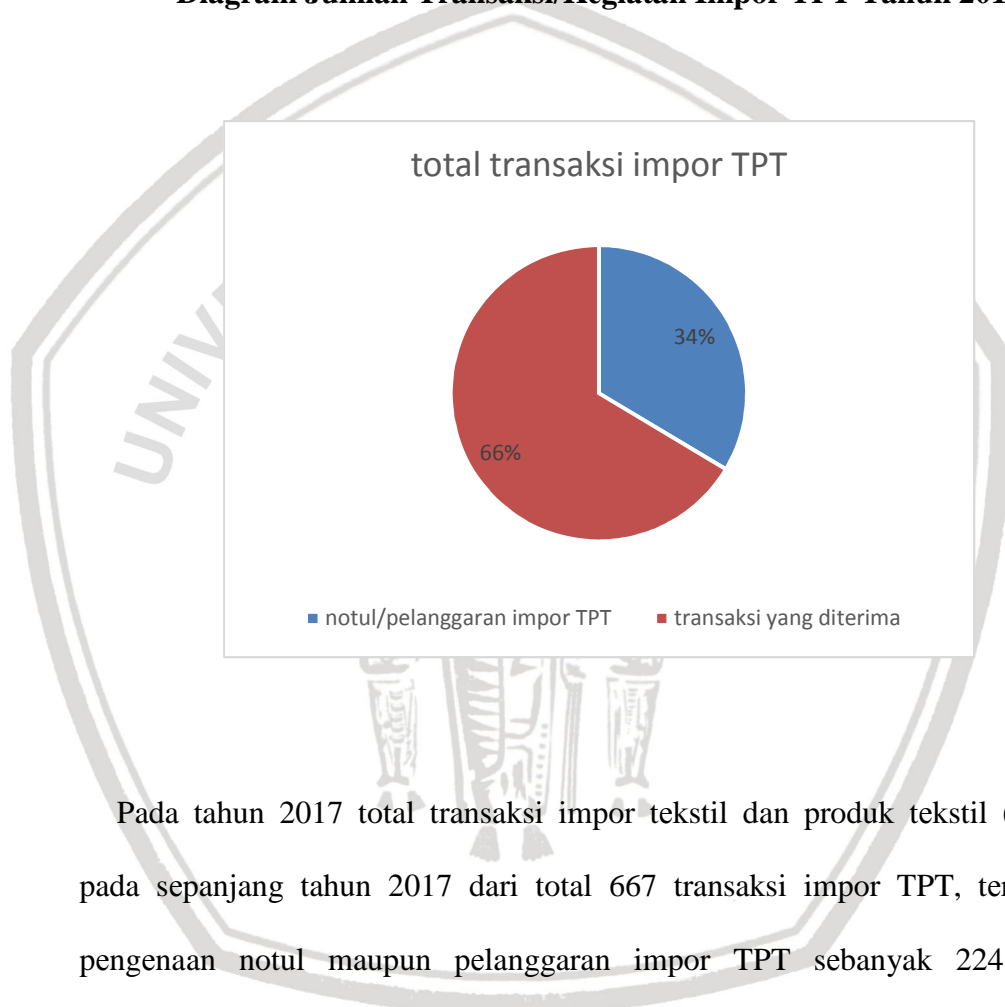
⁶ Kompilasi Data Transaksi Impor TPT Tahun 2016 – Agustus 2018 di Daerah Pabean di Indonesia, Kantor Pusat DJBC.

yang masuk ke dalam pelabuhan atau daerah pabean di Indonesia oleh direktorat jendral bea dan cukai.

b. Tahun 2017:

Gambar 4

Diagram Jumlah Transaksi/Kegiatan Impor TPT Tahun 2017

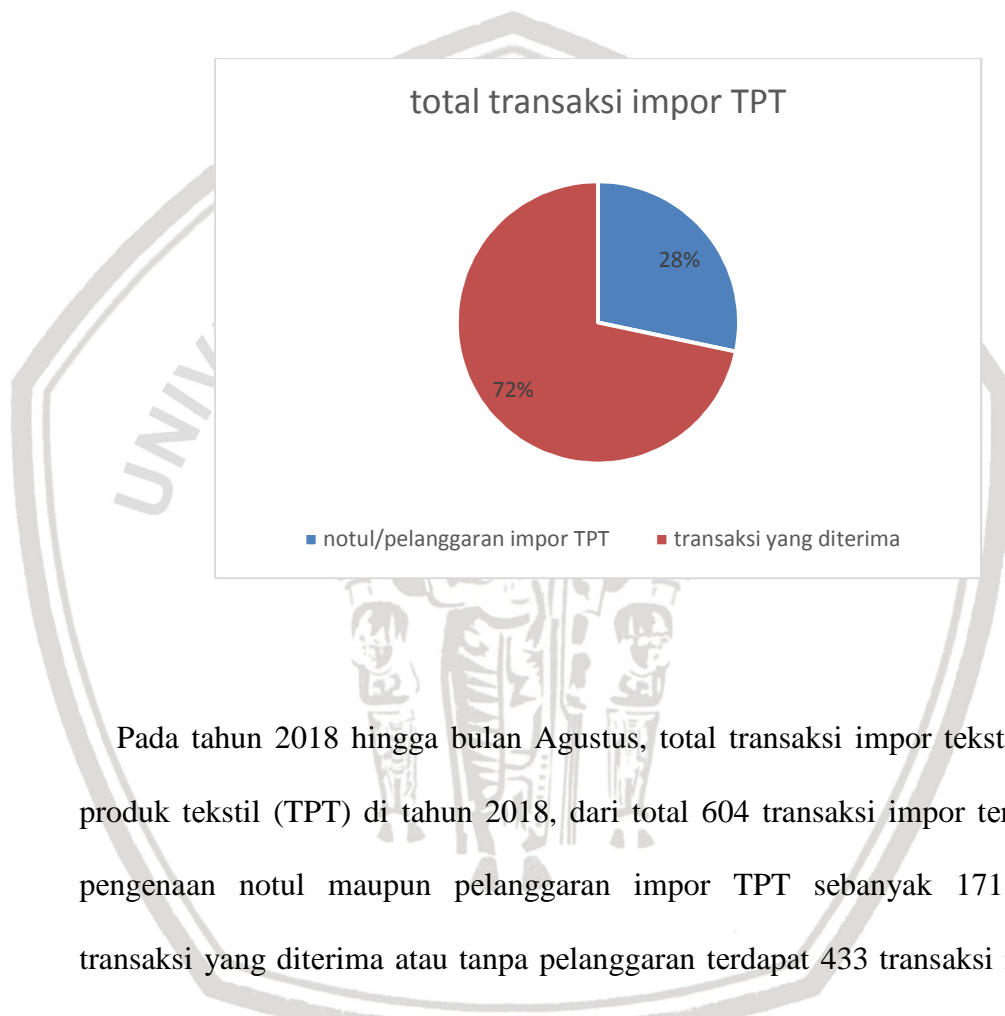


Pada tahun 2017 total transaksi impor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada sepanjang tahun 2017 dari total 667 transaksi impor TPT, terdapat pengenaan notul maupun pelanggaran impor TPT sebanyak 224, dan transaksi yang diterima atau tanpa pelanggaran terdapat 433 transaksi impor yang masuk di seluruh pelabuhan atau daerah pabean lainnya di Indonesia oleh direktorat jendral bea dan cukai.

c. Tahun 2018 sampai dengan Agustus 2018:

Gambar 5

Diagram Jumlah Transaksi/Kegiatan Impor TPT Tahun 2018



Pada tahun 2018 hingga bulan Agustus, total transaksi impor tekstil dan produk tekstil (TPT) di tahun 2018, dari total 604 transaksi impor terdapat pengenaan notul maupun pelanggaran impor TPT sebanyak 171, dan transaksi yang diterima atau tanpa pelanggaran terdapat 433 transaksi impor yang masuk ke dalam pelabuhan atau daerah pabean lainnya di Indonesia oleh direktorat jendral bea dan cukai.

B. Tahapan Penelitian Untuk Penentuan Nilai Pabean

1. Penerapan *Self Assessment System*

1.1 Tata Cara Penerapan⁷

Dasar utama penetapan nilai pabean adalah nilai transaksi barang impor bersangkutan. Nilai transaksi ini adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar atas barang impor tersebut ketika barang itu diekspor dari negara pengekspor ke negara pengimpor. Harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar di atas harus terlebih dahulu disesuaikan dengan beberapa elemen tertentu yang antara lain berupa komisi atau jasa perantara. Biaya pengepakan dan pengemas, *assist*, royalti, *proceeds*, *freight* dan biaya asuransi. Namun harus diingat bahwa disamping terdapat elemen elemen yang harus ditambahkan terdapat juga elemen elemen yang tidak boleh ada dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar tersebut. Elemen elemen tersebut antara lain adalah biaya konstruksi atau pembangunan setelah impor dilaksanakan, Biaya transportasi setelah impor serta bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dipungut di negara pengekspor. Berkaitan dengan hal hal di atas, merupakan hal yang logis apabila kita berkesimpulan bahwa dalam suatu transaksi impor, pembeli barang merupakan pihak yang paling mengetahui elemen elemen apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut atau apa saja yang terkandung dalam harga yang sebenarnya di bayar atau yang seharusnya dibayar.

Dengan asumsi seperti itu, maka seorang importir dibebankan langsung tanggung jawab untuk melakukan sendiri penghitungan nilai pabean atas

⁷ ASEAN CUSTOMS VALUATION GUIDE PETUNJUK PENETAPAN NILAI PABEAN, cetakan pertama hal 25.

transaksi impornya dan memberitahukan besarnya nilai pabean tersebut berdasarkan informasi yang diperolehnya dari penjual.

Sistem *self assessment* pada prinsipnya merupakan suatu bentuk fasilitas yang diberikan oleh bea dan cukai dimana importir atau pembeli dipercaya untuk menghitung sendiri besarnya bea masuk dan pajak pada setiap impor yang mereka lakukan. Diharapkan dengan demikian importir mampu memperkirakan bea masuk dan pajak yang harus mereka bayar sebelum mereka menyerahkan pemberitahuan barang kepada bea dan cukai. Penerapan sistem *self assessment* ini sangat kondusif terhadap usaha untuk menciptakan praktik perdagangan yang sehat. Negara negara anggota ASEAN harus menerapkan prinsip ini agar mampu sejajar dengan praktik praktik perdagangan internasional.

1.2 Penerapan di lapangan

Agar masyarakat usaha mendapatkan manfaat yang maksimal dari ketentuan dan fasilitas yang diberikan oleh *WTO Valuation Agreement*, maka sistem *self assessment* harus di terapkan. Adapun pada pelaksanaan di lapangan, terdapat 2 pendekatan yang mungkin terjadi, yaitu :

- a. Importir melakukan sendiri penghitungan atas nilai pabean barang impornya dan melakukan pembayaran atas bea masuk dan pajaknya sebelum dokumen impor diserahkan, atau:
- b. Importir melakukan penghitungan sendiri seperti halnya butir a tetapi pembayaran bea masuk dan pajaknya baru dilakukan setelah bea dan cukai melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas dokumen impornya,

memeriksa kebenaran klasifikasi tarif, dan persyaratan persyaratan lainnya yang terkait dalam prosedur impor

Pada katategori pertama (a), bea dan cukai membebankan kepada importir tanggung jawab untuk mengikuti aturan dan peraturan dan importir secara sukarela membayar kewajiban bea masuk dan pajaknya sebelum dokumen impor diserahkan. Jadi pada kasus seperti ini bea masuk dan pajak dibayarkan sebelum bea dan cukai melakukan penelitian mendalam dan memberikan keputusannya (konfirmasi) atas impor barang tersebut. Importir bertanggung jawab untuk menghitung jumlah dari bea masuk dan pajak terhutang. Untuk bisa melakukan hal ini maka importir dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan impor termasuk peraturan tentang nilai pabean. Untuk itu maka semua aturan dan peraturan yang terkait dengan impor harus tersedia dan mudah di akses oleh masyarakat usaha. Dengan ini pula, maka fungsi bea dan cukai memastikan di patuhinya peraturan peraturan tersebut

Pada kategori kedua (b), pembayaran bea masuk dan pajak dilakukan setelah konfirmasi dari bea dan cukai diterima. Dalam kategori ini, pada tingkat penyelesaian barang, tingkat akurasi jumlah bea masuk dan pajak yang terkumpul dapat lebih terjamin.

1.3 Tanggung Jawab Importir

Untuk mendapat manfaat yang maksimal dari sistem self-assesement maka pabean dan importir harus membangun rasa saling memahami, saling percaya, dan kerjasama yang erat. Importir harus menyadari rasa tanggung jawabnya untuk menghitung nilai pabean, bea masuk, dan pajak yang

terhutang dengan dasar peraturan nasional yang berlaku atas impor barang termasuk peraturan nilai pabean.

Untuk membantu bea dan cukai menentukan nilai pabean maka importir harus menyiapkan hal hal sebagai berikut :

- a. Memberikan semua informasi, dokumen, dan deklarasi yang dibutuhkan untuk verifikasi dan penentuan nilai pabean.
- b. Menyediakan data yang obyektif dan terukur tentang bagaimana pembeli/importir atau agennya sampai kepada nilai pabean mereka yang dideklarasikan, elemen elemen yang membentuk nilai pabeannya dan informasi lain yang dibutuhkan oleh bea dan cukai yang berkaitan dengan transaksi dan/atau impor barang yang bersangkutan.

Kunci utama kesuksesan penerapan sistem *self assesement* adalah bea dan cukai yang menggantungkan diri pada keterbukaan dan kejujuran importir, yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan nilai pabean, untuk mendeklarasikan nilai pabean mereka yang sebenarnya dengan dasar data yang obyektif dan terukur. Dan setelah itu pabean harus membantu dengan melakukan pengawasan bea dan cukai yang baik.

1.4 Kewajiban Bea dan Cukai

Penerapan sistem *self assesement* mengharuskan bea dan cukai untuk mempertimbangkan hal hal berikut :

- a. Harus ada transparansi dalam hal peraturan, sistem,dan prosedur tentang nilai pabean.

- b. Masyarakat usaha harus diberitahu tentang peraturan, sistem dan prosedur tentang nilai pabean dan bahwa mereka harus selalu mempertahankan tingkat kepatuhan mereka terhadap ketentuan ketentuan *WTO Valuation Agreement*.
- c. Harus ada suatu sistem *valuation advice* dan *valuation ruling* agar ada petunjuk resmi yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai bagi importir yang meminta petunjuk secara resmi dalam menentukan nilai pabean barang mereka.
- d. Harus dibangun suatu sistem yang memungkinkan importir untuk melakukan perubahan atas pemberitahuan impor mereka, dalam kurun waktu tertentu, tanpa dikenai sanksi atas pemberitahuan mereka sebelumnya yang salah yang telah diberikan kepada bea dan cukai
- e. Harus dibangun suatu sistem pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan importir yang sedikit mungkin menginvensi kelancaran arus barang.

2. Database Nilai Pabean

Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya. Penggunaan database nilai pabean digunakan untuk menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor⁸.

⁸ Pasal 22 huruf (f) PMK160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

2.1 Database Nilai Pabean I dan Database Nilai Pabean II

Database Nilai Pabean digunakan sebagai parameter dalam kegiatan pengujian kewajaran untuk menilai potensi risiko (*risk assessment tool*). Terkait kebenaran dan keakuratan pemberitahuan nilai pabean. Penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian database nilai pabean dilakukan oleh direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk. Database nilai pabean berlaku sejak tanggal awal berlaku yang tertera dalam sistem aplikasi database nilai pabean.⁹

Sebagai dasar penentuan uji kewajaran database nilai pabean terdapat 2 macam database nilai pabean yaitu database nilai pabean I dan database nilai pabean II. Perbedaan database berikut hanya berada pada sumber data, berikut penjelasan masing masing database nilai pabean:¹⁰

a. Database Nilai Pabean I

Sumber data untuk database nilai pabean I berasal dari database nilai pabean II, Pemberitahuan pabean impor yang telah ditentukan nilai pabeannya berdasarkan nilai transaksi, Data pada Laporan Hasil Audit yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi, Data pada Surat Keputusan Keberatan yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi, dan katalog, brosur, atau informasi lainnya yang berasal dari dalam dan luar daerah pabean yang telah dilakukan proses penghitungan kembali.

b. Database Nilai Pabean II

⁹ Pasal 25 PMK 34/PMK04/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk..

¹⁰ Pasal 24 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.



UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

Gambar 6

The flowchart illustrates the Customs Value Fairness Assessment Tool (CVFAT) process, which is divided into three main phases:

- Phase 1: Examination Requirements on Transaction Value** (Blue dashed box): This phase starts with the 'Importation Declaration (PIB)' and 'Initial Declaration of Customs Value (DNP)'. It includes decision points for 'Sale?', 'Restriction?', 'Requirement / Consideration?', 'Proceeds?', 'Can be calculated?', 'Inter-related?', and 'Influences price?'. If any of these conditions are met (Yes), the process moves to the 'Transaction Value' box. If not, it proceeds to Phase 2.
- Phase 2: Value Fairness Assessment Tool using Customs Value Database (DBNP)** (Green dashed box): This phase involves checking the 'Customs Value Database I (DBNP I)' and 'Customs Value Database II (DBNP II)'. A 'Fairness test?' is conducted. If the result is 'Fair', it moves to the 'Transaction Value' box. If 'Not Fair', it proceeds to Phase 3. If 'None', it moves to the 'Transaction Value of Identical Goods up to Repetition Method (Fallback)'. If 'None/Not Fair', it proceeds to Phase 3.
- Phase 3: Consultation Process** (Red dashed box): This phase includes 'Profile Analysis?' and 'Medium /High /Very High Risk'. If 'Profile Analysis?' is 'Low Risk IU', it leads to 'Audit & P2' and then to the 'Transaction Value' box. If 'Medium /High /Very High Risk', it leads to 'Customs Value Information (INP)'. 'INP' leads to 'Declaration of Customs Value (DNP)?'. If 'Accepted', it moves to the 'Transaction Value' box. If 'Not Accepted', it leads to 'Consultation?'. 'Consultation?' leads to 'Refunded Guarantee / Restitution' if 'Rejected' or back to 'Declaration of Customs Value (DNP)?' if 'Accepted'. 'Declaration of Customs Value (DNP)?' also leads to 'Objection?'. 'Objection?' leads to 'Decision on Objection?'. 'Decision on Objection?' leads to 'Refunded Guarantee / Restitution' if 'Rejected' or back to 'Declaration of Customs Value (DNP)?' if 'Accepted'. 'Objection?' also leads to 'Customs and Tax Payment Slip (SSPCP)' if 'No'.

The final output of the process is the 'Transaction Value', which is then used to generate the 'Customs and Tax Payment Slip (SSPCP)'.

REMARKS		
Phase 1: Examination Requirements on Transaction Value	Phase 2: Value Fairness Assessment Tool using Customs Value Database (DBNP)	Phase 3: Consultation Process

Pengujian kewajaran digunakan untuk menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor. Dengan dilakukan cara membandingkan harga barang yang diberitahukan pada

pemberitahuan pabean impor dengan harga barang identik pada database nilai pabean I.¹¹

Dalam hal tidak ditemukan data pembanding barang identik dalam database nilai pabean I, maka pejabat bea dan cukai melakukan pengujian kewajaran dengan data pembanding barang identik dalam database nilai pabean II.¹²

Nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dikategorikan:

a. Wajar

Nilai pabean yang bersangkutan dikatakan wajar apabila dalam penelitian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan:

- lebih rendah dibawah 5% (lima persen).
- lebih rendah sebesar 5% (lima persen).
- sama, atau.
- lebih besar.

Dari harga barang identik pada database nilai pabean. Apabila nilai pabean wajar, maka Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.

b. Tidak wajar,

¹¹ Pasal 26 PMK 34/PMK04/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

¹² Pasal 27 PMK 34/PMK04/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

Nilai pabean yang bersangkutan dikatakan tidak wajar apabila penelitian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari harga barang identik pada database nilai pabean. Dan pejabat bea dan cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan dan menginformasikan ke unit penindakan dan penyidikan Kantor Pabean untuk importir umum kategori risiko rendah, atau menerbitkan INP untuk importir kategori risiko sedang, importir kategori risiko tinggi atau importir kategori risiko sangat tinggi.

4. Informasi Nilai Pabean dan Deklarasi Nilai Pabean¹³

Penerbitan informasi nilai pabean (INP) dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam hal apabila hasil Pengujian Kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan tidak wajar dan tidak ditemukan data pembanding sesuai dengan penjelasan pada bagian 3 di atas. Atas penerbitan INP yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, pihak importir wajib menyerahkan deklarasi nilai pabean (DNP) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP, dan wajib menyerahkan semua informasi, dokumen, atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean.

Pihak Importir dapat menyampaikan DNP dan dokumen pendukung tanpa diterbitkannya INP oleh pejabat bea dan cukai, yang diserahkan bersama sama pada saat penyampaian *hardcopy* pemberitahuan pabean impor. Dan

¹³ Pasal 28 PMK 34/PMK04/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

dalam hal hasil penelitian yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai menunjukan:

a. Wajar

Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan pernyataan yang diserahkan oleh Importir menunjukkan bahwa nilai transaksi dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.

b. Tidak Wajar

Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat di yakini kebenaran dan keakuratannya, pejabat bea dan cukai:

- Menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya, atau.
- Melakukan Konsultasi kepada Importir yang bersangkutan atau kuasanya.

5. Konsultasi

Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Konsultasi kepada Importir atau kuasanya apabila nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat di yakini kebenaran dan keakuratannya berdasarkan hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir.

Konsultasi hanya dilakukan terhadap importir kategori risiko menengah atau importir kategori risiko tinggi. Pembatasan kategori importir ini dilakukan dalam rangka bimbingan kepatuhan dan manajemen risiko.

Dalam rangka konsultasi pejabat bea dan cukai menerbitkan Surat Pemberitahuan Konsultasi Nilai Pabean (SPKNP) kepada importir atau kuasanya yang disampaikan melalui media elektronik atau media lainnya.¹⁴

Dalam rangka konsultasi importir atau kuasanya memberikan penjelasan secara lisan terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Dalam hal hasil konsultasi yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai menunjukkan:¹⁵

- a. Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi dapat di yakini kebenaran dan keakuratannya, serta di dukung oleh bukti nyata atau data yang objektif, dan terukur, pejabat bea dan cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.
- b. Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat di yakini kebenaran dan keakuratannya, pejabat bea dan cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai nomor P38/BC/2010 Tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean.

¹⁵ Pasal 28A PMK 34/PMK04/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

6. Penetapan Nilai Pabean

Terdapat 6 (enam) metode khusus yang dilakukan oleh bea dan cukai dalam melakukan penetapan nilai pabean, yaitu:

- a. Metode I Nilai Transaksi.
- b. Metode II Nilai Barang Identik.
- c. Metode III Nilai Barang Serupa.
- d. Metode IV Deduksi.
- e. Metode V Komputasi.
- f. Metode VI Penggulangan (*fallback*).

Penetapan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dapat dilakukan setelah melakukan penghitungan dan penentuan nilai pabean yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar yang dilakukan berdasarkan 6 metode di atas.

Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor hanya dilakukan dalam hal tarif atau nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif atau nilai pabean barang yang sebenarnya, sehingga:¹⁶

- a. bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi, atau.

¹⁶ Pasal 2 Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor Per18/BC/2016 Tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean dan/atau Tarif.

- b. bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.

Dalam setiap penetapan pejabat bea dan cukai mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) untuk penetapan nilai pabean dan pejabat bea dan cukai mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) untuk penetapan tarif.

7. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

7.1 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Dokumen Pelengkap Pabean

Untuk dapat mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara (TPS) dengan tujuan diimpor untuk dipakai, importir wajib menyampaikan:¹⁷

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- b. Dokumen Pelengkap Pabean.

PIB dibuat oleh importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar dan disampaikan ke Kantor Pabean setiap pengeluaran barang dengan tujuan diimpor untuk dipakai. Penyampaian PIB untuk setiap dapat dilakukan sebelum atau setelah pengangkut menyampaikan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya (BC 1.1).

Dokumen Pelengkap Pabean (*Invoice, Packing List, Bill of Loading/Airway Bill*) yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana

¹⁷ Pasal 3 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

disampaikan ke Kantor Pabean oleh Importir sebagai lampiran PIB dalam hal:¹⁸

- a. Diperlukan dalam rangka penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean tidak dapat disampaikan melalui Portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- b. Dilakukan penelitian oleh Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen sebelum pengeluaran barang, dan.
- c. Dilakukan pemeriksaan fisik.

PIB dan dokumen pelengkap kepabeanan dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik atau pertukaran data elektronik (PDE) atau *Electronic Data Interchange System* (EDI system) maupun tulisan di atas formulir atau cetakan (*hardcopy*).

Apabila ada kesalahan dalam pengisian data PIB importir dapat melakukan perubahan atas kesalahan data PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean. Kesalahan data sebagaimana dimaksud yaitu kesalahan karena kekhilafan nyata yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean impor dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung

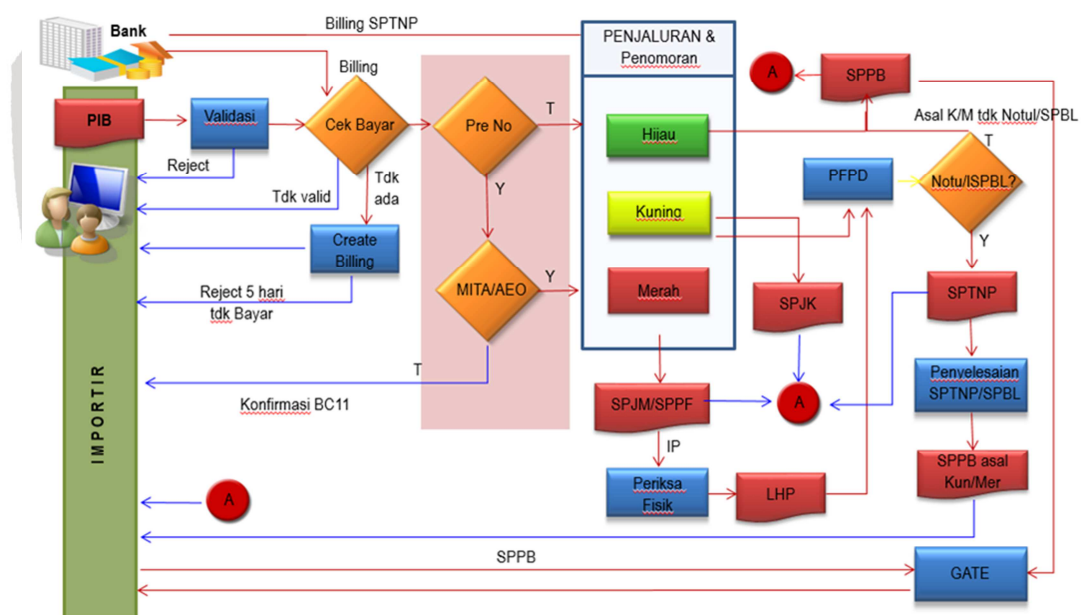
¹⁸ Pasal 6 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

perbedaan pendapat antara pejabat dengan importir atau PPJK yang diberikan kuasa, antara lain:¹⁹

- Kesalahan penulisan data Importir
- Kesalahan perhitungan bea masuk atau pajak; atau
- Kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan
- peraturan.

Gambar 7

Prosedur Importasi Umum



7.2 Pembayaran Bea Masuk, dan PDRI

Berdasarkan PIB yang telah diajukan, Sistem Komputer Kepabeanan (SKP) atau Pejabat menerbitkan kode billing untuk pembayaran, atau Nota Permintaan Jaminan (NPJ) untuk penyerahan jaminan. Pembayaran bea

¹⁹Pasal 12 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

masuk dan pembayaran dalam rangka impor (PDRI) dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:²⁰

a. Pembayaran tunai, dan.

Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas Impor dengan pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilunasi paling lambat pada saat PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a atau Pasal 3 ayat (3) mendapatkan nomor pendaftaran.

b. Pembayaran berkala

Pembayaran berkala diberikan atas impor barang yang dilakukan oleh *Authorized Economic Operator*(AEO) atau Mitra Utama Kepabeanan yang merupakan importir produsen. Bea masuk, cukai, dan PDRI atas Impor dengan pembayaran berkala wajib dilunasi paling lambat pada setiap akhir bulan setelah bulan pendaftaran PIB.

7.3 Klasifikasi dan Pembebanan Barang Impor

Tarif barang Impor untuk penghitungan bea masuk dan PDRI berpedoman pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean.²¹

7.4 Barang Larangan atau Pembatasan

Barang Impor yang dilarang atau dibatasi hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat

²⁰Pasal 13 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

²¹ Pasal 17 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

penimbunan sementara (TPS), setelah persyaratan yang diwajibkan oleh instansi terkait dipenuhi. Importir harus memberitahukan barang Impor yang dilarang atau dibatasi sebagai barang larangan, atau pembatasan dan status pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasannya dalam PIB. Penelitian pemenuhan persyaratan yang diatur oleh instansi terkait dilakukan dengan manajemen risiko berdasarkan PIB yang disampaikan oleh Importir.²²

Dalam hal penelitian tidak dapat dilakukan atau PIB disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir, penelitian pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan secara administratif dilakukan oleh Pejabat yang menangani penelitian larangan dan pembatasan. Dalam hal berdasarkan penelitian administratif terdapat ketentuan larangan atau pembatasan belum terpenuhi, Importir menyampaikan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dengan melakukan perubahan data PIB. Penelitian larangan dan pembatasan ini diteliti berdasarkan data INSW yang diperoleh oleh pejabat bea dan cukai.

7.5 Pendaftaran

Terhadap PIB yang telah memenuhi syarat formal diberikan nomor pendaftaran. Syarat formal ini meliputi:²³

- a. Telah dilakukan pembayaran bea masuk, pelunasan cukai, pembayaran PDRI, dan/atau diserahkan jaminan.
- b. Berdasarkan PIB, ketentuan larangan dan/atau pembatasan terpenuhi, dan.

²² Pasal 19 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

²³ Pasal 22 butir(2) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

c. Barang Impor:

- Telah ditimbun di TPS atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem TPS Online
- Telah mendapatkan nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean mengenai barang yang diangkutnya (BC 1.1) dalam hal Kantor Pabean belum menerapkan sistem TPS Online.

7.6 Pemeriksaan Pabean

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang.²⁴

Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif terhadap barang Impor yang diberitahukan dalam PIB. Pemeriksaan pabean sebagaimana meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.²⁵

Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif ditetapkan jalur pengeluaran barang Impor. Jalur pengeluaran barang Impor sebagaimana dimaksud, yaitu:²⁶

a. Jalur Merah.

²⁴ Penjelasan pasal 3 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

²⁵ Pasal 23 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

²⁶ Pasal 24 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

- Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean (*port*) dengan melakukan pemeriksaan fisik barang, dan pemeriksaan dokumen sebelum penerbitan SPPB.
- b. Jalur Kuning, dan.
 - Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (*port*) tanpa pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.
- c. Jalur Hijau.
 - Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (*port*) tanpa pemeriksaan fisik barang, namun tetap dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB. Jalur Hijau ditetapkan jika Importir atau importasi yang tidak termasuk dalam kriteria jalur kuning dan merah.

Penetapan jalur pengeluaran barang Impor dilakukan berdasarkan:

- a. Profil atas Operator Ekonomi.
- b. Profil komoditi.
- c. Pemberitahuan pabean.
- d. Metode acak, dan.
- e. Informasi intelijen.

Operator Ekonomi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Importir
- b. PPJK
- c. Pengangkut

- d. Pengusaha TPS; dan/atau
- e. Pihak lainnya yang terkait dengan pergerakan barang Impor dalam fungsi rantai pasokan global, seperti penyelenggara pos dan eksportir di luar negeri.

Dalam hal penetapan jalur pengeluaran karena ada informasi intelijen diperoleh setelah penetapan jalur, unit pengawasan dapat menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dan dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor yang bersangkutan.

7.7 Penelitian Tarif dan Nilai Pabean

Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk dan PDRI adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Nilai Pabean sebagaimana dihitung berdasarkan *Cost Insurance Freight* (CIF). Dalam hal Nilai Pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, nilai pabean ditentukan secara hierarki berdasarkan:²⁷

- a. nilai transaksi barang identik.
- b. nilai transaksi barang serupa
- c. metode deduksi
- d. metode komputasi, atau
- e. tata cara yang wajar dan konsisten.

Terhadap PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap tarif dan nilai pabean yang

²⁷ Pasal 15 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

diberitahukan. penelitian diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB.²⁸

Dalam hal hasil penelitian mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau PDRI, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan/atau Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).²⁹

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang Impor belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, pejabat bea dan cukai menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL).³⁰

Terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) yang terbit atas PIB yang ditetapkan Jalur Merah atau Jalur Kuning, Pejabat atau SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) setelah ketentuan larangan dan/atau pembatasan terpenuhi dan:³¹

- a. Importir melunasi kekurangan bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- b. Importir menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan, atau.
- c. Importir melakukan penyesuaian jaminan dalam hal mendapatkan penundaan bea masuk, cukai, dan PDRI.

²⁸ Pasal 31 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

²⁹ Pasal 32 butir (1) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

³⁰ Pasal 32 butir (2) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

³¹ Ibid.

Dalam hal Impor barang dilakukan oleh Importir berisiko rendah, Pejabat atau SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) bersamaan dengan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sepanjang ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah terpenuhi.

Setelah terpenuhi persyaratan persyaratan di atas pejabat bea dan cukai dan sistem SKP menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Dan importir bisa mengambil barang impor di tempat penimbunan sementara (TPS) di dalam daerah pabean.

C. Ketentuan Penetapan Nilai Pabean³²

1. Metode I: nilai transaksi

1.1 Definisi

Pasal 1 *WTO Valuation Agreement*³³ menyatakan bahwa metode pertama dan utama dalam menentukan nilai pabean adalah nilai transaksi barang impor bersangkutan. Nilai transaksi ini adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang bersangkutan ketika barang itu dijual untuk diekspor ke negara pengimpor. Untuk memperoleh nilai transaksi, harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tersebut perlu disesuaikan dengan biaya atau pengeluaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 *WTO Valuation Agreement*.

³² ASEAN CUSTOMS VALUATION GUIDE PETUNJUK PENETAPAN NILAI PABEAN, cetakan pertama, Op.cit .hal 53.

³³Article 1 *WTO Valuation Agreement* "The customs value of imported goods shall be the transaction value, that is the price actually paid or payable for the goods when sold for export to the country of importation adjusted in accordance with the provisions of Article 8".

Selanjutnya Nilai Transaksi adalah nilai yang seharusnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk di ekspor ke dalam daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar³⁴.

1.2 Barang Impor yang bersangkutan

Pasal 1 *WTO Valuation Agreement* hanya berurusan dengan barang impor bersangkutan. Pasal 1 ini sama sekali tidak mengkaitkannya dengan barang lain, baik itu barang identik maupun barang sejenis. Oleh karena itu, nilai transaksi sesuai dengan pasal 1 adalah nilai transaksi barang impor yang bersangkutan atau barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tersebut.

1.3 Penjualan

Nilai transaksi barang impor didasarkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar atas barang tersebut ketika barang itu dijual. Oleh karena itu harus ada penjualan yang terjadi sebelum barang tersebut diimpor. Jika tidak ada penjualan maka ketentuan tentang nilai transaksi seperti disebutkan dalam pasal 1 tidak dapat berlaku. Dengan kata lain penjualan disini adalah sebagai dasar dari penentuan nilai transaksi.

Definisi dari penjualan yang dimaksud disini adalah kegiatan komersial tertentu yang memenuhi ketentuan dan kondisi kondisi tertentu pula. Sebagai

³⁴ Pasal 5 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

referensi bagi negara negara anggota ASEAN ada *Advisory Opinion 1.1*³⁵ yang mengatur tentang definisi penjualan menyatakan bahwa penjualan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Suatu kegiatan komersial yang melibatkan penjual dan pembeli
- b. Pembeli setuju untuk mendapatkan barang barang tertentu
- c. Terdapat persetujuan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut pada suatu waktu tertentu dan dengan harga tertentu perhitungan lainnya.
- d. Akan ada kompensasi atas pengalihan kepemilikan tadi dan penyerahan barang tersebut.
- e. Kedua belah pihak menyetujui kegiatan komersial tersebut.

Dalam kaitanya dengan definisi penjualan di atas, maka yang berikut ini adalah barang yang dapat dikategorikan sebagai bukan suatu penjualan:

- a. Barang yang dikirim dengan cuma cuma, misalnya suatu hadiah, barang contoh, barang promosi
- b. Barang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok
- c. Barang yang diimpor oleh perantara yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan
- d. Barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri

³⁵ *Advisory Opinion 1.1 "the concept of "sale" in the agreement".*

- e. Barang yang disewa dan barang tersebut tetap merupakan hak dari pengirim
- f. Barang sisa (misalnya limbah) yang diimpor untuk dimusnahkan di negara pengimpor dimana pengirim membayar importir untuk jasa itu.

1.4 Pedoman dalam menentukan suatu barang merupakan hasil penjualan atau bukan

Identifikasi untuk mengetahui apakah suatu impor barang merupakan penjualan atau tidak dapat dilakukan dengan meneliti *invoice* dari barang impor tersebut. Informasi yang bisa didapatkan dari *invoice* tersebut antara lain adalah:

- a. *Invoice* telah diserahkan dan barangnya telah dikirimkan
- b. Ada harga yang disebutkan demikian pula ketentuan kontrak penjualannya (misalnya *ex work*, FOB, C&F, atau CIF)
- c. Ada ketentuan yang disebutkan tentang metode pembayarannya (misalnya batas waktu pembayaran, *letter of credit*, pembayaran di muka, dan tingkat bunga)
- d. Informasi tentang diskon (jika ada)
- e. Jika ada keterangan yang menyebutkan bahwa “nilai pabean yang tercantum adalah untuk maksud maksud kepabeanan saja (*value for customs purpose only*)” atau “untuk maksud maksud kepabeanan saja (*customs purpose*)” maka dapat dipastikan bahwa impor barang tersebut bukan merupakan penjualan.

1.5 Dijual untuk diekspor ke negara pengimpor (Daerah Pabean)³⁶

Penjualan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi, harus merupakan penjualan untuk di ekspor ke dalam daerah pabean. Penjualan di pasaran dalam negeri negara pengeksport atau penjualan untuk ekspor negara ketiga, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi yang bersangkutan.

Apabila terdapat lebih dari satu penjualan untuk di ekspor ke dalam daerah pabean, maka untuk kepentingan penetapan nilai pabean digunakan penjualan yang secara langsung paling menyebabkan terjadinya ekspor barang ke dalam daerah pabean.

Fakta bahwa suatu barang telah di impor dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada bea dan cukai untuk ditentukan nilai pabeannya merupakan suatu dasar untuk menetapkan bahwa telah terjadi ekspor atas barang tersebut. Hanya transaksi yang melibatkan pengalihan barang secara internasional yang dapat digunakan dalam penentuan nilai pabean dengan metode nilai transaksi.

Apabila barang impor bukan merupakan dari suatu penjualan, berarti tidak terdapat nilai transaksi sehingga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya berdasarkan nilai transaksi.

Contoh barang impor yang bukan merupakan suatu obyek transaksi jual beli atas penjualan, yaitu:

³⁶ Lampiran I PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

- a. Barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok
- b. Barang yang dikirim dengan Cuma Cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (*free of charge*)
- c. Barang yang diimpor oleh *intermediary* yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan
- d. Barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri.
- e. Barang yang disewa (*leasing contract*)
- f. Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya ditangan pengirim barang.

1.6 Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar

Harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar (*price actually paid*) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada kantor pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang seharusnya dibayar (*payable*) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.

Setelah penjualan untuk ekspor ke negara pengimpor dilakukan maka harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dapat segera ditentukan. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan keseluruhan pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan, oleh pembeli kepada penjual atau oleh pembeli kepada pihak ketiga demu

memenuhi kewajiban dari pembeli, sebagai persyaratan dilakukannya penjualan suatu barang impor.

Istilah “dibayar” berarti bahwa harga yang telah dibayar akan digunakan sebagai dasar perhitungan nilai pabean jika pembayaran telah dilakukan pada saat impor dilakukan. Sementara istilah “yang seharusnya dibayar” berarti bahwa penyelesaian atas harga barang belum dilakukan pada saat impor dilakukan (impor dengan kredit).³⁷

1.6.1 Contoh Harga Yang Seharusnya Di Bayar (*payable*)³⁸

Pada invoice disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal invoice. Pemberitahuan pabean impor diserahkan. Kepada kantor pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal invoice. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal invoice. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan nilai pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah *payable*.

1.6.2 Bentuk Pembayaran

Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer

³⁷ ASEAN CUSTOMS VALUATION GUIDE PETUNJUK PENETAPAN NILAI PABEAN, cetakan pertama, Op.cit. hal 54.

³⁸ Lampiran I PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

uang³⁹. Pembayaran juga dapat dilakukan secara tidak langsung misalnya dengan cara penerbitan *letter of credit* atau cara lain yang disetujui misalnya saham atau *bond* atau pengalihan *bill of lading* yang dipertukarkan (*negotiable bill of lading*). Berikut ini merupakan faktor faktor yang akan mempengaruhi penentuan nilai pabean.

1.6.3 Pembayaran Langsung atau Tidak Langsung⁴⁰

Pembayaran yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

a. Pembayaran tidak langsung

Pembayaran atas barang impor dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari pembayaran tidak langsung adalah pengurangan atas harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar karena adanya pembayaran hutang yang dimiliki oleh penjual kepada pembeli atau oleh penjual kepada pihak ketiga.⁴¹

b. Pembayaran di muka (Tidak Langsung)

Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau kepada pihak ketiga sebagai suatu persyaratan yang diminta oleh penjual juga merupakan bagian dari nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.

³⁹Ibid.

⁴⁰ Pasal 5 huruf (d), “nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan (*proceeds*)”

⁴¹ ASEAN CUSTOMS VALUATION GUIDE PETUNJUK PENETAPAN NILAI PABEAN, cetakan pertama, Op.cit. hal 56.

Contoh: adalah ketika importir (A) membeli suatu barang dari pembuat dan penjual barang (B) dengan harga CIF USD 100.000. untuk membantu B, A memberikan bantuan keuangan. Untuk itu, A mentransfer uang sejumlah USD 25.000 ke B. Jumlah ini akan diperhitungkan sebagai suatu pembayaran di muka atas pembelian barang di atas. Walaupun pembayaran di muka adalah untuk barang yang dipesan namun kadangkala pembayaran di muka ini tidak akan muncul di invoice di mana mungkin yang muncul mungkin hanya jumlahnya yaitu USD 75.000. Namun demikian pembayaran di muka sebesar USD 25.000 itu merupakan bagian dari harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk transaksi barang itu. Pada saat penyelesaian pembayaran atas barang impor itu, maka A akan membayar USD 75.000.⁴²

1.6.4 Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, tidak meliputi:

a. Kegiatan yang dilakukan pembeli untuk kepentingannya sendiri⁴³

Kegiatan yang dilakukan pembeli untuk kepentingannya sendiri selain dari kegiatan yang jatuh dalam kategori yang dapat disesuaikan berdasarkan pasal 5 butir (5) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk⁴⁴, tidak akan dianggap

⁴² Ibid hal 57.

⁴³ ibid

⁴⁴ pasal 5 butir (5) PMK 160/04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk

“Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi:

(a) biaya yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri

(b) biaya-biaya yang secara tegas dapat dibedakan dari harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar yang terjadi setelah

sebagai pembayaran tidak langsung walaupun mungkin kegiatan itu akan menguntungkan penjual. Biaya dari kegiatan tersebut tidak akan ditambahkan ke harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ketika dilakukan penentuan nilai pabean. Kegiatan seperti antara lain adalah:

1. Melakukan studi dan riset pasar
2. Mengiklankan merek dari barang itu ketika dijual nantinya
3. Mempersiapkan ruang pameran
4. Mengikuti pameran dagang
5. Melakukan tes atau uji coba atas barang itu
6. Biaya untuk pembukaan L/C.

b. Biaya yang timbul setelah pengimporan barang⁴⁵

Beberapa biaya yang timbul setelah impor tidak menjadi bagian dari nilai pabean sepanjang biaya biaya tersebut dapat dipisahkan dari harga barang impornya. Biaya tersebut termasuk antara lain:

1. Biaya konstruksi, pembangunan, prakitan, pemeliharaan, atau bantuan teknik yang dilakukan setelah pengimporan.
2. Biaya pengangkutan, asuransi dan atau biaya lainnya setelah pengimporan
3. Bea masuk, cukai dan pungutan lainnya dalam rangka impor.

pengimporan barang

(c) Bunga; dan/atau

(d) Dividen.

⁴⁵ Ibid hal 58.

Interpretative Notes pasal 1⁴⁶ antara lain menyatakan bahwa nilai pabean tidak akan mencakup biaya untuk pemeliharaan dari industrial plant, mesin atau peralatan yang dilakukan atas barang impor setelah impor dilakukan asalkan biaya biaya di atas dapat dipisahkan dari harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor tersebut. Satu pertanyaan yang muncul adalah apakah istilah “pemeliharaan” di sini juga mencakup “garansi”.

Untuk menjawab masalah ini *Explanatory Note 6.1* mendefinisikan istilah “pemeliharaan” diatas sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk memastikan fasilitas atau fasilitas terkait berfungsi baik. Sebaliknya istilah “garansi” merupakan bentuk jaminan atas barang yang mencakup biaya untuk memperbaiki kerusakan atau penggantian. Oleh karena itu istilah “pemeliharaan” tidak dapat diterapkan untuk garansi. Biaya garansi akan dianggap sebagai bagian dari harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dan merupakan bagian dari nilai pabean.

c. Bunga (*Interest Charge*)

⁴⁶ *Intrepretative Notes article 1* “The customs value shall not include the following charges or costs, provided that they are distinguished from the price actually paid or payable for the imported goods:

- (a) charges for construction, erection, assembly, maintenance or technical assistance, undertaken after importation on imported goods such as industrial plant, machinery or equipment,
- (b) the cost of transport after importation,
- (c) duties and taxes of the country of importation.

Bunga yang dibebankan penjual kepada pembeli terhadap pembayaran atas pembelian barang impor, bukan merupakan bagian dari nilai pabean sepanjang:⁴⁷

- a. Nilai bunga secara nyata tertera dalam dokumen pelengkap pabean (*invoice, purchase order*) di luar harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar, dan
- b. Kesepakatan pengaturan pembayaran (*financing arrangement*), termasuk ketentuan tentang bunga harus dibuat secara tertulis.

Apabila diperlukan pembeli harus menunjukkan bahwa:

- a. Barang yang bersangkutan benar benar dibeli sesuai dengan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar, dan.
- b. Tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga yang berlaku pada umumnya berlaku, di Negara penjual atau pembeli tergantung pada kesepakatan transaksi barang impor yang bersangkutan.

d. Deviden

Deviden adalah pembagian keuntungan yang berkaitan dengan seluruh bisnis dari perusahaan dan tidak hanya berkaitan dengan penjualan barang impor yang diimpor. Deviden atau pembayaran lainnya oleh pembeli kepada penjual yang tidak berkaitan dengan barang impor, tidak termasuk kedalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.⁴⁸

⁴⁷ Lampiran I PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

⁴⁸ Lampiran I PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

1.7 Diskon (Potongan)

Harus di catat bahwa nilai transaksi akan ikut memperhitungkan segala jenis diskon yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Contoh dari jenis jenis diskon yang ada dijelaskan oleh pasal 5 butir (6)PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, yaitu:

1. Diskon tunai (*cash discount*)⁴⁹

Diskon tunai ini mungkin akan berlaku setelah impor dilakukan. *Advisory opinion 5.3* secara singkat menyebutkan bahwa apabila terdapat diskon tunai namun pembayaran atas barang impor belum dilakukan pada saat impor dilakukan maka jumlah yang akan dibayarkan oleh importir dapat merupakan dasar untuk menentukan nilai transaksi (bea dan cukai mungkin memerlukan pernyataan dari importir tentang jumlah yang harus dibayar sesuai dengan pasal 13, dan hal ini dapat menghambat penentuan akhir nilai pabeannya dan pabean harus melakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan pasal 17.

2. Diskon karena jumlah yang dibeli (*quantity discount*)⁵⁰

Diskon karena jumlah barang yang dibeli adalah pengurangan dari harga dengan didasarkan pada jumlah barang yang dibeli. *Advisory Opinion 15.1*⁵¹ menyatakan bahwa yang menjadi fokus perhatian disini adalah jumlah yang menentukan harga per unit dari barang tersebut.

⁴⁹ Ibid hal 59.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Advisory opinion 15.1 “*treatment of quantity discount*”.

Penjual mungkin akan memberikan diskon ini sesuai dengan mekanisme yang baku dengan dasar jumlah barang yang dibeli.

3. Diskon karena perbedaan tingkat perdagangan (*trade discount*)⁵²

Diskon jenis ini mungkin akan diberikan dengan dasar status dari pembeli apakah pembeli itu di tingkat *wholeseller*, *retail*, ataukah *end user*. Diskon seperti ini merupakan hal yang lumrah dan penjual telah memperhitungkan bahwa biaya penjualannya akan menurun ketika penjualan dilakukan di tingkat penjualan tertentu. Contoh disini adalah seorang pembeli *wholeseller* yang biasanya bersedia mengeluarkan biaya promosi dan biaya penjualan lainnya atas nama penjual dengan pertimbangan bahwa ia akan mendapatkan harga diskon dari barang yang akan ia beli.

4. *Loyalty discount*⁵³ adalah potongan diskon yang diberikan atas kesetiaan pembeli dalam melakukan pembelian terhadap penjual/kesetiaan.

Contoh dari jenis jenis diskon lainnya adanya diskon yang diberikan karena adanya promosi, diskon cuci gudang, diskon tutup toko, diskon karena adanya pembayaran di muka, diskon kepada agen, diskon barang contoh, diskon atas barang model lama, diskon atas barang model baru dan diskon musiman.

Namun demikian bea dan cukai harus berhati hati karena ada hal hal tertentu yang akan di katakan sebagai diskon tetapi sebenarnya merupakan kegiatan bisnis lain. Contohnya disini adalah *offset discount* yang diberikan

⁵² Ibid.

⁵³ Lampiran I PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean untuk perhitungan bea masuk.

untuk mengkompensasi *claim* yang pernah diajukan sebelumnya atau karena adanya kerusakan terhadap barang impor lain. Diskon disini bukanlah diskon yang sebenarnya diberikan atas barang yang bersangkutan.

Pada umumnya, penjual memberikan diskon kepada pembeli sebab penjual akan mendapatkan pengurangan biaya karena kondisi penjualan tertentu yang akan terjadi. Misalnya penjualan dalam jumlah banyak dapat berarti pengurangan biaya pemrosesan atau pembuatan dan promosi bagi penjualnya. Disini penjual mengalihkan sebagian biaya yang berkurang tadi yang berkurang tadi kepada penjual.

Advisory 15.1 menyatakan bahwa diskon atau rabat yang berlaku mundur pada umumnya tidak dapat diterima dalam urusan kepabeanan karena diskon seperti ini tidak diberikan secara khusus kepada barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya tetapi memperhitungkan juga barang barang yang telah dibeli sebelumnya.

Selanjutnya untuk perhitungan nilai transaksi, harga barang yang bersangkutan setelah dikurangi diskon tersebut (*net price*) adalah harga barang yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.

1.8 Biaya Yang Harus Ditambahkan Pada Harga Yang Sebenarnya Dibayar atau Yang Seharusnya Dibayar (Penyesuaian berdasarkan pasal 8 WTO *Valuation Agreement*)⁵⁴

Nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yang disesuaikan dengan penambahan elemen biaya

⁵⁴ Ibid hal 73.

tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 5 butir (3) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean. Pembahasan ini tergantung kepada fakta penjualan dan transaksi yang bersangkutan dan harus ditangani secara khusus per kasus. Penyesuaian terhadap harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar harus dilakukan hanya jika:

- a. Penjualan atau transaksi melibatkan biaya atau pengeluaran dari elemen elemen tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.
- b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar belum termasuk biaya atas elemen elemen itu
- c. Biaya atau pengeluaran itu ditanggung oleh pembeli; dan
- d. Terdapat data yang obyektif dan terukur sebagai dasar perhitungannya.

Penambahan elemen elemen biaya ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berdasarkan pasal 5 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu penambahan yang wajib dan pilihan.

Penambahan yang wajib adalah penambahan yang harus dilakukan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar agar diperbolehkan nilai pabean, yaitu penambahan berupa elemen:

- a. Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian

Yang dimaksud dengan komisi dan jasa perantara⁵⁵:

- Komisi adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak atas jasanya mewakili penjual atau pembeli dalam suatu transaksi
 - Jasa perantara adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) yang bertugas mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu transaksi
 - Komisi pembelian adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang mewakili pembeli (*buying agent*) dalam suatu transaksi
- b. Biaya pengemas dan pengepakan
 - c. *Assists*
 - d. Royalti dan biaya lisensi
 - e. *Proceeds* dari penggunaan atau penjualan berikutnya.

Penjelasan atau masing masing elemen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komisi dan jasa perantara⁵⁶

Komisi merupakan sebuah bentuk pertimbangan keuangan yang biasanya dibayarkan kepada perantara (*intermediary*) dalam sebuah transaksi. Secara umum, seorang agen merupakan seseorang atau sebuah perusahaan yang membeli dan menjual barang untuk kepentingan pembeli atau penjual. Agen ini berperan dalam proses penyelesaian kontrak dan bisa mewakili penjual ataupun pembeli. Seorang agen yang bekerja untuk penjual biasa disebut agen

⁵⁵ Lampiran I PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk

⁵⁶ Ibid hal 73.

penjualan sementara seorang agen yang bekerja untuk kepentingan pembeli biasa disebut agen pembelian.

Komisi yang dibayarkan oleh pembeli kepada seorang agen penjualan harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sesuai dengan pasal 8. Namun demikian pembelian tidak boleh ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Istilah “komisi penjualan” didefinisikan dalam *interpretative Notes* dari pasal 8 sebagai “biaya yang dibayarkan oleh importir kepada agennya untuk jasanya mewakili importir di luar negeri dalam usaha membeli barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya”..

Broker/makelar dalam istilah yang dipakai di banyak negara untuk menggambarkan pembayaran yang dilakukan kepada seorang agen maupun untuk menunjuk agen itu sendiri yang membantu importir dalam penyelesaian barang. Gaji atau upah yang didapatkan oleh *broker*/makelar yang bekerja sebagai penghubung dalam suatu transaksi harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dan merupakan bagian dari nilai pabean.

Apabila seorang *broker*/makelar dibayar oleh penjual, maka pembayaran tersebut biasanya sudah dimasukan kedalam harga invoice barang. Yang penting untuk diingat adalah bahwa segala pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang belum dimasukan dalam harga barang harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharus dibayar kecuali pembayaran itu jelas jelas dikecualikan seperti dalam ketentuan pasal 8.1 (a) (i) (misalnya komisi pembelian).

Faktor kunci dalam masalah komisi dan jasa perantara ini adalah peran yang sebenarnya dimainkan oleh perantara dalam sebuah transaksi. Peran ini akan menentukan keputusan yang akan diambil apakah pembayaran yang dilakukan kepada mereka harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ataukah tidak. Persoalan apakah seorang itu agen pembelian atau agen penjualan sebenarnya bukan persoalan utama.

b. Biaya Pengemas dan pengepakan⁵⁷

Biaya pengemasan yang untuk kepentingan pabean pengemasan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan yang meliputi upah tenaga kerja dan nilai material pengemasan harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Dalam konteks ini, biasanya pengemasan tidak merujuk pada biaya kontainer besar, pallets, drums, atau alat lainnya yang dipakai dalam pengiriman. Barang perdagangan internasional. Biaya atau pengeluaran kontainer seperti itu sebagai alat transportasi akan dicakup dalam elemen penyesuaian lainnya (pilihan) yaitu dalam pasal 8.2 WTO *Valuation Agreement*⁵⁸. Contoh dari alat pengemas seperti itu adalah:

1. Kotak atau karton pengemas bagian dalam (pengemas untuk penjualan retail: kantung, tas, kotak karton).
2. Kotak atau karton pengemas bagian luar (pengemas untuk tujuan ekspor: krat kayu, kotak besi).

⁵⁷ Ibid hal 74.

⁵⁸ Article 8.2 "in framing its legislation, each member shall provide for the inclusion in or the exclusion from the customs value, in whole part".

3. Bahan baku pembungkus: plastik, gelembung, kertas yang telah dihancurkan, dan sebagainya.

c. *Assist*⁵⁹

Assist adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli dengan cuma cuma atau dengan harga yang diturunkan. Untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang bersangkutan, sepanjang nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Berikut contoh jenis barang *Assist* sebagai berikut:

- a. Material, komponen, bagian dari barang barang sejenis yang terkandung dalam barang impor.
 - Material: kayu, baja dalam lembaran, plastik, kain tekstil
 - Komponen: sakelar pemutus arus, kapasitor, engsel pintu
- b. Peralatan, cetakan, dan barang barang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor
 - Peralatan : mesin jahit, mesin penggulung benang, alat pertukangan
 - Komponen: sakelar pemutus arus, kapasitor, engsel pintu
- c. Material yang digunakan/dikonsumsi dalam pembuatan barang impor; dan/atau
 - Zat kimia sebagai katalisator
 - Bahan bakar minyak untuk pengujian kendaraan

⁵⁹ Ibid hal 75.

d. Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan dan sketsa yang dilakukan dimana saja di luar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli.

- Teknik: *production engineering, technical and engineering study of the project*
- Pengembangan: meliputi kegiatan *conceptional formulating, testing product alternatives, dan construction of prototypes*
- Karya seni: *architectural drawings*
- Desain: *blueprints*
- Perencanaan perencanaan : *plans for furnace system* Sketsa: *sketches for the construction of tanks*

1. Nilai barang dan jasa yang diidentifikasi di atas memiliki persyaratan yang sama yaitu:

- a. Nilai barang dan jasa tersebut akan ditambahkan hanya jika komponen ini belum dimasukan dalam harga yang sebenarnya dibayar, atau yang seharusnya dibayar.
- b. Nilai barang dan jasa tersebut harus dipasok oleh pembeli secara cuma cuma ataupun dengan harga yang diturunkan.
- c. Nilai barang dan jasa tersebut harus dipasok oleh pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Pemasokan nilai barang dan jasa tersebut adalah untuk kepentingan produksi dan/atau penjualan untuk ekspor barang impor bersangkutan, dan.

- e. Penambahan harus dilakukan dengan dasar data yang obyektif dan terukur.

2. Nilai *Assist*⁶⁰

Langkah pertama yang harus diambil apabila terdapat impor yang melibatkan unsur *assist* adalah menentukan apakah *assist* tersebut dipasok secara cuma cuma atau dengan harga yang diturunkan. Pabean harus memastikan hal tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan apakah *assist* tersebut harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ataukah tidak. Jika *assist* tersebut harus ditambahkan maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai dari *assist* tersebut. Untuk itu elemen elemen dibawah ini harus dipertimbangkan:

a. Nilai *assist* untuk semua kategori:

1. Apabila *assist* dipasok secara cuma cuma oleh pembeli kepada penjual maka semua nilai *assist* harus ditambahkan
2. Apabila *assist* dipasok dengan harga yang diturunkan maka nilai *assist* yang harus ditambahkan adalah sama dengan total nilai *assist* dikurangi pembayaran yang dilakukan penjual
3. Apabila *assist* didapatkan dari penjual yang tidak berhubungan dengan importir maka nilai *assist* adalah biaya untuk mendapatkan nilai *assist* tersebut
4. Apabila *assist* diproduksi oleh importir atau seseorang yang berhubungan dengan importir atau dijika *assist* dibeli dari sumber yang

⁶⁰ Ibid.

berhubungan maka nilai *assist* adalah biaya untuk memproduksi nilai *assist* tersebut.

5. Nilai *assist* dari segala kategori juga harus mencakup biaya transportasi ke tempat pembuatan, biaya yang berkaitan dengan penyelesaian ekspor dan impor, dan bea masuk serta pajak yang tidak dimintakan pengembaliannya.
- b. Nilai *assist* kategori 2 (peralatan, cetakan dan barang barang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor):
 1. Apabila *assist* telah digunakan sebelumnya, biaya mula mula untuk mendapatkan atau memproduksinya harus disesuaikan secara menurun agar didapat gambaran penggunaan tersebut
 2. Apabila *assist* tersebut disewa, nilai *assist* adalah biaya sewa tersebut
 3. Apabila *assist* telah diperbaiki atau dimodifikasi maka nilainya harus menggambarkan biaya perbaikan atau modifikasi tersebut.
 4. Apabila *assist* dalam kategori ini berisi teknik, pengembangan atau karya seni tersebut harus dimasukan dalam biaya mendapatkan atau memproduksinya.
- c. Nilai *assist* kategori 3 (teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan dan sketsa) yang dilakukan di tempat lain selain negara pengimpor:
 1. Apabila *assist* dibeli atau disewakan oleh pembeli maka nilai *assist* adalah biaya pembelian atau sewa tersebut
 2. Apabila *assist* dapat ditemukan di masyarakat umum maka nilai *assist* adalah biaya untuk mendapatkannya.

3. Apabila suatu *design center* berada diluar negara pengimpor dan terdapat catatan yang secara jelas menghubungkan biaya yang dikeluarkan oleh *design center* itu atas produk produk tertentu maka biaya tersebut harus dapat ditambahkan secara langsung.
 4. Apabila suatu *design center* terletak diluar negara pengimpor dan biaya yang dikeluarkannya dianggap sebagai pengeluaran *overhead* umum tanpa ada alokasi yang menghubungkan ke produk produk tertentu, pembagian dapat dilakukan dengan biaya keseluruhan total produksi yang diterima dari *design center* itu dan pembagian berikutnya dapat dilakukan juga terhadap produk produk khusus lainnya.
 5. Apabila produksi melibatkan banyak negara dan waktu, maka pembagian harus dibatasi hanya terhadap nilai yang benar benar ditambahkan kepada elemen yang berada di luar negara pengimpor.
3. Penentuan besarnya nilai *assist* dan cara penghitungan *assist*⁶¹

Segera setelah nilai *assist* diketahui, maka harus ditentukan berapa besar bagian/porsi (*apportion*) nilai *assist* tersebut terhadap produk impor. Contoh metode untuk menentukan besarnya porsi *assist* ini dapat ditemukan dalam catatan pasal 8, paragraf 1 (b) (ii) dari *WTO Valuation Agreement*. Penentuan besarnya bagian *assist* dapat dibuat sesuai dengan keinginan atau preferensi importir, dengan catatan bahwa hal tersebut konsisten dengan prinsip prinsip umum akuntansi (GAAP) dan terdapat dokumen dokumen untuk mendukungnya.

⁶¹ Ibid hal 77.

a. Cara penghitungan *assist*⁶²

1. Dalam menghitung *assist*, biaya transportasi (*freight*) dari tempat pengiriman *assist* ke penjual di luar negeri ditambahkan pada *assist* tersebut
2. Apabila *assist* di pasok dengan cuma cuma kepada penjual, maka *assist* yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar adalah jumlah semua nilai tersebut
3. Apabila *assist* dipasok dengan harga yang diturunkan, maka *assist* yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar adalah selisih antara jumlah semua *assist* dengan harga yang dibayar penjual.
4. Besarnya *assist* ditentukan sebagai berikut:
 - Sebesar biaya untuk memproduksinya apabila diproduksi oleh pembeli sendiri atau pihak yang berhubungan dengan pembeli
 - Sebesar harga pembelian, dalam hal dibeli oleh pembeli
 - Sebesar biaya sewa, dalam hal sewa oleh pembeli
 - Harga pembelian atau biaya untuk memproduksi atau memperolehnya yang disesuaikan (*depresiasi*) sesuai dengan waktu penggunaan tersebut, dalam hal *assist* yang bersangkutan sebelumnya telah digunakan oleh pembeli untuk memproduksi barang lain
 - Meliputi biaya perbaikan atau modifikasi, dalam hal *assist* tersebut diperbaiki atau dimodifikasi

⁶² Lampiran I PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

5. Untuk *assist* yang berasal dari daerah pabean, penghitungannya berpedoman antara lain pada dokumen ekspor barang
- b. Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan untuk penghitungan bea masuk barang impor yang mengandung *assist* berupa barang dan jasa yang berasal dari daerah pabean dilakukan sebagai berikut:

- Bea masuk yang harus dibayar adalah:

$$BM = 1 - \frac{NA}{NT}$$

Keterangan:

BM = Bea Masuk Barang Impor yang mengandung *assist*

NA = *assist*

NT = nilai transaksi barang impor yang mengandung *assist*.

d. Royalti dan biaya lisensi⁶³

Interpretative Notes dari pasal 8 paragraf 1 (c)⁶⁴ menyatakan bahwa istilah “royalti” dan “biaya lisensi” yang tercantum dalam pasal 8.1 (c) mencakup antara lain “pembayaran yang berkaitan dengan paten, merk, dan hak cipta”. Royalti dan biaya lisensi harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dengan syarat:

1. Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung.
 - Kepada siapa royalti dibayarkan tidak relevan, yang penting adalah bahwa pembeli diwajibkan membayar royalti
2. Merupakan persyaratan penjualan barang impor

⁶³ Ibid hal 78.

⁶⁴ Article 8.1(c) “royalties and licence fees related to the goods being valued that the buyer must pay, either directly or indirectly, as a condition of sale of the goods being valued, to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable”.

- a. Dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskan membayar royalti dan lisensi atau biaya lisensi. Tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalti ditujukan kepada penjual atau pihak lain (*royalty holder* atau kuasanya) yang sama sekali tidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan.
 - b. Yang dimaksud dengan persyaratan penjualan adalah adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar royalti dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka kontrak/perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
3. Berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya:
- Pada barang impor yang bersangkutan terdapat hak atas kekayaan intelektual (HAKI), antara lain berupa hak atas merek, hak cipta, hak paten (di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenkan).
4. Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Interpretative Notes pasal 8.1 (c)⁶⁵ memberikan pedoman tambahan yang berkaitan dengan tata cara memperlakukan royalti dari lisensi ini:

- a. Royalti dari lisensi mungkin akan mencakup pembayaran yang berkaitan dengan paten, merk, dan hak cipta

⁶⁵*Interpretative notes 8.1(c) 1. " The royalties and licence fees referred to in paragraph 1(c) of Article 8 may include, among other things, payments in respect to patents, trade marks and copyrights. However, the charges for the right to reproduce the imported goods in the country of importation shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods in determining the customs value. " 2. " Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods if such payments are not a condition of the sale for export to the country of importation of the imported goods".*

- b. Pembayaran terhadap “hak untuk memproduksi ulang (*right to reproduce*)” barang impor di negara pengimpor tidak boleh ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar
- c. Pembayaran oleh pembeli terhadap “hak untuk mendistribusikan” atau menjual kembali barang impor tidak boleh ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dengan catatan pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan barang

Berkaitan dengan arti dari istilah “hak untuk memproduksi ulang” *Interpretative Notes* menyatakan bahwa “biaya pengeluaran terhadap hak untuk memproduksi ulang barang impor di negara pengimpor tidak boleh ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor pada saat menentukan nilai pabean”.

Istilah “hak untuk memproduksi ulang” tidak hanya merujuk kepada produksi ulang suatu barang impor secara fisik (misalnya suatu barang contoh diimpor dan cetakan (*mould*) atas barang impor tadi dibuat oleh importir yang akan digunakan dalam membuat barang impor tadi) tetapi juga mencakup produksi ulang atas ciptaan, hasil karya, pemikiran atau ide yang terdapat dalam barang impor. Contoh yang bisa diberikan disini misalnya sebuah museum mengimpor hasil seni patung dan kemudian membuat miniatur patung tersebut untuk dijual (produksi ulang hasil ciptaan), atau selebar transparansi yang memuat gambar sebuah karakter kartun yang kemudian digunakan untuk membuat kartu ucapan selamat (produksi ulang ide). Hak

untuk memproduksi ulang ini juga mencakup hasil kerja ilmiah baik yang asli maupun tiruan atau salinannya (misalnya suatu model mobil baru yang dibuat miniaturnya dan kemudian diproduksi ulang), atau *prototipe*/purwarupa (suatu *prototype* suatu mainan baru untuk di produksi masal).

Sementara itu istilah “hak atas reproduksi ulang” dapat ditelaah dengan pedoman analisa terhadap elemen elemen berikut ini:

1. Apakah ide atau ciptaan asli terdapat dalam barang impor
2. Apakah hak untuk memproduksi ulang atas suatu ide atau ciptaan merupakan masalah *reserved right*
3. Apakah hak atas reproduksi ulang telah diberikan kepada pembeli dalam kontrak atau penjualan atau melalui perjanjian lain yang terpisah.
4. Apakah pemegang *reserved right* meminta bayaran tertentu atas diberikannya hak atas reproduksi.

Berpindahnya hak milik atas suatu barang yang memiliki *reserved right* biasanya tidak secara langsung berarti berpindahnya juga kepemilikan atas hak untuk memproduksi ulang barang tersebut. Dalam banyak kasus, hak tersebut didapatkan melalui suatu perjanjian tertentu. Jadi sebagai kesimpulan, tiap tiap situasi yang melibatkan hak atas produksi ulang harus dipertimbangkan secara kasus per kasus.

1. Penentuan Nilai Royalti dan Lisensi⁶⁶

- a. Apabila pembeli tidak dapat memberikan perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak

⁶⁶ Lampiran I PMK 160/PMK04/2010 Tentang Penentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk

dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli mendeklarasikan untuk melakukan *voluntary payment*.

- b. Pada waktu pengajuan pemberitahuan impor, pembeli dapat memperkirakan besarnya royalti dan/atau biaya lisensi yang akan dibayarkan kepada penjual. Perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi impor barang bersangkutan. Perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut dihitung berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur.
- c. Namun untuk kepastian dan keakuratan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan.

e. *Proceeds*⁶⁷

Proceeds adalah nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Penambahan nilai *proceeds* ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ini tidak memerlukan adanya ketentuan tertulis di dalam kontrak yang menyatakan bahwa *proceeds* adalah “persyaratan atas penjualan”. Asalkan pembeli melakukan pembayaran tambahan *proceeds*

⁶⁷ Ibid hal 79.

kepada penjual, maka jumlah pembayaran itu harus ditambahkan kedalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Proceeds harus dipisahkan dari aliran deviden. *Proceeds* merupakan pembayaran yang langsung terkait dengan penjualan kembali barang impor sementara deviden merupakan pembayaran yang terkait dengan keseluruhan keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan.

Pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor, pembeli dapat memperkirakan besarnya nilai *proceeds* yang akan dibayarkan kepada penjual. Perkiraan nilai *proceeds* yang akan dibayarkan kepada penjual. Perkiraan nilai *proceeds* ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Perkiraan nilai *proceeds* tersebut dihitung berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur.

Masalah yang timbul adalah bahwa pembeli tidak dapat memperkirakan nilai *proceeds* tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli mendeklarasikan untuk melakukan *voluntary payment*.

Kepastian dan keakuratan besarnya nilai *proceeds* hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan.

f. Biaya transportasi, biaya pemuatan, pembongkaran, penanganan dan biaya asuransi⁶⁸

Biaya biaya seperti biaya transportasi, pemuatan, pembongkaran, penanganan dan biaya asuransi merupakan elemen elemen yang harus diperhatikan. Elemen elemen ini mungkin harus ditambahkan atau justru dikurangkan dari nilai pabean elemen elemen ini adalah sebagai berikut:

1. Biaya transportasi barang impor ke pelabuhan atau tempat impor
 - Yang dimaksud dengan biaya transportasi (*freight*) adalah biaya transportasi barang impor ke tempat impor di daerah pabean, yaitu biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan, seperti B/L, atau AWB (jika pengangkutan melalui jalur udara) dari barang yang bersangkutan.
 - Dalam hal biaya transportasi belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean ditentukan dengan cara sebagaimana di atur dalam pasal 20 PMK ini, yaitu: 5% dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari ASEAN, 10% dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari asia non ASEAN, dan 15% dari nilai FOB untuk barang yang berasal selain dari ASEAN, dan asia non ASEAN.
2. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang terkait dengan transportasi barang impor ke pelabuhan atau tempat impor

⁶⁸ Ibid hal 80.

- Yang dimaksud dengan biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan (*landing charges*) yang belum termasuk biaya transportasi adalah segala biaya yang berkaitan dengan pengangkutan barang ketempat impor di daerah pabean yang belum termasuk dalam biaya transportasi (*freight*).
- Biaya tersebut antara lain berupa biaya pemuatan, pembongkaran penyimpanan atau pergudangan, transit, dan penanganan barang impor (*handling charges*) yang timbul sejak barang diangkut ketempat impor di daerah pabean.

3. Biaya asuransi untuk transportasi barang impor.

Biaya asuransi adalah biaya penjaminan transportasi barang dari tempat ekspor diluar negeri ke tempat impor di daerah pabean. Biaya biaya yang mencakup biaya untuk memindahkan barang secara fisik ke tempat tujuan. Biaya tersebut misalnya mencakup biaya *trucking* (*inland freight*, *rail freight*, *ocean freight*, *air freight* dan biaya *barge* atau *lighterage* dan pos).

Pengeluaran untuk pemuatan, pembongkaran dan penanganan barang dapat dihubungkan dengan berbagai kegiatan. Pemuatan dan pembongkaran misalnya dapat mencakup kegiatan memindahkan barang ke atau dari alat angkut (*conveyance*). Sementara penanganan barang mencakup berbagai kegiatan di sekitar pemindahan fisik barang sebagai misal penyiapan manifest, B/L, atau AWB, mendapatkan lisensi ekspor, dan penanganan pengapalan. Semua pengeluaran ini harus dihubungkan dengan komponen transportasi barang.

Kata “asuransi” yang terdapat dalam pasal 5 butir (3) huruf (g) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, berarti pengeluaran pengeluaran untuk asuransi barang selama pengangkutan (transportasi), pemuatan, pembongkaran, dan penanganan. PMK 160/04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk tersebut menyatakan bahwa kata “asuransi” harus diartikan sedemikian rupa sehingga merujuk hanya kepada biaya asuransi barang selama kegiatan yang disebutkan dalam pasal 5 butir (a) dan (b) PMK tersebut. Dalam hal biaya asuransi belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yang digunakan adalah 0.5% dari nilai *cost and freight* (CFR)⁶⁹.

Harus diperhatikan juga hal hal tentang pengeluaran atas kegiatan penumpukan (penyimpanan) barang yang terkait dengan transportasi barang impor, Biaya penimbunan, dalam kaitannya dengan pasal 8.2 harus dibedakan antara:

- a. Yang tidak bersamaan dengan pengiriman barang, dan.
- b. Yang bersamaan dengan pengiriman barang.

Apabila penimbunan tidak dilakukan bersamaan dengan pengiriman barang maka biaya tersebut tidak perlu ditambahkan kepada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar seperti yang dimaksud dengan pasal 5 butir (3) huruf (e), (f), (g) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk. Apabila penimbunan itu

⁶⁹ Pasal 21 (1) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

dilaksanakan bersamaan dengan pengiriman barang maka komponen biaya ini harus ditambahkan kepada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Istilah “penimbunan” ini hanya mengacu pada kegiatan diatas dan tidak mencakup kegiatan seperti pembersihan, pengurutan (*sorting*) atau pengepakan kembali yang dilakukan selama barang ditimbun.

Apabila barang dijual dengan kondisi “*ex pabrik (ex factory)*” maka untuk mendapatkan nilai pabean harga tersebut harus ditambahkan dengan biaya biaya yang dikeluarkan untuk transportasi darat dan laut/udara dari pabrik ke pelabuhan impor di tambah dengan biaya biaya lain yang terkait dengan transportasi (pemuatan, pembongkaran dan penanganan) dari pelabuhan ekspor ke pelabuhan impor serta biaya asuransi.

Gambar 8

Dasar Perhitungan Bea Masuk Yang Berdasarkan *Cost In Freight* (CIF)

Pabrik	FAS	Pemuatan	FOB Expor	Transit Pembongkaran Muatan	Tiba dipelabuhan perbatasan, tempat impor	Pembongkaran	Penanganan	Masuk	Importir
--------	-----	----------	--------------	-----------------------------------	---	--------------	------------	-------	----------

CIF

Apabila harga jual adalah FOB, maka jumlah tersebut harus ditambahkan untuk biaya transportasi darat dan laut/udara dari tempat di ekspor ke tempat impor dan biaya biaya yang berkaitan dengan transportasi barang dan asuransi.

Apabila harga jualnya dalam kondisi CIF maka itu berarti bahwa biaya transportasi dan biaya biaya lain yang berkaitan dengan transportasi serta biaya asuransi sudah termasuk dalam harga CIF tersebut.

1.9 Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk Didasarkan Atas Harga

Penyerahan *Cost Insurance Freight*⁷⁰

Dimana unsur biaya dimaksud dalam angka 1.8 huruf e sampai dengan angka 1.8 huruf f, di atas harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar kecuali apabila dilakukan setelah pengimporan. Perlakuan terhadap pemberitahuan pembeli atas nilai barang dengan terminologi, penyerahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Ex work*
 - a. Pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean
 1. Nilai barang berdasarkan penyerahan *ex work*
 2. Besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya biaya dimaksud dalam biaya transportasi, biaya pemuatan, pembongkaran, penanganan, dan biaya asuransi.
 - b. Bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak berwenang

2. *Free on Board (FOB)*

⁷⁰ Lampiran I PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

- a. Pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean
 1. Nilai barang berdasarkan penyerahan FOB
 2. Besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya biaya dimaksud dalam biaya transportasi, biaya pemuatan, pembongkaran, penanganan, dan biaya asuransi
- b. Bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang
3. *Cost and Freight* (CFR) atau *Cost Insurance and Freight* (CIF)
 - a. Pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean
 1. Nilai barang berdasarkan penyerahan DDP
 2. Besarnya biaya yang dikeluarkan setelah importasi
 - b. Bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang
- c. Dalam hal biaya transportasi, biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan serta biaya asuransi dimaksud dalam biaya transportasi, biaya pembongkaran, penanganan, dan biaya asuransi:
 1. Tidak ada (*free of charge*)
 2. Tidak didukung berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur, maka nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.
- d. Apabila untuk kepentingan penambahan dimaksud tidak tersedia bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan tidak dapat diterapkan sebagai nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.

1.10 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Agar Nilai Transaksi Dapat Diterima dan Ditetapkan Sebagai Nilai Pabean⁷¹

Nilai transaksi hanya akan dapat diterima sebagai nilai pabean barang impor apabila empat persyaratan yang tertera pada pasal 7 PMK160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, seperti disebutkan di bawah ini dapat dipenuhi, yaitu:

- a. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
 1. Diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di negara pengimpor
 2. Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan
 3. Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.
- b. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya.
- c. Tidak terdapat *proceeds* dari penggunaan, pemanfaatan, atau penjualan kembali barang impor yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat disesuaikan dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (c) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

⁷¹ASEAN CUSTOMS VALUATION GUIDE PETUNJUK PENETAPAN NILAI PABEAN, cetakan pertama, Op.cit hal 62

- d. Tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli atau apabila terdapat hubungan antara penjual dan pembeli hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga barang sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir (3) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

Berikut ini merupakan penjelasan atas persyaratan persyaratan di atas, yaitu:

1. Persyaratan pertama “Pembatasan”

Pembatasan dilakukan oleh penjual kepada pembeli untuk membatasi kemungkinan pemanfaatan atau penggunaan barang impor oleh pembeli. Namun demikian, pasal 7 butir (1) huruf (a) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis pembatasan atas penggunaan atau pemanfaat barang impor yang dapat di terima (dapat di anggap sebagai “bukan pembatasan). Tindakan yang “bukan pembatasan” ini mencakup keadaan dimana persyaratan atas pemanfaatan atau penggunaan barang impor itu:

1. Diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di negara pengimpor.
2. Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan.
3. Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

Contoh dari pembatasan yang “diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di negara pengimpor” adalah misalnya ketika suatu barang impor itu di haruskan untuk mendapat lisensi

sebelum dilakukan penjualan (misalnya, jika barang impornya adalah senjata), memenuhi persyaratan label tertentu, menjalani pemeriksaan tertentu sebelum dilepaskan ke pasar dan sebagainya.

Kemudian contoh dari pembatasan yang “membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan” adalah apabila penjual menerapkan pembatasan geografis, misalnya distribusi berdasarkan wilayah, dan penjualan hanya diperbolehkan dilakukan pada suatu wilayah geografis tertentu saja.

Commentary 12.1 telah mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut atas istilah “tidak mempengaruhi harga barang secara substansial” seperti yang dimaksud di atas. Pada dasarnya, faktor faktor di bawah ini harus diperhitungkan ketika harus memutuskan apakah suatu pembatasan itu nyata nyata mempengaruhi harga secara substansial, yaitu:⁷²

- a. Sifat dari pembatasan itu
- b. Sifat dari barang impornya
- c. Sifat dari industri bersangkutan dan praktik perdagangannya
- d. Apakah efek keuangan yang timbul itu cukup signifikan

Contoh dari pembatasan yang tidak menimbulkan pengaruh atas nilai suatu barang adalah:

- a. Seseorang penjual otomotif mengharuskan pembelinya untuk tidak menjual barangnya itu atau memamerkannya sebelum tanggal tertentu yang merupakan tanggal untuk dikeluarkannya model baru

⁷² Ibid.

- b. Keharusan agar penjualan dilakukan dengan cara pintu ke pintu

Disisi sebaliknya, suatu pembatasan yang dapat menimbulkan akibat dari atas nilai dari barang impor adalah suatu hal yang tidak lazim dalam perdagangan barang itu. Contoh dari pembatasan semacam itu adalah ketika suatu mesin yang dijual pada suatu harga nominal tertentu dengan persyaratan kepada pembelinya untuk tidak menjual lagi atau memanfaatkan barang tersebut kecuali untuk maksud maksud kemanusiaan/sumbangan.

2. Persyaratan kedua “persyaratan pertimbangan”⁷³

Persyaratan kedua yang menyebabkan metode nilai transaksi tidak dapat dipakai adalah persyaratan atas penjualan atau harga barang yang mengakibatkan nilai pabean tidak dapat ditentukan, persyaratan ini sesuai dengan pasal 7 huruf (b) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean⁷⁴:

a. Contoh 1:

- Penjual menetapkan suatu harga tertentu atas barang impor dengan persyaratan bahwa pembeli juga harus membeli barang lain dengan jumlah tertentu.

b. Contoh 2:

- Harga suatu barang impor tergantung pada harga barang lain yang dijual oleh pembeli kepada penjual mula mula.

c. Contoh 3:

⁷³ Ibid hal 63.

⁷⁴ Pasal 7 huruf (b) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean “tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya”

- Harga barang ditetapkan dengan dasar jenis pembayaran yang sama sekali tidak bersangkutan dengan barang impornya, misalnya penjual menyediakan barang impor dalam kondisi setengah jadi dan penjual akan mendapatkan pembayaran dalam bentuk barang tersebut yang sudah jadi dalam jumlah tertentu.

Jadi apabila persyaratan itu dapat diidentifikasi dan terkait dengan barang impor, maka penentuan nilai pabean akan di dasarkan pada metode nilai transaksi.

3. Persyaratan ketiga “*proceeds* dari kegiatan selanjutnya”⁷⁵

Metode nilai transaksi dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean sepanjang tidak ada *proceeds* atas penjualan kembali atau penggunaan barang impornya yang harus dikirimkan oleh pembeli kepada penjual yang tidak dapat dihitung ketika menentukan nilai pabeannya.

Jika dari suatu penjualan terdapat *proceeds* atas penjualan kembali barang impor tersebut dan jumlahnya dapat dihitung dan ditambahkan ke harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar maka metode nilai transaksi dapat digunakan.

4. Persyaratan keempat “pihak yang berhubungan”⁷⁶

Dalam hal terjadi pengimporan barang yang berasal dari transaksi antara pihak saling berhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan

⁷⁵ Ibid hal 64.

⁷⁶ Ibid.

Bea Masuk, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga.

1. Definisi pihak yang berhubungan

Pasal 1 butir 3 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan contoh contoh pihak yang berhubungan, yaitu:

1. Pegawai atau direktur di salah satu perusahaan milik penjual atau pembeli.
2. Penjual dan pembeli merupakan rekan kerja dagang
3. Hubungan mereka adalah hubungan antara pegawai dan atasan
4. Salah satu pihak memiliki, mengendalikan atau memiliki 5% atau lebih saham yang beredar di antara mereka.
5. Salah satu mengendalikan pihak lainnya baik langsung maupun tidak langsung.
6. Kedua-duanya dikendalikan oleh pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.
7. Penjual dan pembeli bersama-sama mengendalikan pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.
8. Penjual dan pembeli merupakan anggota keluarga yang sama.

Definisi yang terkait dengan pihak yang berhubungan memiliki kata “kontrol/pengendalian”. Berkaitan dengan ini, *Technical Committee WCO* telah memberikan interpretasinya atas kata tersebut yang dituangkan dalam

Explanatory Note 4.1, pada dasarnya segala situasi yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kontrak selalu menimbulkan adanya semacam pengarahan atau pembatasan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Agar seseorang dapat mengendalikan orang lain maka orang tersebut harus berada dalam posisi yang secara hukum atau praktik dapat memaksakan pengarahan atau pembatasan kepada yang lain. Jadi apabila para pihak ini:⁷⁷

1. Bebas untuk melakukan negosiasi atau menolak melakukan negosiasi
2. Bebas untuk mengadakan kontrak atau menolak suatu kontrak; dan
3. Bebas untuk menghentikan suatu kontrak berdasarkan salah satu cara seperti yang disebutkan dalam kontrak itu atau dengan cara memilih untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut,

Maka kemungkinannya adalah bahwa transaksi itu adalah transaksi antar para pihak yang tidak berhubungan.

Permasalahan pihak yang tidak berhubungan ini memunculkan satu pertanyaan yaitu apakah agen tunggal, distributor tunggal, konsinyir tunggal merupakan pihak yang berhubungan atau tidak. Mereka mungkin akan dianggap sebagai pihak tidak berhubungan jika mereka merupakan salah satu diantara 8 kategori seperti yang telah di sebutkan di atas dalam pasal 1 butir (3) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk. Kemungkinannya adalah bahwa agen tunggal, distributor tunggal dan konsinyir tunggal akan dapat dimasukkan dalam kriteria berikut, yaitu:

⁷⁷ Ibid hal 65.

1. Merupakan pegawai atau direktur dari perusahaan milik penjual atau pembeli
2. Terdapat tukar menukar saham yang memiliki kekuatan voting
3. Merupakan pihak ketiga yang mengontrol penjual dan pembeli
4. Merupakan rekan kerja.

Kantor cabang suatu perusahaan biasanya berhubungan dengan perusahaan induknya. Di banyak negara, kantor cabang ini dianggap sebagai suatu badan hukum yang terpisah. Dalam kasus seperti itu, maka implikasinya adalah bahwa tidak ada penjualan yang terjadi dan tidak ada nilai transaksi. Metode nilai transaksi tidak dapat dipakai untuk menentukan nilai pabean.

Ketika istilah “keluarga yang sama” diinterpretasikan, ketentuan tentang siapa saja yang akan dianggap sebagai anggota keluarga biasanya diserahkan kepada pertimbangan negara masing masing. Yang berikut ini adalah contoh dari pihak yang bisa dianggap sebagai anggota keluarga:⁷⁸

1. Suami dan istri
2. Orang tua dan anak
3. Saudara laki laki dengan saudara perempuan
4. Keluarga tiri
5. Kakek dan cucu
6. Paman dan kemenakan
7. Bibi dan keponakan
8. Ipar
9. Orang tua angkat dan anak angkat.

⁷⁸ Ibid.

1.11 Tata Cara Penelitian Pengaruh Hubungan Antara Penjual dan Pembeli Terhadap Harga Barang⁷⁹

Untuk menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli tersebut mempengaruhi harga maka dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Meneliti hal hal yang berkaitan dengan penjualan.
2. Membandingkan harga barang dengan *test value*.

Penelitian tentang hal hal yang berkaitan dengan penjualan di arahkan kepada dokumen dokumen yang berkaitan dengan transaksi, dalam rangka mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli (importir) mempengaruhi harga perlu penelitian atas:

- a. Semua aspek transaksi/importasi.
 - b. Hal hal yang berkaitan dengan tata cara penjual dan pembeli mengatur hubungan dagangnya (*commercial relations*).
 - c. Bagaimana harga penjualannya tercapai.
1. Bagaimana mengidentifikasi impor yang dilakukan oleh para pihak yang berhubungan⁸⁰

Agar indentifikasi hubungan antara pembeli dan penjual dapat dilakukan dengan efektif maka profil importir/eksportir harus dibuat, dijaga, dan diperbaiki serta didistribusikan ke kantor kantor pelayanan bea dan cukai sehingga dapat diambil tindakan tindakan yang tepat dalam menghadapi impor antar perusahaan yang berhubungan. Yang berikut ini memberikan

⁷⁹ Lampiran III PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

⁸⁰ Ibid hal 66

gambaran praktis bagaimana mengidentifikasi transaksi antar para pihak yang berhubungan.

a. Di tingkat penyelesaian barang

Dalam beberapa kasus tertentu, dokumen yang diserahkan untuk proses penyelesaian barang (dokumen impor, invoice, packing list, B/L atau AWB) akan memberikan informasi yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa transaksi ini melibatkan para pihak yang berhubungan misalnya:

1. Penjual dan pembeli memiliki nama yang sama
2. Pembeli merupakan kantor cabang dari penjual (dalam kasus kantor cabang ini dianggap sebagai badan hukum terpisah)

b. Di Tingkat Audit⁸¹

Audit merupakan cara yang lebih efektif untuk mengetahui hubungan yang ada antara penjual dan pembeli dengan cara meneliti informasi yang berhubungan dengan:

1. Struktur organisasi dari perusahaan pembeli
2. Anggota manajemen perusahaannya
3. Pemegang saham
4. Informasi tentang pendirian perusahaan
5. Sifat dari bisnisnya
6. Informasi rinci tentang penjual dan pemasok
7. Tata cara pembeli melakukan bisnis dengan penjual atau pemasok, dan sebagainya.

⁸¹ Ibid.

2. Penjualan antar pihak yang berhubungan⁸²

Jika pembeli dan penjual memang berhubungan, penolakan terhadap penggunaan nilai transaksi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan fakta itu saja. Jika pembeli dan penjual memang berhubungan, nilai transaksi akan dapat diterima sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga.

Pertanyaan yang timbul disini adalah bagaimana menentukan bahwa suatu hubungan yang ada antara pembeli dan penjual itu mempengaruhi harga atau tidak. Seperti yang sudah disebutkan di atas Penelitian tentang hal hal yang berkaitan dengan penjualan di arahkan kepada dokumen dokumen yang berkaitan dengan transaksi, dalam rangka mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli (importir) mempengaruhi harga perlu penelitian atas:

- a. Semua aspek transaksi/importasi
- b. Hal hal yang berkaitan dengan tata cara penjual dan pembeli mengatur hubungan dagangnya (*commercial relations*)
- c. bagaimana harga penjualannya tercapai.

Penelitian atas hal hal yang berkaitan dengan penjualan dilakukan oleh bea dan cukai dengan kerjasama bersama importir. Sementara itu *test value* akan disediakan oleh importir.

3. Penelitian atas hal hal yang berkaitan dengan penjualan⁸³

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid hal 67.

Hal hal yang berkaitan dengan dengan penjualan harus diteliti dan jika hasilnya menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara pembeli dan penjual tidak mempengaruhi harga maka nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean.

Adanya hubungan antara penjual dan pembeli telah menimbulkan pertanyaan apakah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli telah dipengaruhi oleh hubungan itu. Oleh karena itu, jika memang importir akan menggunakan metode nilai transaksi untuk menghitung nilai pabeannya dan membuat pemberitahuan berdasarkan metode nilai transaksi itu maka importir memiliki keharusan untuk sedapat mungkin menunjukkan bahwa harga yang ada tidak dipengaruhi hubungan dengan penjual.

Jika berdasarkan informasi yang disampaikan tadi atau oleh sebab lain bea dan cukai memiliki alasan untuk beranggapan bahwa harga telah dipengaruhi oleh hubungan itu maka bea dan cukai akan memberitahukan alasan tersebut kepada importir dan importir harus diberi waktu yang cukup untuk menanggapi. Dan jika memang diminta oleh importir maka pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis.

Apabila pabean menemukan impor antara pihak yang berhubungan, tidak berarti bahwa pabean harus memeriksa semua impor tersebut. Suatu transaksi akan diperiksa hanya jika bea dan cukai memiliki alasan untuk meragukan harganya. Dalam beberapa kasus tertentu, bea dan cukai mungkin sudah melakukan pemeriksaan atas transaksi antar pihak yang berhubungan itu atau mungkin saja bea dan cukai telah memiliki informasi yang menunjukkan bahwa hubungan yang ada tidak mempengaruhi harga.

Informasi ini mungkin diberikan oleh importir atau oleh sumber sumber lain. Kemungkinan lain adalah bahwa transaksi atau impor itu telah berlangsung berulang kali dan keaslian atau kemurnian transaksi tersebut memang telah dibuktikan. Dalam kasus seperti ini tidak diperlukan lagi dilakukannya pemeriksaan atas hubungan yang ada itu (kecuali sifat dari hubungan tersebut telah berubah).

Jika bea dan cukai tidak dapat menerima nilai transaksi tanpa melakukan penelitian lebih lanjut, maka importir bersangkutan harus diminta untuk menyediakan data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut didapatkan, maka pabean akan meneliti faktor faktor lain, misalnya:

- a. Bagaimana pembeli dan penjual mengatur hubungan perdagangan mereka, atau.
- b. Bagaimana harga tersebut dicapai.

Untuk menunjukan bahwa tidak ada harga yang dipengaruhi oleh hubungan yang ada, bea dan cukai mempertimbangkan bagaimana harga berhasil disepakati:

- a. Apakah harga dicapai dengan cara cara yang konsisten dengan praktik tawar menawar normal seperti yang di kenal dalam industri itu, atau.
- b. Apakah harga dicapai dengan cara cara yang konsisten dengan cara penjual menyepakati suatu harga dengan pihak lain yang tidak berhubunga, atau.
- c. Apakah harga yang dicapai cukup untuk menutupi semua biaya ditambah dengan keuntungan yang dapat mewakili keuntungan

keseluruhan perusahaan yang dapat diraih sepanjang periode tertentu dalam penjualan barang yang sama dan sejenis.

Jika pertanyaan pertanyaan diatas dapat dipenuhi, maka hal itu bisa jadi merupakan pembuktian bahwa hubungan yang ada tidak mempengaruhi harga.

4. Contoh penelitian atas hal hal yang berkaitan dengan penjualan⁸⁴

Administrasi bea dan cukai suatu negara pengimpor menerima dokumen impor untuk penyelesaian impor suku cadang mobil. Berdasarkan dokumen yang diserahkan itu petugas bea dan cukai menemukan bahwa pembeli adalah distributor tunggal dari penjual (berdasarkan informasi yang didapat pada invoice dan packing list dan daftar profil pihak yang berhubungan yang diberikan oleh unit intelijen). Selanjutnya petugas ini memiliki alasan untuk beranggapan bahwa distributor ini mungkin berhubungan dengan penjual berdasarkan kriteria seperti yang tersebut dalam Pasal 15.4. WTO *Valuation Agreement*.

Karena impor ini melibatkan parah pihak yang berhubungan, maka berdasarkan pasal 1.2 (a) dan pasal 15.4 WTO *Valuation Agreement* bea dan cukai akan melakukan penelitian atas hal hal yang terkait dengan penjualan. Karena tidak semua transaksi antara para pihak yang berhubungan harus diteliti, bea dan cukai akan melakukan penelitian transaksi ini hanya jika bea dan cukai memiliki alasan untuk menentukan harganya.

Untuk mengkonfirmasi apakah nilai yang diberitahukan itu meragukan atau tidak, maka harga yang diberitahukan itu kemudian dibandingkan

⁸⁴ Ibid hal 68.

dengan nilai transaksi yang telah diterima sebelumnya yang berasal dari transaksi parah pihak yang tidak berhubungan (dan database harga barang identik atau serupa). Perbandingan ternyata menunjukkan bahwa harga yang diberitahukan adalah lebih rendah dibawah 5%, atau lebih rendah sebesar 5%, sama atau lebih besar dari harga barang impor serupa yang telah diterima⁸⁵. Hasil perbandingan ini membuat petugas bea dan cukai mulai memiliki keraguan atas harga yang diberitahukan tersebut. Petugas ini kemudian mulai bertanya apakah hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang telah mempengaruhi harga. Misalnya, bisa jadi bahwa memang ada hubungan yang telah mempengaruhi harga atau telah mengurangi harga.

Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah memang terdapat hubungan. Jika memang terdapat hubungan, maka diperlukan penelitian atas hal hal yang terkait dengan penjualan untuk menentukan apakah hubungan ini telah mempengaruhi harga. Karena hal ini kemungkinan akan melibatkan riset yang cukup serius maka biasanya tugas ini akan dilakukan oleh unit verifikasi (PFPD) atau audit. Jadi dalam kaitannya dengan prosedur nilai pabean karena tugas utama dari petugas di unit terdepan adalah untuk menyelesaikan impor barang dan melakukan pemeriksaan administratif maka pemeriksaan materi dalam kasus seperti di atas akan dilakukan setelah proses penyelesaian barang dilakukan (*post entry basis*). Oleh karena itu petugas ini akan menyerahkan kasus ini ke unit verifikasi atau audit.

Pada tahap ini akan ada beberapa kemungkinan bagi bea dan cukai.

Pertama adalah unit verifikasi/audit mungkin akan memutuskan untuk

⁸⁵ Pasal 26 butir (a) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

menerima pemberitahuan itu tanpa melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang sudah ada selama ini berkaitan dengan importir bersangkutan atau importir lain yang melakukan bisnis yang sama. Kemungkinan yang lain adalah bahwa bea dan cukai secara tertulis akan meminta informasi dari importir dengan membuat suatu set kuesioner untuk mendapatkan informasi atau dokumen khusus yang dicari untuk menyelesaikan pemeriksaan audit sederhana (*desk audit*). Kemungkinan selanjutnya adalah bahwa bea dan cukai akan memutuskan bahwa kasus ini relatif penting sehingga akan dikeluarkan perintah untuk mengadakan pemeriksaan penuh terhadap buku atau catatan yang dimiliki importir. Kemungkinan apa yang diambil akan ditentukan berdasarkan pertimbangan untung rugi dengan memperhatikan kepentingan bea dan cukai serta importir bersangkutan.

Perbedaan besar antara audit sederhana (*desk audit*) dengan audit formal atau penuh yang melibatkan kunjungan ke tempat importir adalah pada jenis audit sederhana tidak ada kesempatan bagi bea dan cukai untuk melakukan test verifikasi terhadap informasi yang diberikan importir dalam tanggapan tertulisnya. Berdasarkan pertimbangan ini, dalam kasus di atas pabean memutuskan untuk mengadakan audit formal.

Sebelum tim audit melakukan kunjungan ke tempat importir untuk memeriksa catatan dan bukunya. Mereka akan membuat persiapan persiapan sesuai dengan prosedur audit (untuk ini negara anggota ASEAN harus merujuk pada *Post Clearance Audit Manual*).

Semua buku dan catatan harus diperiksa untuk memastikan bahwa pembeli dan penjual ini memang merupakan pihak yang berhubungan. Ternyata bukti menunjukkan bahwa manajemen dari perusahaan ini khususnya bagian marketing produknya dikendalikan oleh penjual. Dengan menggunakan rujukan pasal 15.4, maka bukti ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli memang merupakan para pihak yang berhubungan (dimana salah satu pihak mengendalikan pihak yang lain baik langsung maupun tidak langsung).

Langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap hal hal yang berkaitan dengan penjualan. Pemeriksaan ini akan terpusat pada informasi yang terkait dengan:

1. Bagaimana pembeli dan penjual mengatur hubungan perdagangan mereka dengan,
2. Bagaimana harga tersebut dicapai.

Karena kasus ini melibatkan impor oleh distributor tunggal maka cara cara penjual menjual barangnya dan kebijakannya terhadap harga juga akan menjadi fokus pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan dari manajer dan pegawai perusahaan serta pemeriksaan terhadap perjanjian kontrak, dokumen negosiasi, konfirmasi dan permintaan (*confirmation order*) dan dokumen dokumen lainnya, hasil pemeriksaan akhir terhadap hal hal yang terkait dengan penjualan menunjukkan hal hal sebagai berikut:

1. Pembeli serta distributor tunggal lain yang ada di luar negeri hanya dapat membeli barang dari penjual.
2. Penjual menjual barangnya (suku cadang mobil) kepada distributor tunggalnya dan juga kepada pembeli independen lainnya.
3. Harga barang didasarkan pada daftar harga (FOB) yang ditentukan oleh penjual kepada semua pembeli (baik pembeli yang merupakan distributor tunggal maupun pembeli independen).
4. Tiap transaksi didasarkan pada *cost and freight* dan pembeli harus membayar biaya asuransinya.
5. Diskon seperti misalnya diskon jumlah disediakan kepada seluruh penjual.
6. Transaksi non-L/C harus dibayarkan dalam kurun waktu 30 hari dari tanggal invoice, dan.
7. Pembeli bebas untuk menentukan sendiri harga jual kembali ke pasar bebas atas barang yang dibeli.

Berdasarkan fakta fakta ini bea dan cukai dapat menyimpulkan bahwa harga yang dicapai dengan cara cara yang konsisten dengan cara cara penjual mencapai harga dengan pembeli yang tidak berhubungan (hal hal terkait dengan harga barang diberlakukan sama untuk semua pembeli termasuk distributor tunggal, dasar harga C&F diberlakukan sama kepada semua pembeli, diskon kepada semua pembeli, dan batas waktu pembayaran yang sama kepada semua pembeli).

Kesimpulan dari kasus disini adalah bahwa harga importir yang diberitahukan dapat diterima dan nilai pabean ditentukan dengan metode

nilai transaksi. Indikasi hubungan antara penjual dan pembeli selama bisa dibuktikan melalui⁸⁶:

1. Harga penjualan tercapai berdasarkan tata cara yang konsisten dengan tatacara tercapainya harga penjualan yang lazim terjadi pada industri yang bersangkutan (*pricing practice*)
2. Harga penjualan meliputi semua biaya ditambah dengan keuntungan rata rata perusahaan yang bersangkutan selama satu tahun

Dalam hal ditemukan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, atau angka 2 tersebut, maka hubungan antara penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga.

1.12 *Test Value*⁸⁷

Metode lain untuk mengetahui apakah hubungan antara pembeli dan penjual telah mempengaruhi harga adalah dengan membandingkan harga yang diberitahukan dengan *Test Value*.

Nilai transaksi dalam penjualan antara pihak yang berhubungan harus diterima apabila importir dapat membuktikan bahwa harga yang diberitahukan itu mendekati *Test Value*. Yang dimaksud dengan *Test Value* adalah:

1. Nilai transaksi atas penjualan untuk ekspor barang identik atau serupa ke negara pengimpor kepada pihak yang tidak berhubungan.

⁸⁶ Lampiran III PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

⁸⁷ Ibid hal 70.

2. Nilai pabean barang identik atau serupa yang didapatkan dengan menggunakan metode deduksi
3. Nilai pabean barang identik atau serupa yang didapatkan dengan menggunakan metode komputasi

Sebagian besar *Test Value* berasal dari importir. Namun kadangkala pabean memiliki catatan atau arsip dari nilai pabean yang dari transaksi antar pihak yang tidak berhubungan dapat digunakan sebagai *Test Value*. Walaupun *Test Value* seperti ini mungkin tidak diketahui sebelumnya oleh importir, bea dan cukai dapat menggunakannya untuk meneliti dapat atau tidaknya nilai yang diberitahukan diterima.

Test Value yang didapatkan dari transaksi antar pihak yang tidak berhubungan. Apabila harga yang dicapai dalam transaksi antar pihak yang tidak berhubungan telah memenuhi syarat sebagai nilai transaksi dan telah pula dilakukan penyesuaian seperti yang dimaksud dalam pasal 5 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, maka harga ini dapat digunakan sebagai *Test Value*.

Apabila suatu nilai pabean dapat melewati perbandingan dengan *Test Value* maka tidak diperlukan lagi atas hal hal yang terkait dengan penjualannya. Dalam kasus seperti ini, bea dan cukai akan langsung menerimanya sebagai nilai transaksi.

Dalam menerapkan metode *Test Value* dipertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas perbedaan dalam ketentuan ketentuan kontrak
2. Arti dari “hampir sama (*closely approximates*)”

3. Arti dari “pada saat yang sama atau mendekati (*at or about the same time*)”

Ketika dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan pada penjualan antar pihak yang tidak berhubungan dengan *Test Value*, harus diperhatikan perbedaan-perbedaan berikut:

1. Tingkat penjualan (*wholesale, retailer, dan end-user*)
2. Tingkat jumlah/kuantitas barang
3. Biaya-biaya yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk:
 - a. Berdasarkan bukti nyata atau bukti nyata yang obyektif dan terukur, dan.
 - b. Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
4. Biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam suatu penjualan dimana penjual dan pembeli tidak berhubungan dan biaya yang tidak dikeluarkan oleh penjual dalam suatu penjualan dimana penjual dan pembeli merupakan pihak yang berhubungan (misalnya, biaya garansi, biaya pemasaran, dan semacamnya yang akan muncul pada transaksi pihak yang berhubungan tetapi tidak muncul pada transaksi antar pihak yang tidak berhubungan).

Biaya yang tidak dimasukkan oleh penjual dalam harga dijual, dalam penjual dan pembeli saling berhubungan.

Penyesuaian harus dilakukan dengan menggunakan data yang obyektif dan terukur. Pada kasus dimana daftar harga dari penjual yang menunjukkan perbedaan dalam harga satuan yang tergantung kepada besarnya jumlah barang yang terjual, maka penyesuaian seperti yang dimaksud dalam pasal 5 butir (3) PMK ini harus didasarkan pada bukti yang seara jelas menerangkan dan mendukung besarnya biaya biaya itu (misalnya kontrak untuk jasa perantara, perjanjian royalti, bukti pembayaran).

Namun demikian penyesuaian mungkin tidak perlu dilakukan dalam kasus kasus dimana penjual menjual satu barang pada tingkat harga satuan yang sama dengan tidak membedakan tingkat perdangangan dan/atau jumlah barang yang dijualnya.

1. Pengertian “hampir sama” dan “pada saat yang sama atau mendekati”⁸⁸

Dalam menentukan apakah suatu harga itu “hampir sama” dengan harga yang lain, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk:

- a. Sifat barang tersebut
- b. Sifat dari industrinya
- c. Musim dimana barang itu diimpor
- d. Apakah perbedaan harga yang ada cukup signifikan

Dalam beberapa kasus mungkin tidak cukup informasi yang tersedia untuk menentukan apakah suatu harga itu hampir sama dengan harga yang lain. Dalam kasus kasus seperti ini, interpretasi atas istilah “hampir sama” mungkin harus didasarkan atas kriteria yang lain (suatu batas toleransi

⁸⁸ Ibid hal 72.

tertentu, misalnya 5%) terutama sekali dalam penggunaan metode *fallback*. Batas toleransi ini juga untuk menghindari adanya penetapan yang ekstrim.

Istilah “pada saat yang sama atau hampir bersamaan” akan diinterpretasikan sebagai kurang dari 30 hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB dari barang yang sedang ditentukan nilai pabeannya itu (besaran 30 hari ini merupakan masukan dari negara anggota ASEAN)⁸⁹.

2. Perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan dengan *Test Value*⁹⁰

Test Value yang dipilih akan dibandingkan dengan nilai pabean yang diberitahukan dan hasilnya akan merupakan indikasi apakah hubungan yang ada mempengaruhi harga atau tidak. Prosedur perbandingan tersebut adalah sebagai berikut.

Jika nilai pabean yang diberitahukan ternyata tidak mendekati *Test Value* yang berupa nilai pabean dari barang identik atau serupa (lihat penjelasan tentang batas toleransi diatas) maka “perbandingan” dianggap gagal. Pertanyaan tentang apakah hubungan telah mempengaruhi harga tetap tidak terjawab. Dalam kasus kasus seperti ini maka cara lain untuk menentukan apakah hubungan itu telah mempengaruhi harga yaitu penelitian terhadap hal hal yang berkaitan dengan penjualan harus dipertimbangkan. Hasilnya bisa jadi bahwa nilai pabean yang dideklarasikan dalam pemberitahuan impor tidak dapat diterima. Oleh sebab itu penentuan nilai pabeannya harus menggunakan metode lain selain metode nilai transaksi (metode II sampai metode VI).

⁸⁹ Pasal 9 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

⁹⁰ Ibid.

Sebaliknya jika nilai pabean yang diberitahukan memang “hampir sama” dengan *Test Value*, yaitu nilai pabean barang impor identik atau serupa maka hubungan akan dianggap sebagai tidak mempengaruhi harga dan nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor dapat diterima.

Apabila terdapat dua atau lebih *Test Value* yang memenuhi syarat maka yang akan digunakan adalah *Test Value* yang paling rendah.

Harus dicatat bahwa *Test Value* digunakan hanya untuk tujuan melakukan perbandingan saja dan tidak berfungsi sebagai harga pengganti. Hal ini karena penggunaan *Test Value* sebagai pengganti nilai pabean dilarang oleh *WTO Valuation Agreement*, jadi jika nilai pabean yang diberitahukan itu tidak mendekati harga *Test Value* dan penelitian terhadap hal hal yang berkaitan dengan penjualan juga tidak berhasil maka nilai transaksinya ditolak. Sebagai akibatnya nilai pabean harus ditentukan dengan menggunakan metode yang lain.

1.13 Pembatasan Penggunaan Metode Nilai Transaksi (Metode I)

Pasal 8 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk mengatur dalam pasal 8 yang menyatakan pembatasan penggunaan metode I tidak digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam daerah pabean
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap barang yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur
- d. Pejabat bea dan cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean.

Persyaratan (a) sebenarnya merupakan konsekuensi dari ketentuan metode nilai transaksi karena metode ini hanya dapat digunakan jika barangnya merupakan hasil penjualan. Jika tidak terdapat penjualan, secara otomatis tidak ada nilai transaksi. Nilai pabean barang impor yang merupakan hasil penjualan harus ditentukan dengan menggunakan metode lain.

Persyaratan (b) secara jelas dicantumkan PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk dalam pasal 7. Walaupun suatu barang impor merupakan hasil penjualan tidak secara otomatis harganya dapat diterima sebagai nilai pabean. Penjualan atau harga tersebut harus memenuhi 4 persyaratan yang disebutkan dalam pasal 7 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean. Jadi pada saat nilai pabean ditentukan. Pabean harus memeriksa apakah barang bersangkutan merupakan hasil penjualan dan apakah ke 4 persyaratan sesuai pasal 7 PMK ini dapat dipenuhi. Apabila penjualan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka metode I tidak dapat digunakan. Dalam kasus yang demikian bea dan cukai harus berkonsultasi dengan importir dan mencari kemungkinan untuk penerapan metode metode selanjutnya.

Apapun mengenai ketentuan mengenai “*proceeds*”, maka penambahan dari nilai *proceeds* tersebut kedalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar harus berdasarkan bukti yang tercatat dan jumlah yang pasti. Harus dihindari penambahan yang didasarkan atas perkiraan atau pengalaman dari transaksi sebelumnya. Oleh karena itu importir harus siap untuk membantu bea dan cukai dengan memberikan bukti untuk mendukung pemberitahuannya sehingga bea dan cukai dapat melakukan verifikasi atas pemberitahuan itu ketika hal itu harus dilakukan. Tanpa adanya bukti yang obyektif dan data yang terukur bea dan cukai tidak mampu untuk melakukan konfirmasi dan akibatnya jumlah nilai transaksi tidak dapat diverifikasi. Dalam kasus seperti ini metode nilai transaksi tidak dapat digunakan.

Pernyataan butir (d) merupakan pernyataan tentang berapa banyak atau berapa jauh informasi yang diperlukan untuk menolak nilai pabean yaitu dalam hal ini nilai transaksi. Pabean harus diberdayakan untuk memerangi pelanggaran pabean seperti *undervaluation* misalnya yang dapat dipraktikan pada tahap awal yaitu tahap penyelesaian barang.

The WCO Customs Valuation Handbook menerangkan bahwa salah satu dari 6 tujuan/metode dalam melakukan pengawasan awal untuk keperluan nilai pabean adalah untuk memastikan apakah nilai yang diberitahukan memang realistik terlihat dari kacamata praktik perdagangan dari industri terkait dan dari perbandingan barang identik dan serupanya.

Cara yang paling praktis, paling mudah dan relatif paling cepat yang dipakai oleh bea dan cukai untuk melakukan konfirmasi di atas adalah dengan membandingkan nilai barang yang diimpor yang diberitahukan dengan nilai

pabean barang identik atau serupa yang sudah diterima oleh bea dan cukai sebelumnya yang di kompilasi dalam database harga. Apabila hasil perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan harga cukup penting, bisa jadi hal ini merupakan indikasi awal dari pemberitahuan nilai pabean yang salah/sengaja disalahkan.

Seperti telah dijelaskan di atas terdapat 4 persyaratan yang menyebabkan nilai transaksi tidak dapat digunakan. Namun demikian *WTO Valuation Agreement* sangat menganjurkan agar metode nilai transaksi digunakan sedapat dan semaksimal mungkin, termasuk dengan menggabungkan sistem nilai pabean dengan prosedur prosedur yang ada dalam tahap penyelesaian barang. Verifikasi yang detail dapat didapatkan pada saat audit ketika kredibilitas importirnya sedang tinggi. Administrasi bea dan cukai harus mencari tindakan tindakan yang mungkin bisa diambil untuk mempercepat penyelesaian barang untuk kepentingan fasilitas perdagangan.⁹¹

2. Metode II: Nilai Transaksi Barang Identik

2.1 Definisi⁹²

Apabila nilai pabean tidak dapat ditentukan dengan dasar metode nilai transaksi (metode I), maka nilai pabean adalah nilai transaksi barang identik yang dijual untuk ekspor ke negara pengimpor yang sama dan ekspornya dilakukan dari negara pengekspor yang sama pada saat yang sama atau hampir bersamaan dengan barang yang sedang ditentukan dengan nilai pabeannya.

⁹¹ Ibid hal 89.

⁹² Ibid hal 90.

Berbeda dengan metode nilai transaksi yang hanya berdasarkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dan penyesuaian sesuai pasal 5 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, metode barang identik menggunakan sebuah nilai pengganti sebagai acuan dalam penentuan nilai pabean.

Untuk mendapatkan nilai pabean berdasarkan metode barang identik ini. Pabean harus mendapatkan suatu nilai transaksi barang identik yang sebelumnya telah diterima oleh pabean.

Agar nilai pabean barang identik acuan tersebut didapatkan maka harus terjadi konsultasi atau tanya jawab antara bea dan cukai dengan importirnya. Mungkin saja importir memiliki informasi tentang nilai transaksi suatu barang identik yang mungkin tidak dimiliki oleh bea dan cukai. Sebaliknya, bea dan cukai mungkin saja sudah memiliki informasi tersebut. Tanya jawab ini akan memudahkan bea dan cukai dalam menentukan bahwa proses tanya jawab ini tetap harus mempertimbangkan ketentuan yang berhubungan dengan masalah kerahasiaan informasi perdagangan seperti yang ditentukan dalam pasal 10 *WTO Valuation Agreement*.⁹³

2.2 Hal hal yang relevan

Penerapan metode barang identik harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu yaitu:⁹⁴

⁹³ Article 10 *WTO Valuation Agreement*, "all information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis for the purposes of customs valuation shall be treated as strictly confidential by the authorities concerned who shall not disclose it without the specific permission of the person or government providing such information, except to the extent that it may be required to be disclosed in the context of judicial proceeding"

⁹⁴ Ibid hal 91.

- a. Barang yang nilai pabeannya akan dijadikan referensi harus identik dengan barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya
- b. Barang identik tersebut harus diproduksi di negara yang sama dengan barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.
- c. Barang identik tersebut harus diekspor pada saat yang sama atau hampir bersamaan dengan barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya (dalam penerapan praktis, “hampir bersamaan” berarti 30 hari sebelum dan sesudah tanggal impor)
- d. Penjualan barang identik tersebut harus dilakukan dalam jumlah yang kurang lebih sama dan dalam tingkat perdagangan yang sama dengan barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya (penyesuaian harus dilakukan untuk mengkompensasi jika terdapat perbedaan dalam jumlah dan tingkat perdagangan).

Sebagai catatan, jika terdapat dua atau lebih nilai pabea barang identik maka yang harus digunakan adalah nilai yang paling kecil:

2.3 Barang identik

PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabea Untuk Perhitungan Bea Masuk mendefinisikan barang identik sebagai barang yang sama dalam segala hal, setidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama.⁹⁵ Perbedaan perbedaan kecil dalam penampilan tidak mempengaruhi penetapan barang tersebut sebagai barang identik kecuali jika perbedaan yang ada menyebabkan barang itu tidak dapat lagi didefinisikan sebagai barang identik.

⁹⁵ Lampiran IV PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabea Untuk Perhitungan Bea Masuk.

Istilah “barang identik” ini tidak meliputi barang yang dibuat dengan unsur unsur atau menggambarkan teknik, pengerjaan, karya seni, desain, rencana dan sketsa, yang menyebabkan penyesuaian dan penambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PMK ini, tidak dapat dilakukan karena elemen elemen tersebut dilakukan di negara pengimpor.

Suatu barang tidak dapat dianggap barang identik apabila tidak diproduksi dinegara yang sama dengan negara tempat produksi barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

Barang identik yang diproduksi oleh orang yang berbeda dapat dipergunakan hanya jika tidak terdapat barang serupa yang diproduksi oleh orang yang sama.⁹⁶

2.4 Contoh Barang Identik⁹⁷:

Contoh barang identik menurut ASEAN *Customs Valuation Guide*, yaitu:

- a. *Steel sheet* dengan komposisi kimiawi, bentuk dan ukuran yang identik yang diimpor untuk tujuan yang berbeda. Beberapa lembar digunakan untuk perakitan kendaraan bermotor dan beberapa lembar lainnya digunakan dalam industri dapur. Walaupun tujuan apenggunaan berbeda, tapi *steel sheet* tersebut adalah barang identik.
- b. *Wallpaper* yang diimpor oleh orang yang berbeda (*interior decorator* dan distributor *wholesaler*) dengan karakteristik warna, corak, lebar dan panjang sama. *Wallpaper* dianggap sebagai barang identik walaupun mungkin diimpor dengan harga berbeda.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

c. *Insecticide sprayer* dalam kondisi terurai dan terpasang (utuh) yang masing masing terdiri dari dua bagian yaitu pompa dan lubang semprot (*nozzle*) dan tabung berisi cairan anti nyamuk. untuk menggunakan sprayer tersebut tabung harus dilepas dari pompanya dan diisi cairan, selanjutnya dipasang kembali pada pompa, barulah siap untuk digunakan. Kedua sprayer tersebut diatas walaupun yang satu dalam kondisi terpasang, adalah identik dalam segala hal (meliputi karakteristik fisik, mutu dan reputasi). (Catatan: pada umumnya dua barang dalam keadaan terurai (*unassambled*) dan terpasang (*assambled*), maka kondisi terlepas dan terpasang tersebut tidak menyebabkan barang dimaksud dianggap sebagai barang identik).

Nilai transaksi barang identik dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan nilai pabean dengan syarat:

- a. Bea dan cukai memiliki nilai pabean sebelumnya yang ditentukan dengan metode nilai transaksi.
- b. Tanggal ekspor dari barang identik tersebut adalah dalam kurun waktu 30 hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB dari barang yang sedang ditentukan nilai pabeannya.
- c. Tingkat perdangan dari jumlah barang identik tersebut sama dengan tingkat perdangan dan jumlah barang yang sedang ditentukan nilai pabeannya. Jika terdapat perbedaan maka penyesuaian harus dapat dilakukan untuk mengkompensasi perbedaan itu.

2.5 Penyesuaian tingkat perdagangan dan jumlah barang⁹⁸

Penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sedapat mungkin menggunakan barang identik yang berasal dari tingkat perdagangan dan jumlah barang yang sama dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Apabila tidak terdapat barang identik seperti itu, maka dapat digunakan barang identik yang merupakan salah satu dari ketiga kategori ini:

- a. Penjualan dengan tingkat perdagangan sama namun jumlah barang berbeda
- b. Penjualan dengan tingkat perdagangan berbeda tetapi jumlah barang sama, atau
- c. Penjualan dengan jumlah dan tingkat perdagangan berbeda.

Apabila bea dan cukai mendapatkan penjualan dalam kondisi seperti di atas maka harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu untuk mengkompensasikan perbedaan yang ada tersebut. Penyesuaian harus dilakukan dengan dasar bukti nyata yang benar benar dapat membuktikan keabsahaan dan akurasi penyesuaian tersebut. Apabila tidak ada bukti nyata maka penyesuaian tidak dapat dilakukan dan nilai transaksi barang identik tidak dapat dipakai untuk menentukan nilai pabean.

2.6 Tiga Tingkat Perdagangan Yang Paling Umum

Tiga Tingkat Perdagangan Terdiri Dari Tiga Tingkat, yaitu:⁹⁹

- a. *Wholesaler*

⁹⁸ Ibid hal 93.

⁹⁹ Lampiran IV PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

Yaitu seseorang membeli barang untuk dijual kembali kepada pihak lain, biasanya *retailer*. *Wholesaler* meliputi *industrial user* yaitu orang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk diproduksi menjadi barang yang kemudian dijual dengan tingkat perdagangan *wholesaler*. *Wholesaler* pada umumnya mendapatkan harga pembelian yang lebih murah dibandingkan dengan *retailer* karena *wholesaler* membeli barang dalam jumlah besar sehingga mengurangi biaya pemasaran.¹⁰⁰

b. Retailer

Yaitu seseorang yang membeli barang. Biasanya dalam jumlah yang sedikit, untuk dijual kembali kepada pembeli individu. *Retailer* membeli barang dari *wholesaler* dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pembelian *wholesaler*, namun dalam kondisi tertentu *retailer* tersebut merupakan perusahaan besar yang mampu membeli barang dalam jumlah besar sehingga mendapatkan harga sama dengan harga pembelian *wholesaler* (*wholesaler price*), misalnya *departement stores*, *supermarket*, *dealer kendaraan*.¹⁰¹

c. End user

Yaitu seseorang yang membeli barang dalam jumlah tertentu untuk dipakai sendiri, tidak untuk dijual kembali.¹⁰²

¹⁰⁰ Ibid hal 93.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

2.7 Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang¹⁰³

Dibawah ini diberikan petunjuk penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi

a. Penyesuaian Jumlah Barang

Tabel 1

Penyesuaian Jumlah Barang

Pemasok	Jumlah	Pembeli	Tingkat Perdagangan
A	200 unit	Z	Wholesaler

Barang identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi dengan data:

Tabel 2

Penyesuaian Jumlah Barang Berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik

Pemasok	Jumlah	Harga per Unit	Pembeli	Tingkat Perdagangan
B	1700 unit	CIF USD 6.00	Y	Wholesaler

¹⁰³ Lampiran IV PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

Diperoleh bahwa yang obyektif atau terukur berupa *price list* dari pemasok B, bahwa menjual barang kepada pembeli tanpa mengindahkan tingkat perdagangan dengan harga CIF USD 6.00 untuk jumlah dibawah 200 unit.

Jumlah barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan jumlah barang identik, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik perlu dilakukan penyesuaian atas perbedaan jumlah barang tersebut.

Penyesuaian yang harus dilakukan berdasarkan data yang obyektif dan terukur, yaitu menggunakan *price list* pemasok B, cara penyesuaian dengan mencari harga barang yang tertera pada *price list* untuk jumlah 2000 unit. Dalam contoh ini, untuk pembelian 2000 unit atau lebih, harganya CIF USD 6.00 per unit. Dengan demikian harga barang per unit untuk 2000 unit adalah CIF USD 6.00. Harga inilah menjadi nilai pabean barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya (CIF USD 6.00 per unit).

Apabila pemasok B menentukan bahwa jumlah pembelian lebih dari 1000 unit dengan tanpa mengindahkan tingkat perdagangannya, harganya CIF USD 6.00 per unit, maka harga barang per unit untuk 2000 unit adalah CIF USD 6.00. Nilai pabean barang yang bersangkutan ditetapkan CIF USD 6.00 per unit.

b. Penyesuaian Tingkat Perdagangan

Tabel 3

Penyesuaian Tingkat Perdagangan

Pemasok	Jumlah	Pembeli	Tingkat Perdagangan
A	2800 unit	Z	<i>Wholesaler</i>

Barang identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi dengan data:

Tabel 4

Penyesuaian Tingkat Perdagangan Berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik.

Pemasok	Jumlah	Harga per unit	Pembeli	Tingkat Perdagangan
B	200 unit	CIF USD 2.50	Y	<i>Retailer</i>

Diperoleh informasi yang obyektif dan terukur berupa *price list* dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada pembeli dengan harga tergantung tingkat perdagangan. Apabila dibeli oleh *wholesaler* diberi diskon 20% (dua puluh persen)

Tingkat perdagangan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan tingkat perdagangan barang identik. Sedangkan jumlah barang sama, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan

nilai transaksi barang identik perlu dilakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut.

Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang obyektif dan terukur, yaitu menggunakan *price list* pemasok B, dengan memperhatikan korting terhadap tingkat perdagangan.

Dalam contoh ini, untuk pembelian *wholesaler* mendapat diskon 20% (dua puluh persen) dari harga *retailer*. Dengan demikian harga barang yang bersangkutan CIF USD 2.50 per unit dikurangi 20% (dua puluh persen) = CIF USD 2.50 per unit. Harga inilah menjadi nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

c. Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang

Tabel 5

Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang

Pemasok	Jumlah	Pembeli	Tingkat Perdagangan
A	800 unit	Z	<i>retailer</i>

Barang identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang bersangkutan dengan data.

Tabel 6

**Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang Berdasarkan
Nilai Transaksi Barang Identik**

Pemasok	Jumlah	Harga per unit	Pembeli	Tingkat Perdagangan
B	1500 unit	CIF USD 10.00	Y	<i>Wholesaler</i>

Diperoleh informasi yang obyektif dan terukur berupa *price list* dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada pembeli dengan harga, tergantung tingkat perdagangan. Apabila dibeli oleh *wholesaler* diberi diskon 20% (dua puluh persen), oleh *retailer* diskon 10% (sepuluh persen). Untuk jumlah barang dibawah 1000 unit harganya CIF USD 11.00

Tingkat perdagangan dan jumlah barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan tingkat perdagangan barang dan jumlah barang identik, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik harus dilakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut

Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang obyektif dan terukur, yaitu menggunakan *price list* pemasok B, dengan memperhatikan korting terhadap tingkat perdagangan dan perbedaan harga jual berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Untuk pembelian oleh *retailer* mendapat diskon 20% (dua puluh persen) dari harga dan untuk jumlah dibawah 1000 unit harganya CIF USD 11.00 per unit.

Berdasarkan *price list*, tersebut harga barang 800 unit CIF USD 11.00 per unit dikurangi diskon 10% (sepuluh persen). Dengan demikian harga barang

yang bersangkutan adalah CIF USD 9.90 per unit. Nilai pabean barang impor yang sedang ditetapkan CIF USD 9.90 per unit.

2.8 Penerapan di lapangan¹⁰⁴

Penerapan metode transaksi dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu konsultasi dengan bea dan cukai melalui mekanisme *valuation advice* atau dengan inisiatif individual importir.

Penggunaan mekanisme *valuation advice* merupakan pendekatan yang lebih baik jika importir memiliki waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan bea dan cukai sebelum kedatangan barang impornya. Setelah *valuation advice* di terima, maka importirnya tinggal menghitung nilai pabean, bea masuk, dan pajak pajak lainnya dan menyiapkan dokumen dokumen untuk proses penyelesaian barang. Sementara tugas bea dan cukai di lapangan akan menggunakan *valuation advice* tersebut sebagai acuan dalam memeriksa dan menentukan nilai pabean akhirnya nanti.

Dalam kasus kasus tertentu importir mungkin telah memiliki data tentang nilai transaksi yang telah diterima oleh bea dan cukai sebelumnya dan importir juga memiliki daftar harga yang dapat dipercaya untuk membuat penyesuaian penyesuaian yang mungkin harus dilakukan terhadap jumlah barang atau tingkat perdagangan. Dalam kasus seperti ini, importir dapat langsung melakukan penghitungan nilai pabean tanpa perlu meminta lagi *valuation advice* dari bea dan cukai.

¹⁰⁴ASEAN CUSTOMS VALUATION GUIDE PETUNJUK PENETAPAN NILAI PABEAN, cetakan pertama, op.cit. hal 94.

3. Metode III: Nilai Transaksi Barang Serupa¹⁰⁵

3.1 Definisi

Apabila nilai pabean tidak dapat ditemukan dengan dasar metode nilai transaksi (metode I) atau metode nilai transaksi barang identik (metode II), maka nilai pabean adalah nilai transaksi barang yang serupa yang dijual untuk diekspor ke negara pengimpor yang sama dan ekspornya dilakukan pada saat yang sama atau hampir bersamaan dengan barang yang sedang ditentukan nilai pabeannya.

Pendekatan yang sama terhadap metode barang identik akan digunakan dalam menentukan nilai pabean dalam metode barang serupa ini.

3.2 Hal hal yang relevan

Dalam penerapan metode nilai transaksi barang serupa ini, persyaratan atas barang impor adalah sama dengan persyaratan yang di kehendaki sebagaimana metode nilai transaksi barang identik.¹⁰⁶

3.3 Barang serupa

PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, menyatakan bahwa barang serupa adalah barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal tetapi memiliki karakteristik dan komponen material sama, berfungsi sama, dan secara komersial dapat dipertukarkan. Mutu, reputasi dan merk barang merupakan faktor faktor yang

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Lampiran V PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu barang disebut sebagai barang serupa.¹⁰⁷

Istilah “barang serupa” ini tidak meliputi barang yang dibuat dengan unsur unsur atau menggambarkan teknik, pengerjaan, karya seni, desain, rencana, dan sketsa. Yang menyebabkan penambahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PMK ini tidak dapat dilakukan karena elemen elemen tersebut dilakukan di negara pengimpor.

Suatu barang tidak dapat dianggap sebagai barang serupa apabila tidak diproduksi di negara yang sama dengan negara tempat produksi barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

Barang serupa yang diproduksi oleh orang yang berbeda dapat dipergunakan hanya jika tidak terdapat barang serupa yang diproduksi oleh orang yang sama.

3.4 Contoh Barang Serupa

Berikut contoh barang serupa:¹⁰⁸

- a. Bola lampu hias yang berbeda Watt, tetapi bentuk dan warna sinar sama serta ke duanya layak untuk saling dipertukarkan
- b. Ban dalam untuk kendaraan bermotor roda empat, dengan ukuran dan mutu barang yang sama tetapi diproduksi oleh dua produsen ban yang berbeda. Masing masing produsen menggunakan merk yang berbeda, namun ban tersebut layak untuk saling dipertukarkan.

¹⁰⁷ Lampiran V PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

¹⁰⁸ ASEAN CUSTOMS VALUATION GUIDE PETUNJUK PENETAPAN NILAI PABEAN, cetakan pertama, op.cit. hal 95.

- c. *Video Compact Disk Player* dengan merk dan produsen yang berbeda, namun kemampuan kerja relatif sama (*karaoke, 3 disk on tray*), reputasi sama, dibuat di negara yang sama dan layak untuk saling dipertukarkan.

4. Metode IV: Metode Deduksi

4.1 Definisi

Metode deduksi adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan ketika barang impor tersebut dijual kembali oleh importir di negara pengimpor. Harga satuan adalah harga barang impor yang bersangkutan, barang indentik atau barang serupa yang dijual kepada pihak yang tidak berhubungan yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*greatest aggregate quantity*)¹⁰⁹. Penjualan tersebut terjadi pada saat yang sama atau hampir bersamaan dengan importasi barang yang sedang ditentukan nilai pabeannya. Pasal 15 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk mengatakan untuk mendapatkan nilai pabean maka harga satuan tersebut harus disesuaikan dengan cara dikurangi dengan elemen elemen di bawah ini:

- a. Komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum atas penjualan barang impor di pasar dalam Daerah Pabean;
- b. Biaya transportasi, asuransi, biaya pemuatan, biaya pembongkaran dan biaya lainnya yang ditanggung oleh pembeli setelah barang impor tiba di pelabuhan tujuan di dalam Daerah Pabean; dan/atau
- c. Bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor

¹⁰⁹ Ibid.

Dalam hal pengurangan biaya tersebut pada huruf a dan b harus berdasarkan data yang diperoleh oleh pembeli/importir barang yang bersangkutan, dan apabila data barang impor yang bersangkutan pembeli/importir tidak dapat menunjukkan data yang minta oleh pejabat bea dan cukai, maka pejabat bea dan cukai menggunakan data yang tersedia di daerah pabean (*Database*).

Dan Apabila tidak ada data penjualan atas barang impor atau barang identik atau barang serupa yang dijual kembali dalam kondisi sebagaimana kondisi barang tersebut waktu diimpor pada saat yang sama atau hampir bersamaan dengan impor barang yang sedang ditentukan nilai pabeannya maka nilai pabean akan ditentukan dengan dasar harga dari suatu barang impor atau barang identik atau barang serupa ketika diimpor pada tanggal yang paling awal/dahulu setelah impor dilakukan tetapi tidak melebihi 90 hari.

4.2 Hal hal yang relevan

Penerapan metode deduksi mensyaratkan hal hal sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Harga satuan diperoleh dari penjualan di pasar dalam daerah pabean yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan dan terjadi pada tanggal yang sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.
- b. Merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang terjual dalam jumlah terbanyak.

¹¹⁰ Pasal 14 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

- c. Dalam hal tidak terdapat penjualan yang terjadi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, harga satuan diperoleh dari penjualan yang terjadi setelah tanggal pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengimporan barang yang harga satuannya akan digunakan untuk menentukan nilai pabean, dan.
- d. Bukan merupakan penjualan di pasar dalam daerah pabean atas barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeli yang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan.
- Nilai barang dan jasa berupa¹¹¹:
- (1). Material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;
 - (2). Peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor;
 - (3). Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor; dan
 - (4). Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sketsa yang dilakukan dimana saja di luar Daerah Pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor.

Dalam hal persyaratan di atas barang impor yang bersangkutan tidak memiliki harga satuan sesuai dengan syarat di atas, maka metode deduksi tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean barang impor.

¹¹¹ Pasal 5 ayat (3) huruf b PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

4.3 Pemilihan harga satuan¹¹²

Penentuan nilai pabean dengan metode deduksi memiliki faktor kunci yaitu pada pemilihan harga yang tercapai pada penjualan barang di negara pengimpor. Pasal 14 PMK ini menyatakan bahwa yang harus diperhatikan adalah penjualan barang impor, demikian juga barang identik atau barang serupanya. Pasal 14 PMK ini tidak memberikan prioritas barang yang mana yang harus digunakan (barang impor bersangkutan, barang identik atau barang serupa) untuk mendapatkan harga satuan tersebut.

Oleh karena itu apabila sudah terdapat penjualan barang identik atau barang serupa maka bea dan cukai dapat menggunakan data penjualan tersebut dan tidak menunggu terealisasinya penjualan atas barang impor bersangkutan.

Penjualan atas barang impor ini menjadi relevan apabila memang tidak ada penjualan yang sudah terjadi atas barang identik atau barang serupanya. Pemilihan atas penjualan kembali yang manakah akan dipilih ini akan tergantung kepada ada atau tidaknya penjualan serta informasi yang tersedia berkaitan dengan penjualan tersebut.

Persyaratan yang lain adalah bahwa penjualan yang akan dipilih tersebut tidak boleh penjualan antara pihak yang berhubungan. Dalam hal ini, hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara importir dengan pembeli dalam negeri dan bukan hubungan antara importir dengan penjual barang ini mula mula (eksportir)¹¹³.

¹¹² Ibid hal 96.

¹¹³ Lampiran VI PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

4.4 Keadaan yang sama seperti ketika diimpor¹¹⁴

Metode deduksi mengharuskan penjualan kembali atas barang impor, barang identik atau barang serupa yang akan menjadi referensi dilakukan dalam keadaan yang sama seperti saat barang tersebut diimpor dahulu. Pengepakan kembali yang dilakukan untuk mengganti bahan pengepakan yang dipakai waktu impor atau pengepakan kembali yang dilakukan secara sederhana untuk keperluan pasar dalam negeri masih dianggap tidak merubah keadaan barang tersebut semua. Selain itu perubahan alami seperti penguapan atau penyusutan juga tidak dianggap merubah keadaan barang. Namun pengeolahan lebih lanjut terhadap barang akan dianggap sebagai proses yang merubah keadaan barang mula mula.

4.5 Waktu penjualan¹¹⁵

Aspek lain yang berkaitan dengan pemilihan harga satuan adalah waktu dilakukannya penjualan kembali.

a. Pada saat yang sama atau hampir bersamaan¹¹⁶

Seperti yang diketahui istilah ini juga telah digunakan dalam metode II dan metode III atas istilah ini dilakukan sesempit mungkin sehingga merujuk pada waktu yang paling dekat ke tanggal pengimporan barang sehingga keadaan pasar atau praktik perdagangan yang mungkin akan mempengaruhi harga akan tetap sama.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid hal 97.

¹¹⁶ Ibid.

b. Dalam jangka 90 hari

Berdasarkan pasal 14 (c) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menentukan kurun waktu untuk pemilihan penjualan guna mendapatkan harga satuan dapat diperpanjang hingga 90 hari setelah tanggal impor namun tetap harus mengambil tanggal yang paling awal/dahulu setelah impor dilakukan.

4.6 Yang laku terjual dalam jumlah terbanyak(*the greatest aggregate quantity*)¹¹⁷

Harga satuan yang dicapai ketika barang impor, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga. Jika importir telah melakukan penjualan kembali atas barang impor atau barang identik atau barang serupa maka mungkin tidak perlu lagi dicari penjualan yang dilakukan oleh importir yang berbeda.

Untuk menentukan jumlah yang laku terjual dalam jumlah terbanyak maka akan dikumpulkan semua penjualan yang ada dan jumlah semua unit yang dijual pada suatu harga akan dibandingkan dengan jumlah semua unit yang dijual di harga yang lain.

Data penjualan tersebut diutamakan dari penjualan penjualan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang dari segi jumlah barang relatif mencukupi untuk pemilihan harga satuan.¹¹⁸

¹¹⁷ Ibid hal 98.

¹¹⁸ Lampiran VI PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

4.7 Contoh Pemilihan Harga Satuan Dengan Memperhatikan Persyaratan Yang Laku Terjual Dalam Jumlah Terbanyak.¹¹⁹

Pembeli mempunyai data penjualan di pasaran dalam daerah pabean kepada penjual yang tidak berhubungan dengannya dari barang serupa yang terjadi selama satu minggu:

Tabel 7

Contoh Pemilihan Harga Satuan

Jumlah barang	Harga satuan dalam Rupiah	Frekuensi penjualan	Total barang yang laku terjual untuk masing masing harga satuan
1 – 10 unit	1000.000.000	10 kali penjualan @5 unit 5 kali penjualan @4 unit	70 unit
11 – 20 unit	950.000	6 kali penjualan @11 unit	66 unit
Lebih dari 20 unit	900.000	1 kali penjualan @30 unit 1 kali penjualan @50 unit	80 unit

¹¹⁹ Lampiran VI PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

Dari contoh di atas, jumlah barang yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*the greatest aggregate quantity*) adalah 80 (delapan puluh) unit adalah Rp.900.000.

Harga satuan Rp.900.000 inilah yang digunakan sebagai dasar menghitung nilai pabean dengan metode deduksi. Harga satuan tersebut selanjutnya dikurangi dengan biaya biaya yang timbul setelah pengimporan antara lain berupa komisi, atau keuntungan dan pengeluaran umum, transportasi, dan asuransi dalam negeri dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor. Hasil dari pengurangan merupakan nilai pabean dalam kondisi CIF untuk barang impor yang bersangkutan.

4.8 Biaya Pengurangan¹²⁰

Segera setelah harga satuan penjualan yang laku terjual dalam jumlah terbanyak didapatkan maka harus dilakukan pengurangan tertentu untuk mendapatkan nilai pabean. Pasal 15 PMK160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menentukan penerapan metode deduksi ini dengan melakukan pengurangan terhadap harga satuan dan biaya biaya tertentu yang terjadi setelah pengimporan, yaitu:

- a. Komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum (*profit and general expenses*)¹²¹

Apabila barang impor atau barang identik atau barang serupa dijual kembali dengan dasar komisi maka jumlah komisi tersebut harus dikurangkan dari harga penjualan satuan. Apabila seorang pembeli yang

¹²⁰ Ibid hal 99

¹²¹ Ibid.

mendapatkan hak pemilikan atas barang tersebut melakukan penjualan kembali maka keuntungan dan pengeluaran umum harus dikurangi. Jika dilakukan pengurangan atas elemen komisi maka tidak boleh dilakukan pengurangan atas elemen keuntungan dan pengeluaran umum, demikian pula sebaliknya.

Jumlah komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum yang harus dikurangi dari harga satuan harus konsisten dengan nilai keuntungan dan pengeluaran umum yang biasanya ditambahkan dalam penjualan barang barang dari kelas dan jenis yang sama.

Suatu barang dianggap sebagai barang dari jenis dan kelas yang sama apabila barang tersebut termasuk dalam kategori suatu grup atau kelompok barang yang diproduksi oleh suatu industri atau sektor tertentu dan mencakup barang barang identik dan serupa. Yang harus diteliti adalah informasi yang dapat ditemukan dalam penjualan di negara pengimpor atas barang impor dalam kategori kelompok yang paling sempit.

Pertanyaan apakah suatu barang jatuh dalam kategori barang yang datang dari jenis dan kelas yang sama harus dijawab secara kasus per kasus. Salah satu persyaratan untuk menentukan apakah suatu barang itu jatuh dalam kategori barang yang datang dari jenis dan kelas yang sama adalah bahwa barang tersebut memang benar benar telah diimpor, sementara negara asalnya tidaklah penting.

Jumlah komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum yang harus dikurangi adalah sejumlah yang ditambahkan oleh importir kecuali jika jumlah itu tidak konsisten dengan yang biasanya ditambahkan (oleh

penjual lain) dalam penjualan barang barang dari kelas dan jenis yang sama.

Jika jumlah komisi atau keuntungan dari pengeluaran umum tersebut tidak konsisten dengan nilai keuntungan dan pengeluaran umum yang biasanya ditambahkan maka dalam jumlah yang harus dikurangi adalah jumlah yang “biasanya”. Berkaitan dengan ini, survey pasar dan asosiasi industri dapat membantu bea dan cukai dalam menentukan jumlah yang mana yang dapat dikategorikan sebagai yang “biasanya” ini.

Unsur pengurangan berupa keuntungan dan pengeluaran umum harus dihitung menjadi satu kesatuan. Walaupun salah satu dari elemen keuntungan atau pengeluaran umum ada yang tidak konsisten dengan yang biasanya berlaku dalam perdagangan, asalkan jumlah total keduanya konsisten maka jumlah tersebut dapat di pakai.

Informasi tentang jumlah yang harus dikurangi ini harus datang dari importir. Apabila angka yang diberikan oleh importir tidak konsisten dengan yang biasanya berlaku dalam perdagangan industri bersangkutan maka jumlah keuntungan dan pengeluaran umum yang mungkin dapat di pakai adalah informasi dari sumber lain. Sebagai catatan, pengeluaran umum mencakup biaya biaya yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan pemasaran barang.

b. Biaya transportasi dan asuransi¹²²

¹²² Ibid hal 100.

Semua biaya transportasi, pengurusan, dan asuransi untuk membawa barang dari pelabuhan impor ke tempat penyerahan barang di negara pengimpor harus dikurangi dari harga jual.

c. Bea masuk dan pajak¹²³

Bea masuk dan pajak lainnya yang dipungut di negara pengimpor juga harus ikut dikurangi. Juga termasuk dalam unsur yang akan dikurangi adalah bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan.

Pajak dalam negeri yang harus dibayarkan karena berhubungan dengan penjualan barang juga akan dikurangkan dengan menggunakan rujukan ketentuan untuk bea masuk dan pajak ini.

Jumlah bea masuk yang harus dikurangkan itu adalah sebesar jumlah yang benar benar dibayarkan oleh importir.

4.9 Tata Cara Penghitungan Nilai Pabean Berdasarkan Metode Deduksi¹²⁴

- Rumus metode deduksi:

Nilai pabean (CIF) dalam rupiah adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Harga Jual} - (\text{Komisi} + \text{Pengeluaran Umum} + \text{Biaya Transportasi} + \text{Asuransi})}{1 + \text{Bea Masuk dan Cukai} + \text{Pajak} + (\text{Bea Masuk dan Cukai} \times \text{Pajak})}$$

Keterangan:

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Lampiran VI PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

- Harga Jual : Harga jual tangan pertama per satuan barang di dalam daerah pabean dalam rupiah
- Komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum : komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum atas penjualan barang impor di daerah pabean.
- Biaya transportasi : Biaya transportasi yang timbul setelah pengimporan barang.
- Asuransi : Asuransi setelah pengimporan dalam rupiah
- Bea masuk dan cukai : Presentase tarif bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk anti dumping sementara, dan/atau cukai yang dikenakan terhadap barang yang dijual di pasaran dalam daerah pabean.
- Pajak : Presentase tarif pajak dalam rangka impor meliputi PPN dan/atau PPnBM dan/atau PPh.

4.10 Tatacara Memperlakukan Barang Yang Telah Di Proses Lebih Lanjut

Pasal 13 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa dalam penerapan metode deduksi untuk barang yang telah menjalani proses yang lebih lanjut adalah harga pada penjualan kembali.

Apabila tidak ada penjualan barang impor atau barang identik atau barang serupa dalam keadaan yang sama seperti ketika diimpor didalam negara pengimpor, dan apabila importir meminta, maka metode deduksi akan menggunakan dasar harga jual kembali atas barang impor yang telah diproses

lebih lanjut yang terjual dalam jumlah terbanyak. Dari harga jual kembali tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk pemrosesan lebih lanjut itu akan di kurangi begitu pula jumlah elemen elemen pengurangan lainnya (komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum, biaya transportasi dan asuransi dan sebagainya).

Apabila cara ini digunakan, maka pengurangan yang dilakukan atas nilai tambah setelah pemrosesan lebih lanjut itu harus dilaksanakan dengan dasar data yang obyektif dan terukur yang berhubungan dengan biaya yang memang muncul selama pemrosesan tersebut.

Penerapan pasal 13 PMK ini hanya dibatasi hanya apabila tidak ada penjualan barang impor bersangkutan atau barang identik atau barang serupa dalam keadaan yang sama seperti ketika barang tersebut di impor. Dalam kasus penjualan atas barang impor yang telah menjalani pemrosesan lebih lanjut yang dilakukan pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan dengan tanggal impor dan terdapat pula penjualan barang identik atau barang serupa dalam kondisi yang sama dengan kondisi ketika barang ini diimpor maka penjualan yang akan dipakai adalah penjualan barang barang identik atau serupa ini¹²⁵.

4.11 Penerapan di lapangan¹²⁶

Penerapan metode deduksi akan tergantung kepala pilihan importir, yaitu:

- a. Apabila importir dapat menjual barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya kepada pihak yang tidak berhubungan dalam kurun

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid hal 101.

waktu yang ditentukan maka nilai pabean akan ditentukan dengan dasar harga satuan penjualan tersebut yang laku terjual dalam jumlah terbanyak.

- b. Apabila importir tidak dapat menjual barang impor sesuai ketentuan yang ditetapkan di atas, maka importir ini harus menemukan penjualan barang identik atau serupa di dalam negara pengimpor yang memenuhi kriteria tertentu.

Sebagai penekanan, kriteria untuk menggunakan metode deduksi antara lain adalah bahwa penjualan di dalam negara pengimpor harus dilakukan pada saat yang bersamaan atau hampir sama dengan tanggal impornya; penjualan harus dilakukan dengan pihak yang tidak berhubungan dan penjualan barang impor atau barang identik atau barang harus dalam kondisi yang sama seperti saat barang ini diimpor.

Khusus untuk alternatif (a) importir mungkin harus mengeluarkan barangnya sebelum nilai pabean diputuskan oleh pabean dengan cara memberikan jaminan seperti yang dirujuk oleh pasal 13.

Apabila importir telah memilih alternatif yang akan diambil (a atau b) langkah selanjutnya adalah mencari harga satuan dimana harga satuan ini adalah harga yang terjual dalam jumlah terbanyak.

Untuk mendapatkan nilai pabean, beberapa elemen khusus harus dikurangi:

- a. Komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum.
- b. Biaya transportasi dan asuransi biaya lain yang berhubungan yang biasa dikeluarkan di negara pengimpor, dan.

- c. Bea masuk dan pajak lainnya yang dipungut di negara pengimpor.

Dianjurkan agar importir menggunakan *valuation advice* untuk dijadikan ketika menerapkan metode deduksi.

5. Metode V: Metode Komputasi

5.1 Definisi

Metode komputasi menentukan nilai pabean dengan melakukan penjumlahan keseluruhan atas biaya atau nilai dari sejumlah elemen yang membentuk nilai pabean suatu barang impor. Elemen elemen dalam metode komputasi ini adalah:¹²⁷

- a. Biaya atau nilai bahan baku dan proses pembuatan atau proses lainnya yang dilakukan dalam memproduksi barang impor yang bersangkutan.
- b. Keuntungan dan pengeluaran umum yang besarnya sama atau mendekati keuntungan dan pengeluaran umum penjualan barang sejenis yang dibuat oleh produsen di negara pengekspor untuk dikirim ke dalam daerah pabean.
- c. Biaya transportasi sampai dengan pelabuhan tujuan di dalam Daerah Pabean, termasuk biaya pemuatan, pembongkaran, penanganan, dan.
- d. Biaya asuransi pengangkutan barang sampai dengan pelabuhan tujuan di dalam Daerah Pabean.

Penting untuk diketahui bahwa dalam kaitannya dengan penentuan nilai pabean sesuai dengan metode V ini, tidak ada *contracting party* dari *WTO*

¹²⁷ Pasal 17 butir (1) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

Valuation Agreement yang mengharuskan atau memaksa seseorang yang bukan penduduk dalam wilayah negaranya untuk memberikan keterangan dalam penelitian atau memberikan akses ke catatan atau rekeningnya¹²⁸.

5.2 Hal hal yang relevan

Penerapan metode komputasi harus mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:¹²⁹

- a. Nilai pabean ditentukan dengan dasar informasi yang sudah ada di negara pengimpor.
- b. Penggunaan metode komputasi biasanya akan dibatasi pada kasus kasus dimana pembeli dan penjual merupakan pihak yang berhubungan
- c. Produsen barang bersangkutan bersedia untuk memberikan informasi yang terkait dengan biaya dan lainnya yang berhubungan kepada pihak yang berwenang di negara pengimpor untuk dilakukan verifikasi.
- d. Informasi tentang biaya dan nilai dari barang impor di atas harus berdasarkan perhitungan komersial produsen dan perhitungan tersebut harus konsisten dengan prinsip prinsip umum akuntansi (*Generally Accepted Accounting Principles*).
- e. Informasi tentang jumlah keuntungan dan pengeluaran umum harus konsisten dengan yang biasanya didapatkan pada penjualan barang dari jenis atau kelas yang sama dengan barang yang sedang ditentukan nilai pabeannya itu.

¹²⁸ Ibid hal 102.

¹²⁹ Ibid.

5.3 Biaya dan Harga Bahan Baku

Metode komputasi terdiri dari biaya atau nilai bahan baku dan pengerjaan atau pemrosesan lain yang dilakukan pada barang impor. *WTO Valuation Agreement* menggunakan istilah “biaya” dan “nilai” untuk merujuk elemen elemen ini. Bea dan cukai akan menggunakan bahan baku dan pengerjaan ini hanya jika elemen biaya tidak ada “biaya” merujuk kepada biaya yang sebenarnya yang dikeluarkan untuk pembuatan/manufaktur atau produksi. Selain itu elemen biaya ini akan digunakan asalkan sesuai dengan prinsip prinsip umum akuntansi (*Generally Accepted Accounting Principles*) yang berlaku di negara tempat pembuatan barang.¹³⁰

Dalam hal informasi dimaksud tidak dibuat berdasarkan prinsip prinsip umum akuntansi yang berlaku di negara tempat pembuatan barang, maka penentuan nilai pabean berdasarkan metode komputasi ini tidak dapat diterapkan.¹³¹

Pasal 17 butir (b) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk ini menyatakan bahwa biaya atau nilai bahan baku dan pengerjaan yang ditanggung pembeli mencakup hal hal berikut:

- a. Komisi dan Jasa Perantara, kecuali komisi pembelian.
- b. Biaya pengemasan yang untuk kepentingan pabean pengemasan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan pasal 5 butir (3) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Ketentuan Nilai Pabean

¹³⁰ Ibid hal 103.

¹³¹ Lampiran VII PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

- c. Biaya pengepakan, baik untuk upah tenaga kerja maupun material pengepakan

5.4 Keuntungan dan pengeluaran umum¹³²

Data tentang keuntungan dan pengeluaran umum diperoleh dari pembeli dan data tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai pabean sepanjang nilai keuntungan dan pengeluaran umum konsisten dengan nilai yang umumnya terdapat pada barang barang dari kelas atau jenis yang sama dan diproduksi di negara yang sama dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Dengan perkataan lain keuntungan dan pengeluaran umum harus selaras dengan keuntungan dan pengeluaran umum yang terjadi pada praktik komersial (*pricing policies*) pada jenis industri yang bersangkutan.

Dalam hal keuntungan dan pengeluaran umum tidak konsisten dengan nilai keuntungan dari pengeluaran umum yang umumnya terjadi pada barang dari kelas, atau jenis yang sama (tidak selaras dengan *pricing policies*) yang umum terjadi), maka penghitungan keuntungan dan pengeluaran umum menggunakan informasi lain yang relevan, misalnya informasi dari produsen lain yang membuat barang identik atau barang serupa.

Untuk menghitung nilai keuntungan dan pengeluaran umum, nilai keuntungan dan pengeluaran umum tersebut harus dihitung menjadi satu kesatuan. Dalam kasus tertentu, dapat terjadi bahwa keuntungan produsen rendah sedangkan pengeluarannya tinggi. Keuntungan dan pengeluaran tersebut dijumlah dan sepanjang sesuai dengan hal serupa yang terjadi pada

¹³² Ibid.

barang dari kelas atau jenis yang sama, maka keuntungan dan pengeluaran umum tersebut dapat digunakan sebagai unsur pembentuk nilai pabean berdasarkan metode komputasi.

5.5 Jenis atau kelas yang sama¹³³

Barang yang berasal dari kelas atau jenis yang sama telah didefinisikan dalam pasal 15 *WTO Valuation Agreement* sebagai barang yang di kategorikan dalam grup atau kelompok barang yang diproduksi oleh suatu industri atau sektor tertentu dan mencakup barang indentik atau serupa. Barang yang sama kelas dan jenisnya ini harus berasal dari negara pengekspor. Penentuan apakah barang barang tertentu itu termasuk dalam kategori barang dari kelas atau jenis yang sama akan ditentukan kasus per kasus.

5.6 Biaya atau nilai pengeluaran lainnya¹³⁴

Biaya atau nilai pengeluaran yang berkaitan dengan pengiriman, pengangkutan dari pelabuhan muat ke tempat impor, termasuk pemuatan, pembongkaran dan biaya pengurusan serta biaya asuransi harus dimasukkan ke dalam harga komputasi apabila dasar perhitungan nilai pabean adalah CIF.

5.7 Pemberitahuan kepada pembeli¹³⁵

Apabila data yang digunakan untuk menghitung nilai pabean berdasarkan metode komputasi tidak berasal dari produsen barang impor yang

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid hal 104.

¹³⁵ Ibid.

bersangkutan, maka pihak pabean harus memberitahu pembeli tentang hal tersebut. Apabila pembeli meminta keterangan tentang sumber informasi, maka pabean perlu memperhatikan aturan atau ketentuan kerahasiaan data.

5.8 Penerapan di lapangan¹³⁶

Importir harus mampu mendapatkan informasi yang diberikan oleh produsen atas biaya biaya yang diperlukan dalam pemrosesan, keuntungan, pengeluaran umum dan biaya transportasi, biaya asuransi, dan biaya biaya lainnya. Importir juga harus memastikan bahwa data yang ada itu dapat memenuhi semua persyaratan dalam metode V. Nilai pabean akan di hitung dengan menjumlahkan semua elemen biaya di atas.

Bea dan cukai harus meneliti apakah biaya atau nilai untuk mendapatkan nilai pabean itu merupakan biaya atau nilai yang valid berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 *WTO Valuation Agreement*¹³⁷. Pabean harus mengkonfirmasi apakah penghitungan yang dilakukan importir sudah benar.

Sistem *valuation advice* dianjurkan untuk dipakai sebelum impor dilakukan agar penerapan metode V ini dapat dilakukan dengan baik.

Penggunaan metode komputasi di batasi oleh hal hal berikut:

- a. Penjual dan pembeli saling berhubungan

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Article 6 *WTO Valuation Agreement* "The customs value of imported goods under the provisions of this Article shall be based on a computed value. Computed value shall consist of the sum of: a). the cost or value of materials and fabrication or other processing employed in producing the imported goods. b). an amount for profit and general expenses equal to that usually reflected in sales of goods of the same class or kind as the goods being valued which are made by producers in the country of exportation for export to the country of importation."

- b. Produsen bersedia memberi informasi berupa data data pembentuk harga barang impor yang bersangkutan.
- c. Produsen memberikan pemeriksaan lebih lanjut yang diperlukan.

6. Metode VI: Metode Fallback

6.1 Definisi

Apabila nilai pabean tidak dapat ditentukan dengan dasar metode nilai transaksi metode nilai transaksi barang identik atau serupa, metode deduksi maupun metode komputasi, maka nilai pabean harus ditentukan dengan cara cara yang wajar, konsisten dengan prinsip prinsip dan ketentuan umum *WTO Valuation Agreement* dan berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.

Pada dasarnya, penentuan nilai pabean dengan dasar metode fallback (metode VI) adalah dengan mencoba menerapkan kembali metode I sampai metode V secara berurutan tetapi dengan fleksibilitas tertentu dan dengan menggunakan data yang terdapat pada negara pengimpor. Pabean harus mencoba menerapkan metode I kembali dengan interpretasi yang fleksibel dengan mengurangi batasan yang ada dan jika gagal mencoba menerapkan metode II begitu seterusnya. Beberapa prosedur mungkin harus dicoba hingga ke metode V. Alasan mula mula untuk menolak metode I – V harus diteliti dan kemudian harus dicoba untuk membuat menginterpretasikan metode tadi secara lebih fleksibel dalam rangka untuk melihat apakah alasan penolakan tadi dapat diatasi.¹³⁸

¹³⁸ Ibid.

6.2 Dalam Penetapan Nilai Pabean Dengan Metode Penggulangan (*Fallback*)

Dalam Penetapan nilai pabean menggunakan metode penggulangan (*fallback*) sedapat mungkin berdasarkan pada nilai pabean yang pernah ditetapkan nilai pabeannya sebelumnya dan harus memperhatikan larangan yang sebagaimana dimaksud¹³⁹:

- a. Harga jual barang produksi dalam negeri.
- b. suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai pembandingan
- c. harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor
- d. biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa
- e. Harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke daerah pabean
- f. Harga patokan, atau.
- g. Nilai pabean yang ditetapkan dengan sewenang wenang atau fiktif.

6.3 Hal hal yang penting dengan penerapan metode *fallback*¹⁴⁰

Dalam kaitannya dengan metode *fallback* ini, pasal 7 *WTO Valuation Agreement* tidak memberikan pedoman tentang suatu metode tertentu yang harus dipakai namun hanya mengatakan bahwa nilai pabean yang ditentukan itu harus ditentukan dengan:

¹³⁹ Pasal 19 PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

¹⁴⁰ Ibid hal 105.

- a. Menggunakan cara yang wajar
- b. Konsisten dengan prinsip prinsip dan ketentuan umum dari *WTO Valuation Agreement* dan pasal VII dari GATT 1994, dan.
- c. Menggunakan data yang terdapat di negara pengimpor.

Interpretative Notes dari pasal 7 memberikan pedoman praktis dalam penerapan metode fallback ini:

- a. Nilai pabean yang ditentukan dengan menggunakan ketentuan dalam pasal 7 harus sedapat mungkin di dasarkan pada nilai pabean yang telah ditentukan sebelumnya;
- b. Metode yang akan diterapkan dalam metode pasal 7 ini harus merujuk pada metode yang ditentukan dalam pasal 1 sampai 6 secara keseluruhan. Tetapi penerapan metode tersebut dengan tata cara yang fleksibel dalam penerapannya sudah dianggap memenuhi ketentuan dan tujuan dari ketentuan pasal 7 tersebut.

Technical Comittee WCO dalam *Advisory Opinion* 12.1 menyatakan bahwa sebagai metode terakhir maka nilai pabean yang ditentukan dengan metode fallback dapat menggunakan metode metode yang wajar sepanjang:

- a. Metode tersebut tidak dilarang oleh pasal 7.2
- b. Metode tersebut harus konsisten prinsip prinsip dan ketentuan umum dari *WTO Valuation Agreement* dan GATT 1994.

Kemudian *Advisory Opinion* 12.2 secara singkat menyatakan bahwa pasal 7 *WTO Valuation Agreement* mengharuskan bahwa penerapan tata cara ini harus konsisten dengan prinsip prinsip dan ketentuan umum dari *WTO*

Valuation Agreement dan ini mengindikasikan bahwa jika memang dimungkinkan maka tata cara penerapan metode yang berurutan (hirarkis) harus diikuti. Hal ini juga berarti bahwa apabila terdapat metode yang dapat digunakan maka penerapan metode yang berurutan (hirarkis) ini tetap harus dipertahankan.

6.4 Konsisten dengan prinsip prinsip *WTO Valuation Agreement* dan pasal VII GATT¹⁴¹

Penentuan nilai pabean dengan menggunakan metode fallback harus konsisten dengan prinsip prinsip *WTO Valuation Agreement* termasuk:

- a. Sedapat mungkin berdasarkan nilai transaksi barang impor bersangkutan
- b. Keseragaman
- c. Keadilan dan netralitas
- d. Kriteria yang sederhana dan sama
- e. Konsisten dengan praktik praktik perdagangan.

Berkaitan dengan konsistensi dengan prinsip prinsip umum dari pasal VII GATT 1994 maka prinsip prinsip tersebut mencakup juga:

- a. Nilai pabean yang ditentukan dengan nilai yang sebenarnya (yaitu harga yang dicapai pada praktik perdagangan yang biasa dibawah kondisi yang kompetitif)
- b. Jika nilai seperti yang disebut di atas tidak ada, maka harus digunakan nilai yang paling dekat.

¹⁴¹ Ibid hal 106.

- c. Tidak berdasarkan pada nilai barang yang berasal dari negara pengimpor atau menggunakan nilai yang fiktif atau sewenang wenang.

6.5 Data yang terdapat pada negara pengimpor¹⁴²

Berdasarkan metode fallback ini, nilai pabean harus ditentukan dengan dasar data yang terdapat pada negara pengimpor. *Advisory Opinion* 12.3 menyatakan bahwa apabila terdapat sejumlah data yang berasal dari luar negeri maka tidak berarti bahwa data tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean berdasarkan metode *fallback* ini.

Advisory Opinion 12.3 memberikan pedomannya yang secara singkat mengatakan bahwa pasal 7 tidak menyatakan apa apa terhadap asal dari informasi yang harus digunakan dan hanya mensyaratkan bahwa data tersebut harus terdapat di negara pengimpor. Persoalan asal dari informasi ini tidak akan menjadi penghalang dalam penerapan informasi bersangkutan dan penerapan penentuan nilai pabean seperti yang dimaksud pasal 7 asalkan informasi tersebut terdapat dinegara pengimpor dan pabean menyetujui keaslian dan ke akuratan data tersebut.

6.6 Contoh fleksibilitas dengan menggunakan metode I¹⁴³

Fleksibilitas diterapkan untuk barang impor yang merupakan barang sewa (bukan subyek suatu transaksi jual beli). Nilai pabean berdasarkan harga sewa per bulan dikalikan umur ekonomis barang yang bersangkutan.

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

Penghitungan nilai pabean barang yang disewa tersebut akan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan dibelakang:

Untuk periode kontrak

$$\frac{R1 (Q^n - 1)}{Q^n (Q - 1)}$$

$$Q^n (Q - 1)$$

Untuk sisa perioded waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis:

$$\frac{R2 (Q^n - 1)}{Q^n (Q - 1)}$$

$$Q^n (Q - 1)$$

- b. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan didepan:

Untuk periode kontrak:

$$\frac{R1 (Q^n - 1)}{Q^{n-1} (Q - 1)}$$

$$Q^{n-1} (Q - 1)$$

Untuk sisa periode waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis:

$$\frac{R2 (Q^n - 1)}{Q^{n-1} (Q - 1)}$$

$$Q^{n-1} (Q - 1)$$

Keterangan:

$R1$ = sewa perbulan yang harus dibayar pada periode kontrak

$R2$ = sewa perbulan yang harus dibayar atas sisa periode barang impor tersebut dapat dipergunakan secara ekonomis

$$Q = 1 + i$$

I = tingkat suku bunga perbulan

N = jumlah pembayaran

6.7 Contoh fleksibilitas dengan menggunakan metode II dan III

Fleksibilitas diterapkan atas:¹⁴⁴

a. Jangka waktu transaksi

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan dilonggarkan (diperpanjang) menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

b. Negara asal barang

Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain diluar negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabeaan.

c. Dengan penyesuaian spesifikasi barang.

6.8 Contoh fleksibilitas dengan menggunakan metode IV¹⁴⁵

Fleksibilitas diterapkan atas:

a. Jumlah waktu transaksi

Jangka waktu transaksi barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan dilonggarkan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

b. Jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*)

¹⁴⁴ Lampiran VIII PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabeaan Untuk Perhitungan Bea Masuk.

¹⁴⁵ Ibid hal 108.

Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang.

c. Database harga

Sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan importirnya dan dapat berasal dari:

1. Pada tingkat penjualan eceran (*retail*) yaitu penjualan barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (satuan), misalnya: pusat perbelanjaan (*supermarket, departement store, car dealer*).
2. Pada penjualan grosir (*wholesaler*) yaitu aktifitas menjual dan membeli dalam jumlah lebih besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya di jual kepada penjual eceran, misalnya: pusat penjualan grosir/perkulaan.

Data harga tersebut berdasarkan atas bukti nyata atau data yang obyektif atau terukur yang berasal dari tempat penjualan yang dimaksud, dapat berupa kuitansi, *price list*, katalog dari tempat penjualan kembali barang dimaksud. Dalam hal ini dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda maka akan digunakan harga rata rata.

d. Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, akan ditetapkan sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Jasa PPJK ditentukan sebesar 5% dari CIF

¹⁴⁶ Lampiran VIII PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

2. Keuntungan ditentukan sebesar 20% dari *landed cost* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang undangan lainnya oleh direktur jendral sewaktu waktu atau secara periodik.
 3. Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF.
- e. Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan metode IV dengan menggunakan metode deduksi (metode IV) yang diterapkan secara fleksibel adalah sebagai berikut:

Nilai pabean = CIF

$$CIF = \frac{\text{harga importir}}{\text{faktor multiplikator}}$$

Catatan : Harga importir adalah harga barang yang mencakup bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan pengeluaran lain termasuk keuntungan dari transaksi dengan penjual yang berada di luar negeri.

Harga importir dalam satuan mata uang domestik dihitung dengan menggunakan ketentuan :

- a. Harga importir = 100%
- b. Harga grosir = 120%
- c. Harga eceran = 144%

Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

Tabel 8

Contoh Format Penghitungan Dengan Faktor Multipikator

no	Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing	Nilai dalam mata uang domestik
1	Satu satuan mata uang asing	
2	Bea masuk = $\text{tarif } BM \times (1 + 2)$	
3	Bea masuk anti dumping atau bea masuk anti dumping sementara	
4	Bea masuk imbalan atau bea masuk imbalan sementara	
5	Cukai	
6	PPN Impor	
7	PPnBm	
8	PPh	
9	Sub Total A (no 1 s.d 8)	
10	Transportasi dan asuransi = $10\% \times \text{CIF}$	
11	Sub total B (no 9 dan 10)	
12	Komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan = $20\% \times \text{Sub total B}$	
13	Faktor Multipikator (jumlah 11 dan 12)	

	12)	
--	-----	--

Contoh:

PT. ABC mengajukan PIB dengan uraian jenis barang sebagai berikut:

Jenis barang : AC Split

No. HS : 8415.10.000

Jumlah : 1 unit

Merk : samsung

Tipe : AS-090VD

Kapasitas : 1 PK

Harga : CIF HKD 1.250.67

Setelah diteliti, pabean berkesimpulan:

- Metode I tidak dapat dilakukan, karena terdapat hubungan yang mempengaruhi harga
- Metode II tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat barang identik
- Metode III tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat barang serupa
- Metode IV tidak dapat dilakukan, karena tidak ada penjualan di negara pengimpor untuk barang impor yang bersangkutan, barang identik, atau barang serupa

- e. Metode V tidak dapat dilakukan, karena produsen barang tersebut menolak memberikan data.

Oleh karena nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode fallback dengan menggunakan metode IV yang diterapkan secara fleksibel. Untuk tujuan tersebut pejabat pabean mengambil data barang identik di tingkat *wholesaler* dengan harga 3.199.000.00. perhitungan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembebanan atas barang impor:

Tarif pos : 8415.10.000

Bea Masuk : 10%

BMAD/S : -

BMI/S : -

Cukai : -

PPN Impor : 10%

PPnBM : 20%

PPh : 2,5%

- b. Harga importir:

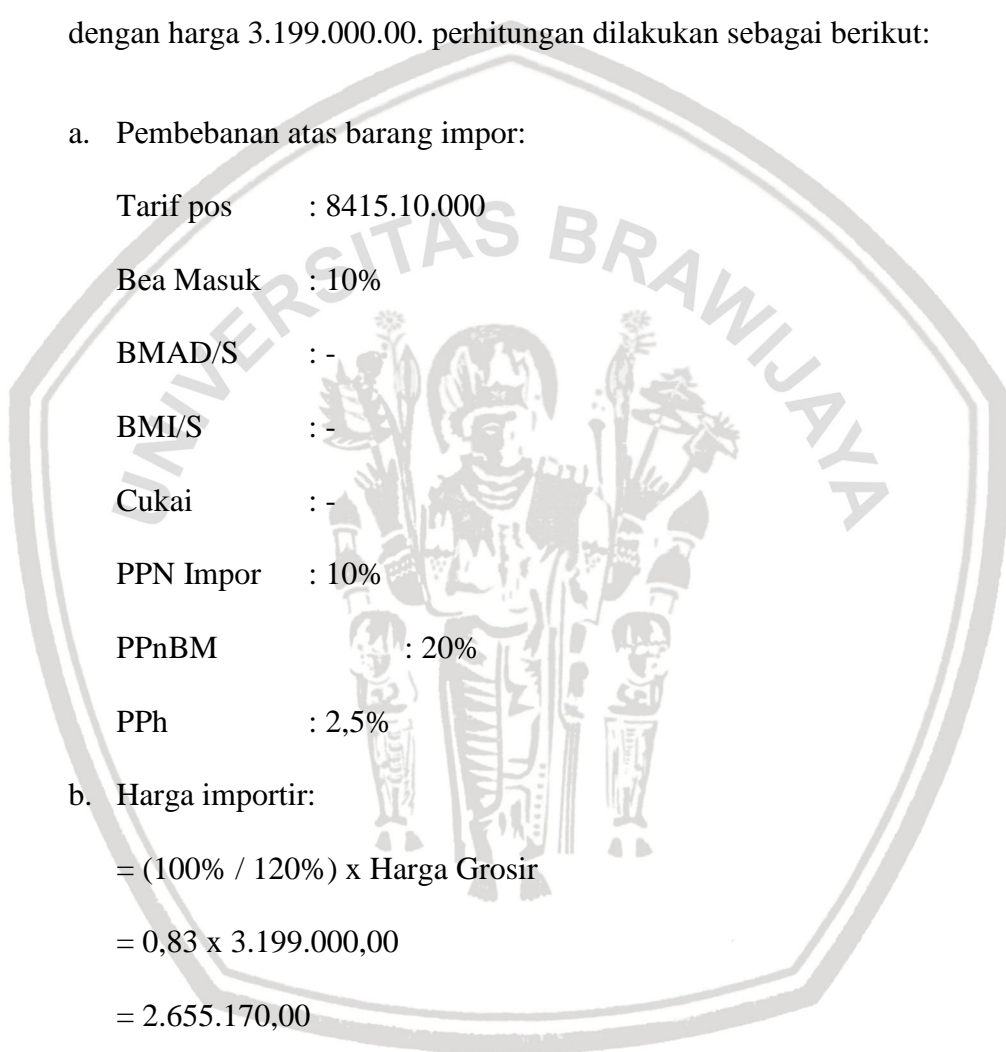
$$= (100\% / 120\%) \times \text{Harga Grosir}$$

$$= 0,83 \times 3.199.000,00$$

$$= 2.655.170,00$$

- c. Faktor multipikator

$$\text{Nilai tukar ada 1 HKD} = 1.043,17$$



Tabel 9

Contoh Perhitungan Dengan Faktor Multipikator

No	Unsur Biaya per HKD 1.00	Nilai dalam mata uang domestik
1	HKD 1.00	1.043,17
2	Bea Masuk 10%	104,32
3	Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Anti Dumping Sementara	0,00
4	Bea Masuk Imbalan atau Bea masuk imbalan sementara	0,00
5	Cukai	0,00
6	PPN Impor	114,75
7	PPnBM	229,50
8	PPh	28,69
9	Sub Total A (1 s.d 8)	1.520,43
10	Transportasi dan Asuransi = $10\% \times$ CIF	104,32
11	Sub Total B (9 s.d 10)	1.624,75
12	Komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan = $20\% \times$ Sub Total B	324,95
13	Faktor Multipikator (jumlah 11 + 12)	1.948,60

d. Nilai Pabean (CIF)

$$CIF = \frac{\text{harga importir}}{\text{faktor multiplikator}} = \frac{2.655.170,00}{1.362,60} = 1948,60$$

6.9 Penerapan di lapangan¹⁴⁷

Untuk menghitung nilai pabean berdasarkan metode VI, maka importir harus meninjau ulang penerapan metode metode dari I sampai VI dengan menggunakan interpretasi yang fleksibel. Interpretasi yang fleksibel akan mencakup elemen elemen seperti jangka waktu dan negara asal barang. Kemudian database harga yang terpercaya seperti katalog dari toko juga dapat digunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean. Dalam hal ini faktor multiplikator dapat digunakan dalam melakukan penghitungannya.

Prosedur atau mekanisme *valuation advice* dianjurkan untuk digunakan dalam penerapan metode VI. Jadi sebelum melakukan impor, importir dianjurkan untuk meminta *valuation advice* kepada bea dan cukai.

D. Pengawasan Nilai Pabean¹⁴⁸

1. Garis Besar¹⁴⁹

Penerapan *agreement* ini membutuhkan kerjasama yang baik antara importir dan bea dan cukai. Importir seharusnya memiliki pemahaman menyeluruh atas undang undang dan peraturan nilai pabean serta mampu mengajukan pemberitahuan pabean yang lengkap dan benar kepada bea dan cukai. Disamping itu, importir diharuskan mampu menunjukan dokumen

¹⁴⁷ Ibid hal 111.

¹⁴⁸ Ibid hal 112.

¹⁴⁹ Ibid.

pendukung terkait dengan rincian data pada pemberitahuan. Disisi lain, bea dan cukai juga harus memastikan undang undang dan peraturan nilai pabean itu transparansi dan tersedia kepada publik serta dipahami oleh komunitas perdagangan.

Dalam berbagai kasus, seorang importir dipersyaratkan untuk memahami kondisi dari transaksi, khususnya bagaimana membuat pemberitahuan pabean. Selanjutnya, peranan bea dan cukai adalah melakukan penelitian apakah pemberitahuan atau informasi yang diberikan importir sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam undang undang dan peraturan nilai pabean.

Untuk keperluan pengawasan nilai pabean, akan lebih baik dibuat pemisahan antara pengawasan pemberitahuan nilai pabean dengan penelitian nilai pabean. Pengawasan atas pemberitahuan nilai pabean adalah lebih bersifat administratif atau penelitian sepintas dan biasanya ini dilakukan pada kantor pelayanan. Sementara, peneltia/pengkajian penelitian nilai pabean akan dilakukan secara mendalam (*substantial check*) pada fase verifikasi pada *post clearance* atau pada *phase post clearance audit*. Pendekatan *risk assessment* sangat penting untuk kedua fase ini.

Tujuan utama pengawasan nilai pabean adalah untuk memastikan pemberitahuan nilai pabean dibuat sebagaimana semestinya. Meskipun demikian, pengawasan kepabeanan atas pengeluaran barang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan pengeluaran barang, termasuk nilai pabean. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa apa yang akan didiskusikan pada bab III ini adalah tentang pengawasan pemberitahuan nilai pabean, yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan pengeluaran barang impor.

2. Empat fase pengawasan nilai pabean¹⁵⁰

Berdasarkan sifat dari pengawasan yang dilakukan dilapangan, pengawasan nilai pabean dapat dilakukan dalam empat fase:

- a. Pengawasan sebelum pengeluaran barang impor
- b. Pengawasan pada waktu pengeluaran barang impor
- c. Pengawasan setelah pengeluaran barang impor; penelitian setelah pengeluaran barang atau *post clearance audit*.
- d. Pengawasan setelah pengeluaran barang atau *post clearance audit* dalam bentuk investigasi/penyidikan.

2.1 Pengawasan sebelum pengeluaran barang¹⁵¹

Tujuan pengawasan sebelum pengeluaran barang adalah untuk mengumpulkan informasi tentang importasi, mengidentifikasi kemungkinan manipulasi kepabean dan menyalurkan informasi kepada pengawasan berikutnya. Berkaitan dengan pengawasan nilai pabean, bea dan cukai seharusnya mengumpulkan dan menganalisa informasi terkait dengan maksud untuk mendapatkan informasi awal tentang kemungkinan manipulasi kepabeanan. Untuk mendapatkan hal ini, bea dan cukai seharusnya membangun kerangka intelijen yang memadai seperti membuat data profil importir atau eksportir, data komoditi dan data itelijen yang berkaitan dengan barang impor. Dalam membangun sistem intelijen yang handal, maka negara anggota sebaiknya mengacu pada petunjuk yang diterbitkan oleh organisasi internasional seperti WCO.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid hal 113

Untuk keperluan pengawasan sebelum pengeluaran barang, manifes yang diberikan oleh agen perusahaan pengapalan dapat menjadi sumber informasi yang sangat berguna. Disamping itu, sumber lain yang dapat digunakan adalah *valuation advice* yang diberikan kepada importir. Informasi tentang hal khusus mengenai harga pada saat pemberian saran/*advice* dapat menjadi petunjuk atau masukan bagi bea dan cukai di kantor pelayanan untuk mengambil langkah langkah pengawasan.

Dengan menggunakan sumber sumber informasi tersebut di atas, barang impor yang tiba dapat dianalisa berdasarkan informasi pada manifes dan sumber sumber lainnya, meliputi:

- a. Uraian barang
- b. Tingkat tarif
- c. Volume, berat
- d. Kondisi/bentuk pembungkus
- e. Negara asal dan ekspor
- f. Biaya angkut (bila ada)
- g. Tingkat resiko berkaitan dengan komoditi, importir, eksportir, dan agen
- h. Praktik umum pengangkutan, pembungkus, container, dan kepentingan yang berkaitan dengan barang tersebut
- i. Produk khusus intelijen.

Hasil analisa di atas, dapat memberikan indikasi tentang kemungkinan manipulasi harga yang terjadi. Setiap indikasi harus diperiksa secara teliti dan diinformasikan kepada bea dan cukai di kantor pelayanan untuk melakukan tindakan nyata dalam menyelesaikan pengeluaran barang impor tersebut

(misalnya: pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan pemberitahuan pabean, termasuk nilai pabean yang diberitahukan).

2.2 Pengawasan pada saat pengeluaran barang¹⁵²

Perlu digaris bawahi bahwa pada kantor pelayanan bea dan cukai, pemberitahuan nilai pabean sedapat mungkin untuk diterima. Penolakan nilai pabean harus berdasarkan data yang obyektif dan terukur. Misalnya, bea dan cukai boleh menggunakan informasi intelijen yang didasarkan pada impor sebelumnya, temuan audit atau informasi lain yang berkaitan dengan importir. Pada dasarnya, pengawasan nilai pabean di kantor pelayanan adalah penelitian formalitas dan penelitian dokumen untuk memastikan pemenuhan persyaratan administratif, sementara pengawasan substansif untuk menentukan kebenaran pemberitahuan adalah dilaksanakan pada verifikasi setelah pengeluaran atau pada tahap audit. Bea dan cukai di kantor pelayanan tidak memiliki waktu yang cukup untuk pemeriksaan yang substansif atau mendalam, dan mereka umumnya ditugaskan untuk melayani pemakai jasa dengan memperlancar pengeluaran barang. Oleh karena itu dalam kaitan dengan nilai pabean, akan lebih baik menggeser pengawasan dari lini depan ke tahap setelah pengeluaran barang.

Ide menggeser pengawasan nilai pabean dari lini depan ke tahap setelah pengeluaran barang adalah salah satu langkah fasilitas perdagangan. Penerapan sistem ini harus diimbangi dengan komitmen bea dan cukai melalui pendekatan *risk assessment* dalam rangka mengembangkan kemungkinan terbaik untuk menerima/menyetujui nilai pemberitahuan pada

¹⁵² Ibid.

kantor pelayanan. Dalam sistem *self assessment*, bea dan cukai harus sadar bahwa importir diwajibkan untuk memenuhi segala persyaratan impor dan patuh terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku, termasuk ketentuan nilai pabean. Apabila importir telah memenuhi tanggung jawab menghitung, memberitahukan dan membayar bea masuk dan pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, bea dan cukai harus memfasilitasi perdagangan tersebut dalam bentuk pemeriksaan seminimal mungkin pada tahap pengeluaran barang.

Sebenarnya, tahap kedua pengawasan nilai pabean sebagaimana disebutkan di atas adalah penelitian administratif yang difokuskan pada nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan dokumen pendukung yang disertakan. Elemen yang diteliti akan bervariasi tergantung metode nilai pabean yang digunakan.

Tujuan dari pengawasan awal atau penelitian administratif pada kantor pelayanan adalah untuk membuktikan apakah:

- a. Pemberitahuan nilai pabean telah diisi dengan lengkap dan benar
- b. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan telah dilampirkan
- c. Isian pada pemberitahuan nilai pabean sesuai dengan dokumen pendukung
- d. Pemberitahuan nilai pabean diisi berdasarkan saran nilai pabean yang ada
- e. Nilai pabean yang diberitahukan adalah wajar berdasarkan kriteria *risk assessment* (contoh: praktik perdagangan, barang identik, atau serupa), untuk resiko yang dapat diabaikan oleh bea dan cukai.

f. Uraian barang konsisten dengan data yang tertulis pada pemberitahuan.

Dalam hal pemberitahuan pabean menimbulkan keraguan pada tahap pengawasan pertama, bea dan cukai dapat memutuskan untuk memeriksa secara mendalam berkaitan dengan barang impor itu dan membuat penelitian lanjutan atas pemberitahuan nilai pabean.

a. Contoh Pemeriksaan Administratif

Database dapat digunakan untuk mengukur apakah nilai pabean yang diberitahukan itu dapat diragukan atau dicurigai. Nilai pabean yang diberitahukan dibandingkan dengan harga barang identik atau serupa dari database harga (penelitian untuk menerima nilai transaksi). Jika pemberitahuan nilai pabean dibawah *range* yang diperbolehkan, importir akan diminta untuk menjelaskan perbedaannya kepada bea dan cukai dengan melampirkan dokumen yang mendukung nilai pabean pada pemberitahuan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apabila hasil dari pemeriksaan administratif menunjukan tidak ada kesalahan, maka nilai pabean yang diberitahukan tidak dapat diterima.¹⁵³

Perbandingan harga dengan menggunakan database harga diketahui sebagai praktik yang paling umum dan mudah dilakukan untuk identifikasi awal nilai pabean yang diberitahukan tidak benar.

b. Contoh Praktik di Indonesia Dalam Menseleksi Data Yang Akan Diteliti Berkaitan Dengan Nilai Pabean¹⁵⁴

¹⁵³ Ibid hal 114.

¹⁵⁴ Ibid hal 115.

Pada kantor pelayanan bea dan cukai menerima ratusan pemberitahuan pabean setiap hari. Berdasarkan UU Kepabeanan Indonesia, bea dan cukai wajib menentukan nilai pabean dan klasifikasinya dalam waktu 30 hari dari tanggal pemberitahuan nilai pabean. Dalam kenyataannya, sangatlah tidak mungkin untuk meneliti semua elemen data dari seluruh pemberitahuan pabean, sehingga bea dan cukai menggunakan *risk assessment* untuk menseleksi pemberitahuan mana yang harus diperiksa secara khusus. Untuk mendukung hal ini, Indonesia menggunakan data base harga sebagai filter. Bea dan cukai menamakan prosedur ini sebagai penelitian apakah harga yang diberitahukan diterima atau tidak. Database ini (dalam hal ini database I) tidak digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai pabean. Ada ketentuan yang mengatur apabila pejabat bea dan cukai menggunakan database ini menetapkan nilai pabean, misalnya dengan metode III, maka ia akan dikenakan sanksi administratif. Oleh karena itu, *range* yang diperbolehkan adalah hanya merupakan penyeleksian pemberitahuan yang akan diteliti lebih lanjut.

Untuk keperluan ini, Indonesia menetapkan *range* kewajaran (jumlahnya dapat berubah, untuk Oktober 2002 adalah 10%, sedangkan pada awal 2003 adalah 0%). Apabila nilai pabean yang diberitahukan masih berada dalam *range* kewajaran, atau sama atau di atas harga pada database, bea dan cukai di Kantor pelayanan akan menerima pemberitahuan nilai pabean tanpa penelitian lebih lanjut. Akan tetapi, apabila pemberitahuan nilai pabean berada diluar *range* kewajaran, bea dan cukai tidak diperbolehkan langsung menolak pemberitahuan nilai pabean tersebut; Pejabat terlebih dahulu wajib

mengajukan pertanyaan kepada importir untuk keperluan penetapan nilai pabean. Penetapan nilai pabean didasarkan pada bukti yang diajukan oleh importir sesuai dengan fakta dari transaksi. Dalam hal ini, pejabat bea dan cukai akan menguji kebenaran bukti tersebut berdasarkan peraturan nilai pabean.

2.3 *Post Clearance* audit pada pengawasan tahap ketiga

2.3.1 Garis Besar¹⁵⁵

Post Clearance Audit (PCA) adalah tahapan dari aktifitas pemeriksaan yang menitikberatkan pada pembukuan, korespondensi dan kontrak kontrak berkaitan dengan barang impor untuk memastikan kepatuhan importir pada peraturan kepabeanan. Didalam penerapan *Agreement*, umumnya nilai pabean diterima/disetujui pada tahap pengeluaran barang. Hal ini mendorong pembentukan sistem PCA yang efektif untuk meneliti pemberitahuan nilai pabean dan untuk mendeteksi serta mencegah manipulasi atau pelanggaran terhadap *Agreement*. Disamping itu, dengan bertambahnya volume perdagangan internasional dan kebutuhan untuk memfasilitasi perpindahan barang, sistem PCA akan melengkapi bea dan cukai sebagai alat yang efektif untuk memperkuat pengawasan secara menyeluruh.

2.3.2 Fokus audit pada hal hal yang berkaitan dengan nilai pabean¹⁵⁶

Berkaitan dengan nilai pabean, PCA adalah sebuah alat untuk konfirmasi final atas kebenaran dan keakurasian nilai pabean yang diberitahukan oleh

¹⁵⁵ ibid

¹⁵⁶ Ibid.

importir. Dalam hal ini, tim audit akan bertanggung jawab untuk membuktikan kepatuhan importir terhadap peraturan nilai pabean.

Sekretariat ASEAN, dalam proyek yang lain, saat ini sedang menyusun petunjuk *Post Clearance audit*. Informasi lengkap tentang masalah PCA dapat ditemukan pada petunjuk tersebut.

2.4 Pengawasan tahap empat yaitu investigasi¹⁵⁷

Apabila dalam hal ini penelitian nilai pabean pada salah satu dari tiga tahap verifikasi sebelumnya, pemeriksa bea dan cukai menemukan alasan untuk mencurigai atau meyakini adanya manipulasi keberatan yang telah dilakukan importir (bahkan pada saat audit dilakukan ditempat importir), semua tindakan verifikasi harus dihentikan dan masalah tersebut diubah atau digantikan dengan penyidikan kepabeanan dengan melakukan tindakan diperlukan (misalnya: tuntutan kriminal).

Pada saat tim PCA melakukan audit maka berbagai informasi dapat ditemukan. Informasi tentang *suspected fraud* sebaiknya diteruskan kepada unit penindakan, dalam hal tim audit tidak mempunyai wewenang yang cukup untuk melakukan tindakan hukum. Hasil dari penyidikan dapat berupa sanksi administrasi (umumnya untuk manipulasi komersial) disamping tambah bayar bea masuk dan pajak. Tuntutan kriminal juga dapat terjadi, hal ini tergantung tingkat keseriusan atau kedalaman dari kasus. Penyidikan tidak hanya mengikutsertakan nilai pabean saja tetapi juga klasifikasi/tarif, pembatasan, lisensi, *rules of origin* (*Rules of origin* adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan asal produk dalam rangka mendapatkan fasilitas tarif

¹⁵⁷ Ibid.

preferensial)¹⁵⁸, dan keringanan bea masuk. Ketika penyidikan dilakukan maka informasi tentang modus operandi, orang-orang yang dicurigai terkait dengan kasus, sifat dari transaksi dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah tersebut harus disalurkan kepada pegawai bea dan cukai pada kantor pelayanan dan unit PCA. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk mengungkapkan kasus serupa yang mungkin terjadi pada importasi lainnya.

3. Pendekatan manajemen resiko pada pengawasan nilai pabean¹⁵⁹

manajemen resiko adalah sebuah metode pengelolaan yang khusus untuk mengidentifikasi dan mengawasi kejadian-kejadian yang potensial menimbulkan masalah yang signifikan. Dalam istilah kepabeanan, manajemen resiko bertujuan untuk mengidentifikasi importasi yang berisiko tinggi untuk melakukan pelanggaran sehingga bea dan cukai dapat memfokuskan sumberdayanya pada area ini.

Proses manajemen resiko untuk perdagangan terdiri dari empat langkah:

- a. mengumpulkan data dan informasi
- b. mengidentifikasi, menganalisa, dan menghitung resiko
- c. menggunakan penghitungan resiko dalam urusan kepabeanan
- d. melakukan evaluasi atas resiko yang telah terjadi dan mengkomunikasikannya kembali pada fase informasi

¹⁵⁸ Emmy Latifah, Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum Yang Ditimbulkannya, Yustisia, Volume 4, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, hal 33.

¹⁵⁹ ASEAN CUSTOMS VALUATION GUIDE PETUNJUK PENETAPAN NILAI PABEAN, cetakan pertama, op.cit. hal 116.

Penerapan *agreement* tidak meminimalkan resiko importir memberitahukan nilai pabean yang tidak benar. Untuk mengatasi masalah ini, bea dan cukai diseluruh dunia tidak lagi melakukan pemeriksaan atas seluruh importasi dan menggunakan sumber daya yang ada secara lebih luas melalui pemeriksaan importasi secara selektif. Dengan kata lain, mereka memfokuskan pemeriksaan pada importasi yang beresiko terhadap penerimaan negara. Pertanyaan lain yang juga timbul: apakah bea dan cukai mengasumsikan bahwa semua importasi diberitahukan dengan tidak semestinya sehingga mengakibatkan kehilangan penerimaan? Atau, haruskah bea dan cukai memutuskan menerima pemberitahuan nilai pabean, berdasarkan pengalaman, bahwa hanya beberapa importir yang menimbulkan resiko kehilangan penerimaan? Oleh karena itu, bea dan cukai harus memfokuskan pemeriksaannya pada importir mana yang kemungkinan besar beresiko menimbulkan kehilangan penerimaan negara.

Sistem nilai pabean yang baru, seperti *WTO Customs Valuation Agreement*, menyimpan beberapa resiko dalam pengelolaan pengeluaran barang. Pada praktiknya, negara anggota ASEAN, yang telah mengubah sistem nilai pabean mereka dari sistem yang lama, mempunyai pengalaman seperti itu.

Yang paling utama disini adalah mengidentifikasikan “area dan resiko” dan melakukan “penghitungan resiko” untuk menentukan siapa dan apa yang pantas diberikan atensi. Manajemen resiko adalah aplikasi dari berbagai teknik untuk menghitung kemungkinan terjadinya pelanggaran, termasuk

kesalahan atau manipulasi, dan cara mengatasi resiko yang telah teridentifikasi.

3.1 Pemusatan informasi¹⁶⁰

Pemusatan informasi adalah langkah yang sangat efisien dan efektif untuk menganalisa informasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun sebuah sistem pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pengeluaran barang pada bea dan cukai. Informasi yang harus dikumpulkan sebagai berikut:

a. Informasi profil importir

Seluruh pemberitahuan pabean adalah diajukan oleh importir sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami profil dari importir sebelumnya atau di depan, seperti informasi yang memungkinkan bea dan cukai untuk menganalisa resiko ketidakpatuhan importir yang mungkin terjadi pada saat sebelum importasi barang dilakukan. Informasi ini akan menjadi salah satu kriteria yang baik dari sistem pengeluaran barang dan dapat dipergunakan sebagai informasi selektifitas.

b. Data pengeluaran impor

Data impor sebelumnya adalah sangat berharga bagi bea dan cukai. Untuk tujuan perbandingan dan analisa, informasi ini harus dipusatkan. Data pengeluaran barang termasuk, diantaranya: dokumen hasil pemeriksaan, laporan adanya perbedaan, dan laporan pemeriksaan fisik.

¹⁶⁰ Ibid hal 117.

c. Hasil verifikasi setelah pengeluaran/*post clearance*

Laporan verifikasi setelah pengeluaran barang akan menjadi informasi yang lebih valid, karena datanya merupakan hasil dari verifikasi langsung atas catatan importir. Semua temuan yang relevan tentang aktifitas perusahaan/importir harus tergambar dalam laporan audit, didalam laporan ini yang akan tersaji informasi lengkap mengenai profil perusahaan.

d. Data ekspor

Data ekspor juga merupakan sumber informasi yang berguna bagi bea dan cukai. Hal ini terutama untuk jenis usaha yang mensuplai *assists* ke eksportir atau pabrikan. Apabila invoice ekspor menunjukan “nilai hanya untuk bea dan cukai”, ini memberi petunjuk kemungkinan adanya *assists* pada barang tersebut.

e. Hasil dari sistem analis bea dan cukai

Bea dan cukai sebaiknya mendirikan seksi sistem analis strategi untuk tujuan menganalisa area resiko pada bea dan cukai. Selanjutnya informasi harus menyatu dan tergambar dalam sistem pengeluaran barang. Area resiko ini akan didiskusikan pada sesi berikutnya.

f. Intelijen

Substansi dasar informasi dapat dipenuhi dari sumber sumber informasi umum, demikian juga dari importir dan eksportir. Terkadang, saran dan petunjuk yang berguna diperoleh dari sumber sumber yang tidak disangka sangka. Informasi ini harus dianalisa secara hati hati dan digunakan

sebagai informasi intelijen. Informasi ini sebaiknya dipusatkan dan digunakan untuk mengidentifikasi area resiko

3.2 Identifikasi area resiko penerimaan¹⁶¹

Pasca penerapan *WTO Valuation Agreement*, bea dan cukai akan menghadapi masalah penentuan apakah isi dari transaksi yang diajukan importir kepada bea dan cukai diberitahukan berdasarkan ketentuan yang ada pada undang undang kepabeanan nasional. Informasi ini lebih penting daripada informasi dari nilai transaksi itu sendiri, sebab bea dan cukai akan menerima nilai transaksi yang diberitahukan, pada saat pemberitahuan tersebut telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pada *agreement*.

Dalam mempelajari peraturan nilai pabean, ada beberapa area yang dapat dipertimbangkan menjadi area resiko penerimaan berdasarkan *WTO Valuation Agreement* sebagai berikut:

1. Status dari pembeli dan penjual¹⁶²
 - a. Kantor cabang mengimpor dari kantor pusatnya

Dalam menggunakan metode nilai transaksi, harus ada penjualan dalam rangka ekspor. Apabila kepemilikan dari barang tidak berubah, misalnya ekportir mengkapalkan barang kepada pegawainya atau kantor cabangnya yang tidak mempunyai kewenangan membuat kontrak atas nama diri mereka, maka tidak ada penjualan yang terjadi.

- b. Agen penjual atau pembeli

¹⁶¹ Ibid hal 118.

¹⁶² Ibid.

Apabila ada pihak ketiga yang berpartisipasi pada penjualan, sangat penting untuk memeriksa peranan pihak ketiga tersebut dalam transaksi. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi:

- i. Pihak ketiga, digaji/diberikan ibalan oleh pembeli atau penjual, peranan dalam kontrak penjualan ditemukan antara pembeli dan penjual. Agen bertindak sebagai perantara dalam kontrak dan mempunyai peranan menghadirkan pembeli atau penjual dalam pemutusan kontrak penjualan. Komisi agen penjualan termasuk dalam nilai pabean.
- ii. Pihak ketiga membeli barang dari penjual dan menjual kembali ke pembeli. Selanjutnya, dua transaksi yang terjadi. Margin dari penjualan kembali harus tergambar dalam nilai penjualan kembali barang tersebut.

2. Komisi penjualan¹⁶³

Kadang kadang komisi penjualan dan biaya agen tidak dimasukkan dalam invoice. Namun demikian, apabila nama dari pihak ketiga muncul pada invoice, ini dapat mengidentifikasi keikutsertaan dari agen penjualan. Selama kunjungan bea dan cukai ke tempat importir untuk melakukan verifikasi nilai pabean yang diberitahukan, harus diatensi bahwa komisi penjualan bisa jadi dicatat dalam komponen komisi penjualan pada uraian pemasaran (atau penjualan dan distribusi) di dalam catatan keuangan importir.

¹⁶³ Ibid hal 119.

3. Komisi pembelian¹⁶⁴

Perlakuan komisi untuk keperluan nilai pabean tergantung dari sifat jasa yang diberikan oleh perantara. Oleh karena itu tampilan sederhana dari “komisi pembelian” pada invoice yang dikeluarkan agen tidak cukup membenarkan ketidaksertaan komisi tersebut dalam nilai pabean. Bea dan cukai sebaiknya melakukan pemeriksaan apabila jasa yang diberikan oleh agen hanya merupakan perwakilan dari pembeli dalam pembelian barang tersebut, atau apabila jumlah dari komisi kelihatan tidak konsisten dengan jasa yang diberikan.

4. Deposit/pembayaran sebagian¹⁶⁵

Deposit atau pembayaran dimuka dengan tunai, cek, dll., mungkin tidak tergambar pada invoice yang diterbitkan. Catatan pada invoice seperti berikut ini mengindikasikan keberadaan dari situasi:

- a. Hanya pembayaran pertama atau bagian dari total pembayaran.
- b. Hanya deposit
- c. Sebagai pembayaran per bagian dari kontrak
- d. Pembayaran keseluruhan

Praktik praktik ini adalah umum berkaitan dengan barang modal dan/atau importasi untuk proyek skala besar, dll. Contoh pembayaran seperti ini adalah:

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

- a. 1/3 pembayaran untuk permulaan memproduksi barang yang akan diimpor
- b. 1/3 pembayaran untuk penyelesaian produk tersebut dinegara ekspor
- c. 1/3 pembayaran saat barang impor tiba di negara importir.

Krisis mata uang dapat juga dikontrakan dalam berbagai tahap, pembayaran sebagian atau dipisah. Kontrak penjualan harus menunjukan secara lengkap pemeriksaan laporan keuangan dari importir sangat perlu.

5. Pembayaran ditunda¹⁶⁶

Pembayaran ini biasanya tidak tertera dalam invoice tetapi dapat diidentifikasi pada laporan keuangan importir. Pembayaran ditunda bisa jadi merupakan bagian dari biaya skala besar (misalnya: barang modal untuk proyek skala besar), yang lazim dicover dengan kontrak tertulis.

6. Biaya peningkatan harga¹⁶⁷

Biaya peningkatan harga adalah sebuah aturan penyesuaian harga atas suatu jangka waktu kontrak atau perjanjian. Klausul peningkatan harga adalah bagian yang lazim dari sebuah kontrak atas importasi barang modal atau barang untuk proyek besar dengan jangka waktu yang lama dalam hal mana biaya produksi kemungkinan berubah. Berkaitan dengan importasi barang modal untuk proyek skala besar (misalnya: pabrik, perakitan, pembangkit listrik), fotokopi dari kontrak terkait sebaiknya diminta untuk diteliti bagaimana biaya peningkatan harga dibayar.

7. Diskon¹⁶⁸

¹⁶⁶ Ibid hal 120.

¹⁶⁷ Ibid.

Diskon tunai atau diskon jumlah diperbolehkan dalam *agreement*. *Advisory opinion 5.1 – 5.3* pada *Compendium* mengacu kepada perlakuan atas diskon. Namun demikian, beberapa diskon berdasarkan alasan berikut tidak dapat dikurangkan yaitu:

- a. Pembeli melakukan aktifitas tertentu untuk, atau atas nama pembeli sebagai bagian dari pembayaran sebagaimana kontrak penjualan.
 - b. Pembeli menawarkan barang/jasa ke pihak ketiga untuk, atau atas nama penjual sebagaimana kondisi penjualan barang impor.
 - c. Hubungan importir dan eksportir mempengaruhi harga.
 - d. Harga barang impor telah termasuk kredit yang diberikan oleh importir berkaitan dengan transaksi sebelumnya.
8. Invoice dengan klausul “untuk keperluan bea dan cukai”¹⁶⁹

Invoice yang diberi tanda “Untuk keperluan bea dan cukai” (atau catatan lain yang serupa) dapat mengindikasikan:

- a. Tidak ada penjualan atas harga barang tersebut.
 - b. Invoice komersial dari barang tersebut tidak ada.
9. Harga paket¹⁷⁰

Total harga atas suatu barang dapat dibagi menjadi dua atau lebih invoice sehingga barang yang bea masuknya tinggi diberitahukan harga rendah dan barang yang mempunyai bea masuk rendah diberitahukan barang yang harganya tinggi. Melihat kenyataan bahwa kasus manipulasi

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Ibid hal 121.

harga di atas adalah berkaitan dengan otoritas pengawasan bea dan cukai, untuk itu, dapat dilakukan tindakan tindakan untuk membuktikan kondisi atau pertimbangan bahwa harga tidak dapat ditentukan sesuai dengan nilai barang yang diberitahukan. Oleh karena itu, aturan pada article 1.1 (b) dari *GATT Valuation Agreement* tidak dapat digunakan sebagai dasar nilai transaksi dari barang impor yang dimaksud.

10. Harga rata rata¹⁷¹

Dalam kondisi ini, total harga pada invoice dari barang impor telah dirata ratakan sesuai dengan *range* dari barang yang berbeda yang terdapat pada satu pengiriman tersebut. Pemecahan harga harus diterapkan.

11. Harga tergantung pada harga penjualan kembali¹⁷²

Harga telah dikondisikan tetap dan akan disesuaikan naik atau turun, tergantung jumlah keuntungan yang terjadi dari penjualan kembali barang tersebut. Dalam kasus ini, menurut *commentary 4.1* didalam buku *compendium*, nilai transaksi dari barang impor harus total dari harga final yang dibayar atau seharusnya.

12. Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional¹⁷³

Transfer pricing adalah sebuah praktik yang diadopsi oleh perusahaan multinasional dalam menentukan harga dari barang dan jasa yang diperdagangkan di antara perusahaan dan afiliasinya yang berlokasi di

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Ibid.

negara berbeda. Perusahaan multinasional dapat menyesuaikan harga barang untuk meningkatkan keuntungan keseluruhan perusahaan atau untuk mencapai tujuan lainnya. Dalam beberapa kasus, harga final adalah tergantung atas jumlah realisasi penjualan kembali negara importasi, *transfer price* nya disesuaikan tinggi atau rendahnya. Dalam kondisi ini, area berikut ini membutuhkan penelitian lebih lanjut:

- a. Apakah transaksi yang diteliti dapat diperlakukan sebagai penjualan
- b. Apakah ada atau tidak pengaruh terhadap harga yang disebabkan oleh hubungan antara penjual dan pembeli
- c. Adanya kondisi atau pertimbangan yang membuat penjualan menjadi subyek.

13. Manajemen fees atau kontribusi untuk *research dan development*¹⁷⁴

Biasanya dalam perdagangan antara perusahaan multinasional dengan afiliasinya, beberapa persen dari jumlah pendapatan atau lainnya dibayar oleh pembeli kepada penjual, ini disebut *management fees* atau kontribusi kepada *research and development*. Dalam kasus lain, masalah apakah pembayaran ini adalah sebuah kondisi dari penjualan dan apakah hal hal yang berkaitan dengan barang impor, wajib dipertimbangkan.

14. Biaya transportasi, asuransi, dan biaya lainnya¹⁷⁵

- a. Biaya transportasi di negara eksportir
 - Kondisi pengiriman tidak meliputi biayatransportasi di negara eksportir, *freight* seharusnya termasuk dalam nilai pabean.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Ibid hal 122.

- b. Biaya transportasi dimana dasar negara untuk penetapan nilai pabean adalah FOB

Biaya transportasi dan biaya lain yang termasuk dalam invoice CIF dapat menjadi *overvalued* ketika dasar negara untuk penetapan nilai pabean adalah FOB

- c. Biaya pengepakan

Pada umumnya, biaya pengepakan dari barang adalah termasuk dalam harga penjualan. Akan tetapi, biaya pengepakan dalam rangka ekspor biasanya tidak termasuk dalam harga penjualan. Pengepakan barang ekspor digunakan khusus untuk melindungi barang selama dalam perjalanan jauh dan ini secara khusus untuk melindungi barang selama dalam perjalanan jauh dan ini secara khusus diatur dalam *article 8* sebagai tambahan untuk nilai pabean

- d. Biaya pembersihan kontainer

Ada beberapa kasus dimana biaya pembersihan dibayar kepada perusahaan pelayaran. Misalnya, barang diimpor adalah barang kimia, tangki wahana barang kimia cair tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum diangkut. Biaya ini akan menjadi biaya yang terkait dengan pengiriman dan harus dimasukkan ke dalam nilai pabean.

- e. Biaya asuransi

Biasanya, penjual dan pembeli menyepakati paket asuransi yang meliputi seluruh transaksi. Dalam hal ini, biaya asuransi yang berkaitan dengan pengiriman barang impor harus dimasukkan pada nilai pabean untuk negara yang basis penetapan nilai pabeannya ada CIF.

15. Royalti dan Lisensi¹⁷⁶

Dalam banyak kasus, kontrak, penjualan barang tidak secara eksplisit menyebutkan pembayaran royalti atau lisensi telah termasuk dalam penjualan barang tersebut. Biasanya dibuat dalam kontrak yang terpisah dibuat untuk paten, lisensi atau penyediaan teknologi dll. Barang yang biasanya telah termasuk royalti atau lisensi adalah rekaman musik, merek barang, mesin atau proses pembuatan yang telah dipatenkan.

16. *Tooling cost (assists)*¹⁷⁷

Tooling cost lazim diberikan oleh pembeli dalam transaksi peralatan barang elektrik dan lain sebagainya dimana produk dari supplier harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan standar atau bentuk spesifikasi yang ada di negara importir.

17. Bagi hasil¹⁷⁸

Apabila si pembeli berbagi hasil dengan penjual atas barang yang dijual kembali maka bagian dari si penjual harus ditambahkan dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

18. *Software* komputer¹⁷⁹

Nilai dari data atau instruksi (*software*) yang terekam dalam media pembawa, menurut *decision 4.1* dari *committee on customs valuation*, berdasarkan persetujuan anggota, adalah tidak termasuk dalam nilai

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid hal 123.

¹⁷⁹ Ibid.

pabean sepanjang nilai dari *software* dapat dibedakan dari nilai media pembawanya.

Perlu dicatat bahwa “media pembawa” adalah termasuk *tape magnetic*, disk (termasuk disk untuk dibaca dengan system pembacaan dengan laser) dan disket, tetapi tidak termasuk *integrated circuits*, *semi conductors* dan peralatan serupa yang di dalamnya seperti sirkuit atau alat alat. Istilah “data atau instruksi” tidak untuk suara, sinema atau rekaman video.

19. Biaya kuota¹⁸⁰

Dibawah perjanjian kuota antar negara pengekspor dengan negara pengimpor, yang berwenang di negara eksportir mengalokasikan kuota ke pabrik domestik. Tanpa kuota, mereka tidak akan mendapatkan lisensi ekspor. Pabrik biasanya menghabiskan alokasi kuota mereka dan membeli kuota yang tidak terpakai dari pabrik lain. Penerapan nilai pabean pada biaya kuota tergantung pada interpretasi negara anggota atas GATT *valuation agreement*, dan perundang undangan nasional atau jurisprudensi.

3.3 Faktor resiko penerimaan¹⁸¹

Setiap institusi bea dan cukai wajib menentukan resiko kehilangan/kerugian, yang didasarkan pada pengalaman yang unik. Mengingat setiap negara mempunyai “agenda” tarif bea masuk yang berbeda beda, skema tarif, politik, sosial dan ekonomi, setiap negara harus meneliti/menguji

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid.

kriteria resiko negaranya. Berikut ini menjelaskan beberapa faktor resiko yang potensial, yang dapat dijadikan sebagai masukan. Apakah suatu resiko itu tinggi, menengah atau rendah harus ditentukan oleh masing masing negara berdasarkan kondisi dan pertimbangan masing masing.

1. Volume¹⁸²

- a. Jumlah volume impor dapat menjadi penyebab suatu resiko. Untuk impor yang dilakukan setiap hari, volume dalam satu periode tertentu dapat menjadi jumlah yang signifikan.
- b. Pengiriman satu kali kelihatan tidak signifikan karena jumlah yang terbatas dan nilai yang relatif kecil, namun demikian apabila diperhatikan total jumlah dari kegiatan pengimporan, gambaran keseluruhan dapat menjadi cukup besar.
- c. Dengan adanya biaya yang termasuk dalam setiap pembelian dan penjualan seperti biaya transportasi dan asuransi, serta biaya *handling*, maka biasanya ada alasan untuk melakukan bisnis dengan cara ini tetapi tertentu seperti situasi yang menawarkan kemungkinan terjadinya resiko dan ini sangat berharga untuk diatasi.

a. Faktor Resiko Volume¹⁸³

Faktor ini lebih ditekankan kepada jumlah pengapalan yang bertolak belakang dengan nilai barang. Diasumsikan jumlah yang “besar”, kondisi “besar” diinterpretasikan oleh masing masing administrasi kepabeanan. Hal yang utama disini adalah ketika nilai barang kecil pada setiap pengimporan,

¹⁸² Ibid.

¹⁸³ Ibid hal 124.

untuk periode tertentu, akumulasi dari nilai barang menjadi signifikan. Dalam kenyataannya, banyak importir akan menyampaikan pengapalan yang di pecah pecah dengan maksud untuk menghindari pemeriksaan dan menyebabkan bea dan cukai lengah.

Hal ini dapat juga menjadi implikasi pada negara yang menggunakan PSI, negara yang menerapkan kuota, temuan harga dumping, dll. Tentunya, ini tidak salah tetapi hal ini berharga untuk diatasi. Mengingat biaya yang dikeluarkan untuk pengapalan internasional, perusahaan umumnya akan menghemat biaya dengan menkonsolidasikan pengimporan/pengapalan yang kecil menjadi satu pengimporan/pengapalan yang besar, bukan dengan cara sebaliknya.

2. Nilai¹⁸⁴

- a. Jumlah yang besar atas impor sebaiknya dipertimbangkan sebagai resiko tinggi. Nilai yang tinggi dapat terjadi hanya untuk sebagian kecil pengapalan/pengiriman atau sebagaimana diuraikan diatas dan dapat juga merupakan efek kumulatif untuk periode tertentu.
- b. Bahkan tingkat tarif yang rendah seperti 2%, ketika diaplikasikan terhadap ekuivalen dari US\$ 1 juta menjadi jumlah yang signifikan.
- c. Umumnya nilai tinggi yang dipertimbangkan sebagai resiko, sebaliknya, nilai rendah yang tidak beraturan, untuk importasi tertentu, sebaiknya dicurigai.

¹⁸⁴ Ibid.

- d. Hal ini menuntun ke pola pemikiran bahwa barang kali faktor faktor ini tidak penting untuk dilihat dalam satu kali importasi, tetapi penting secara keseluruhan.

b. Nilai Barang Sebagai Faktor Resiko¹⁸⁵

Disini nilai dapat mengimplikasikan harga yang “tinggi”, dan lagi, istilah tinggi mempunyai arti yang berbeda untuk setiap orang. Tetapi harus ada batasan untuk nilai total dari pengapalan/importasi. Apabila harga ditentukan sangat rendah, maka akan menghilangkan tujuan dari catatan ini. Juga, harus dipertimbangkan faktor ini sejalan dengan faktor nomor 1 yaitu volume, pada saat harga kumulatif tinggi. Penentuan batasan nilai juga dapat dibuat dengan mengikutkan faktor faktor lain, seperti tingkat tarif, yang akan didiskusikan kemudian. Oleh karena itu, barang tertentu mungkin saja mempunyai nilai yang tinggi tetapi renda bea masuknya.

3. Tarif bea masuk¹⁸⁶

- a. Sebagaimana dibahas sebelumnya, tarif bea bebas atau tarif bea spesifik tidak memiliki resiko penetapan nilai yang berarti. Biasanya, tarif bea yang rendah tidak menimbulkan resiko yang signifikan kecuali ada faktor lain, seperti nilai barang tinggi ikut mempengaruhi.
- b. Pada sisi lain, tarif bea masuk yang tinggi mengandung resiko yang signifikan, meskipun nilai barang rendah sebagai akibat dari kewajiban hutang (atau kerugian/kehilangan).

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Ibid.

- c. Sebagai tambahan beberapa tarif bea masuk tergantung juga pada nilai barang (contohnya: “apabila melebihi ...”). dalam beberapa kasus, semakin tinggi nilai barang semakin rendah tarif bea masuknya. Harus lebih hati hati untuk menangani kasus kasus seperti ini.
- d. Setiap negara harus memutuskan, struktur tarif secara keseluruhan, rata rata tarif dan rata rata tertimbang tarif, dan tarif tarif lain yang dianggap “tinggi”, akan sangat berharga dipelajari.

c. Tarif sebagai Faktor Resiko¹⁸⁷

Jelasnya, pada saat tarif bea masuk bebas atau menggunakan tarif spesifik, penetapan nilai pabean tidaklah menjadi masalah yang signifikan. Namun demikian, pada saat tarif bea masuk tergantung pada nilai pabean, maka hal ini akan menjadi situasi yang sangat berbeda.

Tarif bea masuk yang tinggi selalu mengandung resiko karena meskipun ketika harga rendah. Tariff bea masuknya 100% membuat resiko kehilangan penerimaan menjadi signifikan.

Demikian juga, setiap negara harus menetapkan aturan daftar bea masuk yang dikategorikan tinggi dalam struktur tarif. Misalnya, pada saat tarif rata rata bea masuk di negara tersebut sebesar 4% atau kurang, maka tarif 20% dapat dikategorikan tinggi.

4. Negara asal barang¹⁸⁸

¹⁸⁷ Ibid hal 125.

¹⁸⁸ Ibid.

- a. Dimana barang diproduksi, dikembangkan atau dibuat dapat menjadi salah satu faktor dalam menentukan resiko pada saat penghitungan nilai pabean suatu barang.
- b. Jelasnya, biaya untuk memproduksi dan menjual barang tersebut untuk tujuan ekspor akan bervariasi antar setiap negara.
- c. Tetapi faktor ini barang kali akan lebih bermanfaat apabila dipertimbangkan dalam konteks nasional. Ini bukan berarti sebagai kesempatan untuk menilai setiap negara tetapi lebih kepada penghitungan yang didasarkan pada pegalaman, yang mengindikasikan barang tertentu dari asal tertentu umumnya dapat menuntun kepada masalah atau resiko.
- d. Faktor ini tidak mesti berdiri sendiri tetapi dapat dipantau berdasarkan faktor lain, khususnya “pembuat barang/atau penjual” dan/atau “komoditi rawan” yang akan didiskusikan dibawah ini (bagian 10).

d. Negara asal sebagai Faktor Penerima Resiko¹⁸⁹

Asal barang boleh dan bisa tidak menjadi faktor yang signifikan. Secara umum, barang dapat diproduksi di beberapa negara pada biaya yang berbeda beda. Pada saat mempertimbangkan biaya tenaga kerja , ketersediaan bahan baku, biaya impor, mempertimbangkan pajak, ketersediaan sumber daya manusia yang mampu, dan kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Semua faktor faktor ini dan banyak lagi yang mempengaruhi harga dalam suatu negara.

¹⁸⁹ Ibid hal 126.

Pertimbangan harus diarahkan pada kemungkinan *trans shipment* atau pengalihan. Negara asal barang dapat menjadi bukan negara pengekspor barang untuk kepentingan bea dan cukai.

Setiap negara harus menentukan negara negara asal yang menimbulkan masalah dalam kaitan importasi. Tanpa menghiraukan sistem penetapan nilai pabean terdahulu, ada beberapa contoh dimana barang dari negara tertentu selalu menimbulkan masalah, atau barang tertentu dari negara tertentu selalu menimbulkan masalah, atau barang tertentu dari negara tertentu sebagai masalah. Ini menjadi keputusan yang terbaik buat bea dan cukai. Faktor ini sebaiknya dipertimbangkan bersama sama dengan faktor faktor lainnya.

5. Pabrikan/Penjual¹⁹⁰

- a. Juga, pengalaman akan ikut dalam menentukan kondisi dari faktor ini. Apakah pabrikan khusus dari mesin impor mempunyai catatan permasalahan penetapan nilai pabean?
- b. Apakah pabrikan mempunyai catatan tidak memberitahukan seluruh biaya (misalnya: *assists*, *royalti*, *proceeds*, komisi, pembayaran tidak langsung dll.)
- c. Atau, memperhatikan faktor lain, mengapa pabrikan dari kendaraan bermotor tiba tiba menjual mesin untuk peralatan kantor? Atau mengapa penjual suatu barang yang diproduksi di negara X mulai membeli barang itu di negara Y?

¹⁹⁰ Ibid.

- d. Atau, ketika memperhatikan faktor ini dalam kaitan dengan negara asal, akan diketahui pabrikan yang menjual suatu barang, yang tidak berasal dari negara si pabrikan.

e. Pabrikan Sebagai Faktor Resiko¹⁹¹

Memperhatikan importasi sebelumnya untuk melihat apakah pabrikan tertentu atau penjual mempunyai masalah dengan bea dan cukai pada masa lalu. Apabila ada masalah yang telah diproses sebelumnya, ini akan membuat pabrikan atau penjual menjadi kandidat utama untuk diteliti. Ini bukan berarti, sekali melakukan kesalahan maka akan salah terus, tetapi kesalahan ini mengimplikasikan adanya resiko penjual.

Beberapa faktor faktor yang dipertimbangkan, harus mengikutsertakan kegagalan/kesulitan dalam memberitahukan seluruh biaya. Diakui, beberapa dari faktor ini adalah didasarkan pada penetapan nilai pabean oleh WTO, tetapi beberapa juga harus dapat diaplikasikan pada BDV dan sistem nasional yang ada.

Mengapa pabrikan dari produk X tiba tiba mulai menjual produk Y? Ada kemungkinan yang dapat diterima; khususnya apabila X dan Y adalah saling berhubungan. Tetapi hal ini mungkin baru cukup signifikan dengan melakukan wawancara/penelitian. Atau, apabila pabrikan tiba tiba mengubah sumber bahan bakunya dan tidak mengubah harga jualnya.

Dalam hal pabrikan menawarkan barang yang bukan bersumber/berasal dari negara pabrikan. Ini khususnya untuk kasus kendaraan bermotor. Pabrikan menjual kendaraan X dan ketahui bahwa kendaraan kendaraan

¹⁹¹ Ibid.

tersebut tidak diproduksi oleh pabrikan tersebut atau perusahaan lain di negeri itu. Atau apabila bahan baku yang ditawarkan tidak bersumber di negara itu.

Atau, secara nyata tidak memiliki catatan atas pengapalan yang berasal dari pabrikan atau penjual. Ini sendiri dapat menjadi alasan yang signifikan untuk dilakukan pengawasan.

6. Importir¹⁹²

- a. Sama seperti yang diperhatikan pada pabrikan/penjual, juga harus dilihat pada importir, ia sebagai pelaksana dari importasi.
- b. Apa yang perlu diketahui tentang importir? Apakah ia mempunyai catatan dengan bea dan cukai, tentang catatan negatif?
- c. Atau apakah importir baru dan tidak informasi tentang importir itu atau tentang kegiatannya? Importir baru barangkali sebaiknya diperhatikan sebagai resiko jika hanya apabila ia tidak kenal.
- d. Atau mempertimbangkan, situasi apabila importir seputra tiba tiba mulai mengimpor komoditi lain, yang tidak berkaitan dengan bisnis intinya. Ini bisa jadi benar tetapi harus dibuktikan minimal dengan mewawancarai importir tersebut.

f. Importir Sebagai Faktor Resiko¹⁹³

Sama pentingnya dengan keberadaan pabrikan, dan barangkali mungkin lebih penting importir. Dalam banya kasus, bea dan cukai membutuhkan registrasi importir dan memberikan nomor khusus bagi importir sebagai

¹⁹² Ibid hal 127.

¹⁹³ Ibid.

nama/identitas. Nama atau nomor, sangat penting untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya si importir.

Apa yang bea dan cukai diketahui tentang seorang importir? Jika ia mempunyai catatan, apakah itu catatan baik atau buruk? Apabila baik, ini bukan suatu faktor yang perlu sebagai pertimbangan, tetapi bila buruk, maka bea dan cukai harus menindaklanjuti penelitian atas importasi importir tersebut.

Sebagaimana pabrikan, apabila tidak ada informasi tentang importir, maka ini berarti resiko. Hati hati memeriksa setiap importir baru dan apabila ia melakukan importasi, periksa dia secara *random* atau apabila transaksi importir tersebut mengalami perubahan yang signifikan.

Perubahan yang signifikan dapat terjadi, misalnya, apabila importir dengan impor yang teratur memasukan satu komoditi, memulai mengimpor komoditi yang berbeda khususnya apabila kedua barang itu tidak mengandung keterkaitan antara satu dengan yang lain.

7. Pihak pihak yang saling berhubungan¹⁹⁴
 - a. *The agreement* menempatkan penekanan khusus pada transaksi antara pihak pihak yang saling berhubungan. Ini harus jelas dibuktikan bahwa harga tidak dipengaruhi oleh hubungan tersebut.
 - b. Jelasnya, apabila suatu situasi sebelumnya telah selesai diperiksa, maka tidak ada kebutuhan untuk melanjutkan pemeriksaan kecuali bukti utama dari transaksi tersebut telah berubah.

¹⁹⁴ Ibid hal 128.

- c. Tetapi apabila transaksi antara pihak pihak yang saling berhubungan tersebut belum pernah diperiksa atau apabila pemeriksaan sebelumnya tidak lengkap, ini harus ditetapkan sebagai resiko yang signifikan.
- d. Dalam transaksi antara pihak pihak yang saling berhubungan, resiko dari manipulasi harga adalah besar. Hal ini tepat, khususnya pada kondisi *transfer pricing* dimana tidak ada perpindahan dana secara nyata.
- e. Kehati hatian harus dilakukan karena tidak seperti faktor faktor lain, mengingat tidak ada fakta yang jelas mengenai karakteristik yang dapat menentukan apakah dua pihak itu saling berhubungan. Apabila mempunyai nama yang sama ini mungkin merupakan petunjuk, tetapi tidak sebagai pembuktian. Identifikasi dari pihak pihak menjadi sangat penting.
- f. Faktor ini harus diperhatikan bersamaan dengan faktor faktor lain, khususnya, faktor 5 (pabrikan/penjual) dan 6 (importir).

g. Pihak Pihak yang berhubungan sebagai faktor resiko¹⁹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa transaksi antara pihak pihak yang saling berhubungan adalah agak khusus, di dalam hal ini harga harus ditetapkan dengan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan atau dengan mendekati harga pada database. Jelasnya, ini membutuhkan beberapa pekerjaan tambahan setelah pemberitahuan pabean diajukan sehingga setiap transaksi antara pihak pihak yang saling berhubungan harus diteliti. Pengecualian dapat terjadi apabila transaksi telah diperiksa dan disetujui sebelumnya. Transaksi

¹⁹⁵ Ibid.

berikutnya antara dua pihak pihak yang saling berhubungan hanya akan diperiksa lagi pada saat kena *random* atau apabila fakta dasar dari transaksi telah berubah secara material.

Transaksi pihak pihak yang saling berhubungan menawarkan kesempatan luas untuk manipulasi harga karena hubungan yang khusus antara pihak pihak sering keuntungan bukan motif utama. Sebagai catatan, hal ini benar terjadi khususnya pada kasus berkaitan dengan *transfer pricing* dimana uang mungkin tidak berpindah secara nyata tetapi kredit dan debet pada neraca yang berubah.

Pada beberapa negara, pertimbangan bea masuk tidak lebih utama dibanding dengan pajak internal atau penerimaan dalam negeri (atau *value added tax*) harga dipengaruhi oleh pertimbangan pajak dan pihak pihak yang berhubungan akan memberitahukan harga rekayasa yang rendah tergantung tarif pajak yang diterapkan.

Barangkali resiko yang lebih besar disini terletak tidak semata mata hanya pada fakta bahwa pihak pihak yang berhubungan, tetapi lebih pada pihak pihak saling berhubungan tetapi faktanya tidak beritahu atau diketahui. Dalam kasus kasus tersebut apabila penjual dan importir mempunyai kesamaan nama, ini menjadi awal yang baik untuk melihat lebih jauh masalah hubungan. Tetapi bagaimana jika tidak ada hubungan? Dan importir memberitahukan tidak ada hubungan? Mudah mudahan ada faktor lain yang akan muncul.

Importasi pertama antara pihak pihak yang berhubungan sebaiknya harus sudah diperiksa berdasarkan faktor 5 dan 6 dan pernyataan tentang hubungan

keduanya harus sudah dilakukan pada saat itu. Apabila tidak, faktor faktor lain pada akhirnya akan menuntun ke beberapa pemeriksaan setelah pengeluaran barang.

Pemeriksaan atau penelitian yang kurang mendalam pada kasus pihak pihak yang saling berhubungan dapat menimbulkan pengaruh yang lebih besar daripada transaksi yang tidak berhubungan. Satu kali bea dan cukai menempatkannya sebagai nilai transaksi dari barang tersebut pada impor pertama, pengiriman itu akan digunakan sebagai uji kewajaran untuk impor berikutnya. Oleh karena itu perlu diingatkan bahwa bea dan cukai dapat menciptakan model yang berbahaya apabila lupa tidak memeriksa pengiriman pertama, khususnya apabila nilai transaksi yang melibatkan pihak pihak yang saling berhubungan.

8. Penyesuaian *article 8*¹⁹⁶

a. Penyesuaian *article 8* meliputi:

- i. Komisi, biaya agen dan *packing*
- ii. *Assists*
- iii. *Royalti* dan biaya lisensi
- iv. *Proceeds* dari penjualan kembali
- v. Biaya pengangkutan dan asuransi

b. Resiko dari elemen elemen di atas agaknya diabaikan, misalnya elemen elemen tersebut tidak diberitahukan.

c. Jadi bagaimana elemen elemen tersebut dapat menjadi faktor resiko, khususnya apabila melihatnya secara negatif (tidak diberitahukan)?

¹⁹⁶ Ibid hal 129.

- d. Pertanyaan diatas akan lebih baik dijawab dalam konteks faktor faktor resiko dari komoditi yang sensitif. Komoditi tertentu menghadirkan kemungkinan yang lebih besar penyesuaian *article 8* daripada komoditi lain.
- e. Sebagai contoh, transaksi yang mengikutsertakan perantara akan menambah komisi, peralatan teknologi tinggi biasanya mempunyai *assists*, produk obat obatan umumnya mengandung royalti, dst.
- f. Jelasnya, apabila suatu transaksi mengindikasikan keberadaan penyesuaian berdasarkan *article 8*, transaksi tersebut harus menjadi subyek untuk diperiksa.

h. Penyesuaian Sebagai Faktor Resiko¹⁹⁷

Resiko yang nyata disini adalah kegagalan lebih kepada memberitahukan penyesuaian penyesuaian daripada mengajukan pemberitahuannya. Seperti pertanyaan tentang transaksi antara pihak pihak yang saling berhubungan, bagaimana penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya *assists* atau royalti atau *proceeds* atau komisi? Sebenarnya, ada dua jawabannya. Pertama dengan melihat pengapalan/pengiriman awal dimana penjual atau importir belum dikenal.

Kedua, komoditi tertentu biasanya menggunakan tipe penyesuaian tertentu dari pasal 8. Perlu didiskusikan hal ini dengan contoh contoh yang lain. Pertimbangkan pemberitahuan dari “komisi pembelian”. Tanpa adanya bukti, akan beresiko membiarkan importasi itu tanpa dilakukan pemeriksaan untuk

¹⁹⁷ Ibid.

menentukan apakah agen benar benar bekerja untuk keperluan pembeli/importir dan tidak untuk keperluan penjual.

Dan bagaimana tentang pasal 5 butir (3) huruf (e), (f), (g) Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, mengatur tentang penyesuaian untuk pengangkutan dan asuransi. Apabila suatu barang dinilai dalam basis CIF, secara teori, dapat dikatakan bahwa seluruh transaksinya harus diperiksa. Dan apabila tidak ada faktor lain yang dipertimbangkan, biaya pengangkutan saja tidak akan cukup untuk alasan untuk melakukan pemeriksaan. Alasan yang *valid* harus ada.

9. Proses perakitan¹⁹⁸

- a. Biasanya, pada saat suatu barang dikirim keluar negara pengimpor untuk dirakit di negara lain, harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar hanya mewakili biaya perakitan.
- b. Harga menjadi biaya dari material yang ditambah, upah dan pengeluaran umum.
- c. Namun demikian, dalam banyak contoh, importir (pembeli) mensuplai perusahaan perakitan dengan material, parts, dan komponen yang akan dirakit, juga mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perakitan. Keduanya harus dimasukan sebagai *assists*.
- d. Dalam kasus lain, importir berhubungan dengan pihak ketiga, yang mempunya perlatan perakita. Pembayaran harus dibuat apakah

¹⁹⁸ Ibid hal 130.

- kepada perusahaan perakitan secara langsung atau kepada pihak ketiga sebagai pemilik.
- e. Sebagai tambahan, biaya yang dikenakan untuk proses perakitan mungkin bukan biaya yang sebenarnya tetapi hanya estimasi yang didasarkan pada tahun sebelumnya. Pada masa akhir pembukuan, harga akan disesuaikan untuk menggambarkan perbedaan antara estimasi dan biaya sebenarnya dengan rekonsiliasi berikutnya.
 - f. Tak dapat dipungkiri bahwa proses perakitan mengandung resiko dan sebaiknya menjadi subyek untuk dilakukan pemeriksaan.

i. Proses Perakitan Sebagai Faktor Resiko

Faktor ini juga diperluas dengan memasukan barang yang dikirim keluar dari negara pengimpor untuk keperluan perbaikan atau perubahan dan kemudian dikembalikan. Dalam kedua kasus ini “harga” dari barang merepresentasikan harga untuk perakitan atau perbaikan dan bisa jadi tidak menggambarkan harga yang sebenarnya dari barang.¹⁹⁹

Dalam kasus proses perakitan, importir biasanya akan menyediakan bahan paku, komponen, parts, peralatan, dan cetakan/dies dan mesin untuk membantu pekerjaan perakitan. Atau, bantuan teknik dalam berbagai bentuk adalah lazim diberikan. Apabila ada hal hal yang diatas yang diberikan, dan disediakan secara gratis atau dengan biaya yang telah diturunkan, berarti harus dikenakan *assists* sesuai pasal 5 butir (3) PMK 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk. Ada juga kasus dimana perantara termasuk sebagai pemilik atau sebagai perakit. Pembayaran

¹⁹⁹ Ibid hal 131.

kemudian harus melalui perantara bea dan cukai harus dapat membuktikan apa perannya dalam transaksi tersebut.

Biasanya, pekerjaan perakitan cenderung menggunakan perkiraan biaya daripada biaya sebenarnya. Harga estimasi pada waktu tertentu atau setelah periode pembukuan, rekonsiliasi dilakukan antara harga yang benar benar terjadi atas material, tenaga kerja, pengeluaran umum, atau biaya *overhead* dengan harga estimasi. Kemudian importir akan membayar atau menerima perbedaan harga. Dengan demikian, elemen dari resiko disini adalah telah berlalu dan tindakan tindakan yang dilakukan harus dituntun mengikutinya.

10. Komoditi barang sensitif²⁰⁰

a. Barang dengan teknologi tinggi²⁰¹

1. Secara umum, barang teknologi tinggi berarti berteknologi mutakhir.

Barang teknologi tinggi termasuk ilmu sains atau peralatan kesehatan, komputer, penerbangan, peralatan komunikasi dll.

2. Resiko pada bagian ini umumnya termasuk dalam aplikasi *article 8*.

Biasanya, teknologi termasuk didalamnya *assists*, khususnya riset, pengembangan dan teknik.

3. Produksi dari suatu barang bisa saja mempunyai dua kontrak, satu kontrak untuk pengembangan dan satu lagi untuk produksi dan penjualan, dan harga yang diberitahukan tidak selalu mencantumkan kedua kontrak tersebut.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Ibid.

4. Dengan teknologi yang mutakhir, bea dan cukai dapat saja memasukan penggunaan paten dan biasanya paten memasukan pembayaran royalti dan biasa lisensi.

j. Barang Berteknologi Tinggi sebagai faktor resiko²⁰²

Resiko yang tinggi disini terletak pada penyesuaian menurut *article 8*, khususnya *assists* dan royalti. Tetapi tidak harus mengawasi/meneliti situasi ini dengan dua kontrak, misalnya satu untuk riset dan pengembangan dan satu lagi untuk produksi. Kontrak bisa jadi dan bisa tidak termasuk hanya pembeli dan penjual tetapi tidak termasuk pihak ketiga.

Dari sekian banyak jenis dari barang teknologi tinggi, biasanya semua itu adalah “satu jenis di antara banyak jenis” dan bisa saja tidak ada barang lain yang dapat diperbandingkan. Ini bukan berarti bahwa harus selalu membutuhkan perbandingan harga dengan barang yang layak diperbandingkan, tetapi sebaiknya meyakinkan diri melalui apakah semuanya klaim yang dibuat adalah *valid*.

b. Kendaraan bermotor²⁰³

1. Secara umum, kendaraan bermotor menggunakan *assists* untuk berbagai tipe dan berbagai tingkat. Prodksi kendaraan bermotor membutuhkan riset dan pengembangan yang besar, permesinan, pekerjaan seni, dan rencana serta sketsa gambar.
2. Kendaraan bermotor biasanya diproduksi dengan spesifikasi tertentu seperti rem antilock, berbagai tipe suspensi, standar keamanan dan

²⁰² Ibid hal 132.

²⁰³ Ibid hal 132.

- polusi yang harus dipatuhi, persyaratan ban, dll. Ini semua mengikutsertakan *assists* di dalamnya.
3. Importir dapat juga mempunyai keinginan khusus berkaitan dengan kendaraan dan bisa saja dilengkapi dengan komponen tertentu atau bagian tertentu didalamnya seperti radio dan CD player, ban, lampu, mesin, transmisi dll.
 4. Ditambah lagi, bahwa hampir semua produk kendaraan bermotor menggunakan cetakan untuk bermacam macam bagian bodi kendaraan termasuk *fenders dan bumpes, suspensi, chasis, bonnets*, dll. Cetakan ini juga dapat ditujukan untuk yang berwujud plastik atau juga metal.
 5. Produksi kendaraan bermotor dapat juga termasuk menggunakan peralatan dan dies yang disediakan importir.
 6. Walaupun secara individu tidak signifikan, impor kendaraan bermotor secara pribadi, untuk barang baru dan bekas, dapat juga menimbulkan masalah lain daripada persoalan *assits*.
 7. Penentuan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sangat sulit untuk dilakukan khususnya dalam kasus kendaraan motor bekas.

k. Kendaraan Bermotor Sebagai Faktor Resiko²⁰⁴

Ketika kondisi yang dijelaskan pada butir (1) sampai (5) di atas adalah benar, secara umum bea dan cukai akan mempunyai informasi jelas pada saat berhubungan dengan importir yang merupakan distribusi besar kendaraan

²⁰⁴ Ibid hal 133.

bermotor. Tetapi masalah akan ditemui pada pembeli skala kecil atau individual.

Situasi di atas dapat juga diterapkan ketika importir secara nyata mengimpor bagian yang digunakan untuk memproduksi kendaraan. Poin ini harus ditekankan. Atau importir mengimpor bagian dari kendaraan dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada produser kendaraan.

Masalah akan ditimbulkan dengan individu yang mengimpor kendaraan bermotor untuk keperluannya sendiri adalah banyak. Penetapan nilai pabean, khususnya kendaraan motor bekas yang diimpor adalah masalah. Study 1.1 instrument dari *technical committee on customs valuation* memberikan beberapa solusi.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bea dan cukai sebaiknya mempertimbangkan faktor ini bersama sama dengan faktor lain. Nilai akan menjadi faktor resiko apabila bea dan cukai tidak ingin untuk melakukan pemeriksaan terhadap importasi kendaraan bermotor. Tetapi memiliki catatan tentang importir akan menjadi sangat bermanfaat khususnya apabila impor secara pribadi berlangsung beberapa kali selama satu tahun.

c. perhiasan²⁰⁵

1. Perhiasan juga dapat menghadirkan banyak permasalahan dalam penetapan nilai pabean. Di pasar saat ini, perancang busana menjadi lebih menyatu dengan bidang perhiasan sehingga perhiasan mempunyai penggunaan merek dengan nama mereka yang berakibat pada pembayaran royalti.

²⁰⁵ Ibid.

2. Perhiasan dapat juga dirancang untuk spesifikasi tertentu dan memasukan *assists* seperti pekerjaan rancangan, seni dan sketsa.
3. Perhiasan dapat juga mengandung *assists* lain apabila importir memasok bahan baku (misalnya: emas, perak, batu permata jadi, dan setengah jadi, dll.) dan tidak memberitahukannya kepada bea dan cukai.
4. Nilai dari perhiasan tergantung tidak hanya pada desain atau nama tetapi juga material pembuatnya. Perbedaan nilai antara sepuhan emas dan perak dengan materi emas dan perak adalah sangat jauh. Perbedaan nilai antara 14, 18, dan 24 karat emas juga sangat signifikan.

1. Perhiasan Sebagai Faktor Resiko²⁰⁶

Permasalahan tentang perhiasan sangat menarik karena jumlah masalah yang ditimbulkannya. Bea dan cukai sebaiknya melakukan penelitian yang hati hati dan juga mempertimbangkan faktor lain dalam memutuskan.

d. elektronik²⁰⁷

1. barang elektronik dapat mengandung penggunaan *assists* sebagaimana biaya royalti dan lisensi. *Assists* seperti penyediaan bagian dan komponen, cetakan, riset, pengembangan, dan rekayasa adalah biasa terjadi.
2. Barang elektronik juga dapat mengandung penemuan dan paten serta mensyaratkan pembayaran royalti sebagai imbalannya.

²⁰⁶ Ibid.

²⁰⁷ Ibid hal 134.

e. Barang kimia dan obat-obatan²⁰⁸

1. Apabila ada satu jenis tertentu dari barang yang biasa dikatakan yang paling sering mengandung pembayaran royalti dan lisensi, maka itu adalah barang kimia dan obat-obatan.
2. Penggunaan “*brand names*” barang kali paling sering digunakan untuk jenis barang-barang ini. Sangat umum ditemukan perjanjian lisensi yang memasukkan tidak saja penggunaan merek tetapi juga hak distribusi dan pembuatan barang tersebut.
3. Dalam distribusi ini, biaya terkait dengan pembawaan suatu produk ke pasar biasanya menjamin pembayaran dalam bentuk royalti.

m. Barang Kimia dan Obat-Obatan Sebagai Faktor Resiko²⁰⁹

Masalah utama penetapan nilai pabean untuk barang kimia dan obat-obatan adalah royalti dan biaya lisensi. Namun demikian, masalah yang bukan penetapan nilai pabean juga barangkali sama signifikannya bagi bea dan cukai. Bea dan cukai mempunyai pertimbangan atas bahan baku berbahaya dan dengan obat-obatan suatu negara dapat meminta lisensi khusus dan proses pengujian serta bea dan cukai dapat juga ikut serta dalam pembatasan paten dan pemalsuan produk yang dipatenkan.

f. *Consumer Electronics*/Peralatan Elektronik²¹⁰

1. Kategori barang ini termasuk televisi, radio, VCR, video games, perlengkapan elektronik rumah tangga, peralatan komunikasi, *microcircuits, integrated circuit*, dll.

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid.

2. Banyak barang dari jenis tipe ini mempunyai penggunaan merek (*trademarks*) atau *trade name* penggunaannya memasukan pembayaran royalti.
3. Banyak tipe barang elektronik yang canggih termasuk *assists* di dalamnya seperti bagian, komponen, dan material demikian juga riset dan pengembangan.

g. Pesawat Terbang²¹¹

1. Jenis barang ini ditujukan kepada pesawat terbang komersial dimana berbeda dengan keperluan militer. Barang ini berlaku tidak hanya pesawat terbang untuk komersial tetapi jet pribadi, helikopter dan peralatan ruang angkasa (misalnya: roket, satelit, dll.)
2. Kontrak untuk investasi yang besar biasanya sangat rumit dan harga yang diberitahukan di dalamnya tidak selalu merefleksikan, jumlah uang yang dihabiskan untuk riset dan pengembangan.
3. Melihat pengeluaran untuk produksi pesawat terbang saat ini, sangat lazim terdapat konsorsium yang berbagi biayanya.
4. Pesawat terbang komersil besar (seperti: boeing, air bus, dll.) umumnya menggunakan *leasing* daripada membeli langsung. Berdasarkan *the agreement*, perjanjian *leasing* sangat sulit untuk dinilai barangnya, study 2.1 dari instrument of the *technical comittee on customs valuation* memberi petunjuk tentang hal ini.

h. Pakaian²¹²

²¹¹ Ibid.

²¹² Ibid hal 135.

1. Pakaian dapat menyebabkan permasalahan tersendiri, dimana bentuknya bervariasi tergantung pada tingkatan undang undang yang berlaku di suatu negara.
 2. Saat ini pakaian biasa diproduksi di beberapa negara. Kain di potong untuk di bentuk di suatu negara dan di jahit menjadi pakaian di negara lain. Oleh karena itu faktor ini harus dipertimbangkan berkaitan dengan “penjahitannya” dan “negara asal”.
 3. Apabila material, benang, renda, kancing, dll., di sediakan oleh importir maka *assists* adalah termasuk.
 4. Umumnya, tipe yang sama dari garment bervariasi harganya tergantung atas kainnya (misalnya: wol vs katun, katun vs sutra, serat buatan vs wol, dll.)
 5. Benang yang terbuat dari alam atau tumbuh tumbuhan harganya sedikit lebih mahal di bandingkan dengan benang buatan pada suatu negara dan kebalikannya mungkin saja terjadi di negara lain.
 6. Mengingat pakaian merupakan jantung dari industri mode, nama perancang menambah pendapatannya dan tidaknya nama label dapat mempengaruhi harga secara signifikan.
 7. Disamping itu, ada keberadaan nama perancang bisa jadi termasuk pembayaran royalti atau biaya lisensi (khususnya apabila hak untuk membuat dengan sebuah label adalah diberikan).
- i. Mesin dan bagiannya²¹³

²¹³ Ibid.

1. Mesin dan bagiannya dapat mempunyai masalah dengan *assists*. Rancangan khusus dapat disediakan untuk membuat mesin sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir. Dalam beberapa kasus, material, komponen, dan bagian juga dapat disediakan oleh importir.
 2. Mesin kadang kadang menyatu dengan patennya atau seseorang akan membuat sebuah produk dimana di dalamnya telah termasuk proses patennya. Selanjutnya, pembelian mesin tersebut termasuk royalti.
 3. Mesin dengan ukuran besar yang bisa jadi tidak mungkin untuk dikirim dalam satu kali pengapalan dapat dipisah menjadi beberapa pengapalan dan harga yang diberitahukan harus merefleksikan porsi nilai dari setiap pengapalan.
 4. Disamping masalah klasifikasi, dalam hal mesin yang tidak di rakit, diberitahukan sebagai “bagian” dapat mempengaruhi nilai. Sebaliknya, pengapalan atas bagian bagian yang diberitahukan sebagai mesin yang belum dirakit dapat juga menimbulkan akibat yang negatif dalam penetapan nilai pabean barang tersebut.
- j. Komputer dan bagiannya²¹⁴
1. Sebagian besar atas barang barang yang berkaitan dengan “teknologi tinggi” pada sebelumnya dibahas juga berlaku untuk barang ini. Tetapi komputer juga menghadirkan masalah masalah unik. Sebagai contoh, ketika membeli komputer, program apa yang telah ada pada komputer tersebut dan juga apakah sudah termasuk dalam harganya?

²¹⁴ Ibid hal 136.

Atau apakah program yang termasuk dengan mesin komputer merupakan subyek negosiasi terpisah?

2. Bisa saja komputer dan programnya didesain, khusus untuk importir. Mungkin juga importir harus menyediakan desain spesifikasinya sendiri atau desain tersebut merupakan subyek negosiasi terpisah.
3. Penetapan nilai pabean akan menjadi makin rumit apabila yang diimpor adalah “replika” dimana identik dengan merek yang sudah terkenal yang mengharuskan harga yang lebih tinggi.
4. Komputer bisa saja menjalani perakitan di lebih dari satu negara.
5. Barang barang di luar mesin komputer (printer, CRT, *keyboard*, *mouse*, *external drives*, *modems*, dll.) dan *software* juga mempunyai masalah, khususnya apabila pembelian *hardware* mempengaruhi harga dari barang barang di luar mesin komputer dan *software*.
6. *Software* dapat menjadi subyek dari *trademark*, *copyright* atau paten yang mempersyaratkan pembayaran dengan royalti dan biaya lisensi.

3.4 Proses dan selektifitas²¹⁵

Selektifitas adalah suatu proses seleksi dari data masukan/pemberitahuan yang akan diperiksa berdasarkan suatu set kriteria khusus. Kriteria atau faktor resiko telah didiskusikan di atas. Selektifitas yang dapat dilaksanakan secara manual atau sistem otomatis. Jelasnya, sistem otomatis akan lebih efisien tetapi memperlakukan semuanya sama, faktor faktor yang ada sama untuk kasus yang berbeda.

²¹⁵ Ibid.

n. Selektifitas Sebagai Faktor Resiko²¹⁶

Sekali telah ditetapkan apa yang menjadi elemen dari resiko, selektifitas akan berjalan dengan didasarkan pada elemen elemen itu. Dalam sistem otomatis, ini akan menjadi relatif sederhana sebagaimana elemen elemen yang di program di dalamnya, data masukan/pemberitahuan, dan komputer akan memberikan keputusan. Namun demikian, sistem manual juga efektif, akan tetapi perlu tenaga kerja dan banyak menghabiskan waktu.

Dibawah ini beberapa “faktor selektifitas” sebagai berikut:

1. Nomor dan nama importir
2. Negara asal.
3. Nomor klasifikasi barang.
4. Nama eksportir
5. Nilai yang diberitahukan.

Kelima faktor selektifitas adalah standar yang fair dan akan meliputi hampir semua faktor resiko yang telah didiskusikan sebelumnya dan banyak lagi yang belum dipaparkan. Sudah tentu, ini mengasumsikan bahwa data masukan/format pemberitahuan digunakan memasukan kelima elemen data.²¹⁷

3.4.1 Pemeriksaan sebagai faktor selektifitas

1. Nama importir atau nomor identitas importir²¹⁸

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ Ibid hal 137.

²¹⁸ Ibid.

- a. Apakah diidentifikasi dengan nama atau nomor, apabila seorang importir telah diidentifikasikan sebagai importir “resiko tinggi” (catatan masa lalu tentang pemalsuan invoice, *over/undervaluation*, uraian barang salah, dll.) maka transaksinya harus secara rutin diperiksa.
- b. Demikian juga, apabila seorang importir tidak dikenal, misalnya importir baru, perlu untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Asal barang²¹⁹

- a. Setiap institusi kepabeanan pasti mempunyai permasalahan permasalahan yang berulang ulang dengan importasi barang dari negara atau wilayah tertentu. Masalah ini biasanya dilakukan melalui transshipment atau dengan metode lain yang mengaburkan asal dari barang impor.
- b. Atau catatan masa lalu yang menggambarkan bahwa pengirim/importir barang dari negara atau wilayah tertentu umumnya mempunyai harga yang rendah dengan tanpa penjelasan yang nyata tentang harga tersebut. Tanpa membedakan semua pengapalan dari negara atau wilayah seperti di atas harus menjadi subyek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Nama pabrikan atau identitas²²⁰

Sebagaimana kasus importir, beberapa pabrikan mempunyai catatan sebagai “beresiko tinggi”. Apabila dikenal, pengapalan dari setiap pabrikan tertentu harus diseleksi sebelum diperiksa lebih lanjut.

²¹⁹ Ibid.

²²⁰ Ibid.

4. Pemberitahuan nilai pabean²²¹

- a. Kriteria ini mungkin kelihatannya unit bagi setiap institusi kepabeanan. Seharusnya ada semacam “pembatasan”, berdasarkan nilai, untuk setiap data masukan/pemberitahuan yang tidak akan rutin untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Namun demikian, kriteria khusus ini harus dilihat berkaitan dengan kriteria selektifitas lainnya untuk menghindari kemungkinan manipulasi nilai pabean dengan menghindari pemeriksaan.
- c. Kriteria nilai harus realistik, dengan mempertimbangkan usaha yang dilakukan atau yang akan dihabiskan dalam rangka kemungkinan pengembaliannya. Sama seperti bisnis, pemerintah tidak seharusnya mengeluarkan uang sebesar Rp 100 untuk memungut dana Rp 10.

5. *Nomenklatur*²²²

- a. Pada setiap nomenklatur (HS atau yang lain), terdapat tariff bea masuk. Dalam hal ini tariff bea masuk tersebut bebas atau tariff spesifik, maka nilai tidak menjadi masalah dan tidak banyak hasil yang akan didapat dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengapalan barang ini apabila nomor tariff diverifikasi.
- b. Namun demikian, dalam hal tarif bea masuk tinggi, atau dalam hal tarif bea masuk tergantung kepada nilai (misalnya “apabila nilai lebih dari ...” atau “apabila nilai dibawah ...”), pemeriksaan harus disesuaikan.

²²¹ Ibid.

²²² Ibid hal 138.

- c. Aturan lain tertentu untuk barang “teknologi tinggi” dapat diidentifikasi apakah dilakukan pemeriksaan karena kemungkinan kesalahan penambahan sebagaimana di atur dalam pasal 8.1 (b) dan (c) *agreement*.
- d. Disamping itu, nomor dapat dimanfaatkan untuk dikaitkan dengan faktor faktor lain.
- e. Sebagai contoh, bea dan cukai boleh berkeinginan untuk melakukan pemeriksaan atas semua data masukan/pemberitahuan untuk nilai melebihi jumlah tertentu khusus untuk daftar nomor *nomenklatur* tertentu.
- f. Atau, pemeriksaan atas daftar nomor *nomenklatur* atas impor dari negara X. Atau, pemeriksaan impor dari importir Y berdasarkan nomor *nomenklatur* tertentu.

a. Penggunaan *Nomenklatur* untuk selektifitas²²³

Dalam banyak kasus, nomor *nomenklatur* akan mengarahkan hampir semua faktor resiko. Bea dan cukai dapat memiliki sebuah daftar nomor pos tarif dan kemudian mengidentifikasi nilai tertentu, negara asal barang, nama importir/eksportir terhadap setiap nomor tarif.

6. Pemeriksaan secara acak²²⁴

Setiap sistem seleksi harus memiliki unsur pemeriksaan secara acak. Hal ini dapat diprogram secara otomatis maupun manual, dimana dari setiap 50 atau 100 pemberitahuan dapat dipilih beberapa secara acak.

²²³ Ibid.

²²⁴ Ibid.

b. Penggunaan Sistem Acak²²⁵

Setiap sistem seleksi harus memiliki unsur pemeriksaan secara acak. Ini berarti, dalam setiap X kali importasi harus ditetapkan beberapa yang harus diperiksa dengan mengabaikan faktor lainnya. Diharapkan hal ini dapat membantu dalam mencegah kesalahan atau keengganan dari beberapa importir.

7. Pemeliharaan²²⁶

Setiap sistem seleksi harus dikembangkan dan dipelihara pada tingkat kantor pusat, dengan pelaksanaan secara lokal. Kantor pelayanan diizinkan untuk melaksanakannya secara fleksibel, selama tidak mengubah tujuan dari sistem. Kriteria pemilihan harus di tuangkan dalam dasar aturan tetap.

c. Pemahaman Pimpinan Dalam Sistem Seleksi²²⁷

Setiap sistem seleksi harus disetujui oleh pimpinan, dengan kondisi yang bebas resiko bagi petugas penilai. Ini berarti, jika suatu pemberitahuan yang salah tetapi tidak dipilih untuk diperiksa karena tidak ada unsur yang terpenuhi untuk dipilih secara selektif, maka petugas penilai tidak harus dikenai sanksi. Dengan kata lain, petugas penilai harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi resiko dan kriteria pemilihan, tetapi tidak bertanggung jawab atas pemberitahuan yang dengan cara tertentu menghindar dari sistem.

²²⁵ Ibid.

²²⁶ Ibid hal 139.

²²⁷ Ibid.

Jika pimpinan tidak berkenan dengan “resiko” yang timbul dengan membiarkan masalah terselesaikan, maka seluruh sistem akan hancur. Bila petugas harus bertanggung jawab dalam setiap tugas yang dibebankan kepadanya, ia akan selalu memeriksa 100% tugas tersebut. Ini akan menjadi kebanggaan tersendiri.

Petugas yang bertanggung jawab atas penilaian dan pemeliharaan daftar harus memiliki standar periode pemeriksaan kembali dari daftar tersebut, baik untuk menambah atau menghilangkan data. Daftar tersebut relatif tidak berguna jika tidak diperbaharui.

8. Lain Lain²²⁸

- a. Sistem pemilihan dapat dilakukan secara otomatis maupun manual. Intinya untuk mengidentifikasi importasi mana yang memiliki resiko tinggi dan mengembangkan pemeriksaan dari informasi tersebut untuk mencegah timbulnya kerugian negara.
- b. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem otomatis memiliki keuntungan lebih cepat dan mengurangi kecenderungan salah. Tetapi sistem manual dapat pula diterapkan. Jenis sistem apapun yang digunakan. Kriteria pemeriksaan harus tetap dirahasiakan. Kriteria tersebut harus cukup fleksibel untuk diubah sesuai dengan perubahan kondisi perdagangan.

²²⁸ Ibid.

d. Kerahasiaan²²⁹

Kerahasiaan daftar resiko harus dijaga. Jika importir mengetahui isi dari daftar tersebut, ia dapat membuat pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam daftar untuk menghindari pemeriksaan. Daftar ini mungkin juga dikombinasikan dengan daftar yang serupa untuk tujuan pemberitahuan dan pengeluaran barang. Dengan teori yang sama berdasarkan *risk assessment*, bea dan cukai tidak perlu melakukan pemeriksaan barang pada setiap pemasukan/pemberitahuan barang.

3.5 Alur manajemen resiko²³⁰

Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, proses manajemen resiko untuk perdagangan terdiri dari atas empat langkah, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi
- b. Mengidentifikasi, menganalisa, dan menghitung resiko
- c. Menggunakan perhitungan resiko dalam urusan kepabeanan.
- d. Melakukan evaluasi atas resiko yang telah terjadi dan mengkomunikasikannya kembali pada fase informasi.

Dalam menempatkan pendekatan manajemen resiko dalam prosedur pengeluaran barang, kita telah mendiskusikan sebelumnya beberapa elemen yaitu; pemusatan informasi, identifikasi area resiko penerimaan, faktor faktor resiko penerimaan, dan proses selektifitas.

²²⁹ Ibid.

²³⁰ Ibid hal 140.

Tugas terakhir dari pendekatan manajemen resiko adalah memberikan kembali informasi ke dalam alur manajemen resiko. Hasil dari pemeriksaan pemberitahuan pabean yang diseleksi berdasarkan hasil identifikasi resiko dapat berbeda dengan apa yang diharapkan. Hasilnya harus dianalisa dan direfleksikan pada proses manajemen resiko selanjutnya. Manajemen resiko adalah aktifitas yang berkesinambungan. Suatu kali dimulai, maka jangan pernah berhenti. Kalau tidak, maka proses manajemen resiko harus dimulai dari awal lagi.

4. Database Harga (DBH)²³¹

4.1 Verifikasi Pemberitahuan Nilai Pabean dengan Menggunakan DBH²³²

Dengan diberlakukannya *WTO Valuation Agreement*, pengalaman menunjukan bahwa administrasi sangat bergantung pada metode I (Nilai Transaksi) untuk menetapkan harga suatu barang impor. Nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dan dapat dibuktikan kebenarannya dari pemberitahuan importir yang jujur.

Pengawasan atas hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan program yang memadai pada tahap pengeluaran barang impor, verifikasi maupun audit. Untuk mengatasi tidak terpenuhinya program tersebut (misalnya *under valuation*, pemberitahuan potongan harga yang salah), bea dan cukai perlu alat canggih yang dapat membantu saat menghadapi pemberitahuan nilai pabean yang terlalu rendah. Hal ini biasana terjadi saat importasi produk baru yang pernah diimpor sebelumnya.

²³¹ Ibid.

²³² Ibid.

4.2 Evaluasi Terhadap Penggunaan DBH Berdasarkan *the agreement*²³³

Dibawah ini digambarkan bagaimana database harga dapat digunakan.

a. Metode Nilai Transaksi²³⁴

Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, kenyataan bahwa penilaian barang impor berdasarkan metode nilai transaksi oleh importir dengan menggunakan sistem *self of assessment* tidak berarti bahwa bea dan cukai secara otomatis menerima nilai yang diberitahukan. Untuk menerima nilai transaksi harus dipenuhi persyaratan bahwa pembayaran total harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, harus diberitahukan secara benar.

Untuk memeriksa nilai pabean yang diberitahukan, pertama tama bea dan cukai harus mengecek elemen elemen dasar dalam pemberitahuan berdasarkan data transaksi impor yang lalu serta sifat dari barang tersebut.

Teknik verifikasi bea dan cukai yang modern menyediakan parameter *range* harga dengan sistem komputerisasi pada pengeluaran barang impor dan secara tepat akan memberi tanda apabila nilai pabean terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jika nilai pabean diberitahukan terlalu rendah maka bea dan cukai harus melakukan perbandingan harga. Inilah sebabnya mengapa bea dan cukai diharapkan dapat membuat DBH yang bertujuan sebagai data harga pembanding.

Namun demikian, walaupun nilai pabean diberitahukan lebih rendah dari DBH tidak berarti bea dan cukai dapat mengabaikan nilai transaksi dan

²³³ Ibid.

²³⁴ Ibid.

menggunakan metode selanjutnya. Bea dan cukai harus memeriksa berbagai kondisi dan syarat penjualan. Apabila kondisi atau syarat yang ditetapkan mempengaruhi harga nilai barang impor maka bea dan cukai dapat menggugurkan nilai transaksi dengan menggunakan metode selanjutnya. Untuk itulah DBH dapat digunakan hanya untuk menentukan apakah nilai pabean yang diberitahukan perlu pemeriksaan lebih lanjut.

b. Metode nilai transaksi dari barang identik atau serupa²³⁵

Pada saat bea dan cukai dan importir tidak dapat menggunakan metode nilai transaksi untuk menetapkan nilai pabean, *agreement* perlu identifikasi nilai transaksi dari barang identik atau barang serupa yang diimpor pada saat yang hampir bersamaan. Untuk itu sumber informasi harus berasal dari pemberitahuan impor terhadulu yang nilai transaksinya diterima. Pertama tama importir harus menyediakan harga barang identik atau serupa. Apabila importir tidak dapat menyediakan data tersebut, maka apabila tersedia data di bea dan cukai maka data ini dapat digunakan. Ini berarti bahwa bea dan cukai harus membut data referensi harga yang efektif berdasarkan data transaksi impor terhadulu.

Apabila hal itu dapat dilakukan, maka bea dan cukai menggunakan data tersebut untuk metode nilai transaksi dari barang identik atau barang serupa. Namun demikian masalah lain akan timbul. Sebagai contoh, bagaimana bea dan cukai dapat menyediakan informasi yang meyakinkan sesuai dengan pasal 10 *agreement*. Sangat sulit bagi bea dan cukai untuk menentukan nilai pabean untuk produk baru atau barang impor yang belum pernah di impor

²³⁵ Ibid hal 141.

sebelumnya. Sebagai tambahan, hal ini terjadi untuk kasus barang impor yang jumlah dan tingkat perdagangan berbeda.

Berdasarkan *agreement*, penyesuaian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun tanpa kerjasama dari importir akan sulit untuk menyesuaikan nilai pabean dengan benar. Pada awalnya, menentukan nilai pabean dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik atau serupa kelihatan seperti solusi yang mudah jika bea dan cukai memiliki akses ke database harga. Permasalahan yang timbul akibat kesulitan menggunakan metode ini dan masalah kerahasiaan, pekerjaan akan sulit tanpa bantuan dari importir. Dalam hal ini, harus dicatat bahwa importir dari barang identik atau serupa pada umumnya tidak ingin mengungkapkan nilai barang impor yang sesungguhnya kepada bea dan cukai.

c. Metode nilai Deduktif²³⁶

Apabila metode sebelumnya tidak dapat digunakan maka bea dan cukai dapat menggunakan metode nilai deduktif. Berdasarkan metode ini, nilai barang identik atau serupa dapat digunakan untuk menghitung nilai pabean. Untuk itu DBH sebagaimana diuraikan diatas masih relevan untuk digunakan. Pada praktiknya metode ini sangat jarang digunakan. Pada saat importir harus menyerahkan data tentang biaya biaya yang ditanggungnya setelah importiasi sebagai elemen untuk pengurangan harga dalam menghitung besarnya nilai pabean. Pada tahap ini DBH dapat digunakan untuk membantu bea dan cukai dalam menetapkan nilai yang tepat.

²³⁶ Ibid hal 142.

d. Metode nilai Komputasi²³⁷

Metode ini hanya dapat digunakan apabila importir dapat menyediakan seluruh data untuk memproduksi barang impor. Metode ini dapat digunakan apabila importir mempunyai kewenangan untuk mengontrol eksportir. DBH tidak dapat membantu dalam penetapan nilai pabean berdasarkan metode komputasi.

e. Metode fallback²³⁸

Dalam metode ini DBH akan sangat membantu bea dan cukai dan importir. Namun harus disadari bahwa harga yang ditetapkan tidak boleh berdasar atas metode nilai pabean yang dilarang dalam pasal 7.2 *WTO Valuation agreement*.²³⁹

f. Pertimbangan dalam pembuatan DBH²⁴⁰

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa DBH digunakan untuk:

- a. Meningkatkan kewaspadaan bea dan cukai mengenai kemungkinan harga yang diberitahukan tidak benar (lebih tinggi atau lebih rendah), dan.

²³⁷ Ibid.

²³⁸ Ibid.

²³⁹ Article 7.2 WTO Valuation Agreement “no customs value shall be determined under the provisions of this Article on the basis of:

- (a). the selling price in the country of importation of goods produced in such country
- (b). a system which provides for the acceptance for customs purposes of the higher of two alternative values
- (c). the price of goods on the domestic market of the country of exportation
- (d). the cost of production other than computed values which have been determined for identical or similar goods in accordance with the provisions of Article 6
- (e). the price of the goods for export to a country other than the country of importation
- (f). minimum customs values, or.
- (g). arbitrary or fictitious values.

²⁴⁰ Ibid.

- b. Memberikan petunjuk bagi bea dan cukai mengenai besarnya perbedaan harga yang diberitahukan dengan nilai atau harga pasar dari barang impor terdahulu.

Untuk membuat DBH diperlukan banyak sumber daya manusia, juga konsistensi untuk terus meng *up date* DBH dengan data terakhir yang ada. Dalam hal tidak terdapat data impor terdahulu, bea dan cukai harus mencari informasi harga pasar. Saat ini bea dan cukai dapat mencari data dari jutaan bea dan cukai menggunakan alat canggih untuk mencari data harga komoditi yang relevan untuk digunakan, berikut data referensi lainnya yang berharga untuk keperluan nilai pabean. Apapun data harga yang didapat, pertanyaannya yang seringkali timbul adalah bagaimana bea dan cukai memberikan alasan mengapa mereka menolak harga yang diberitahukan oleh importir.

Pada praktiknya, ada dua pendekatan untuk memecahkan masalah verifikasi. Yang pertama adalah *Post Clearance Audit (PCA) System*, dimana data transaksi impor terdahulu akan diperiksa oleh auditor berikut data akuntansi dan dokumen korespondensi yang disimpan perusahaan. Untuk tujuan ini, target perusahaan dipilih dari database bea dan cukai.

Pendekatan yang kedua adalah verifikasi harga yang lengkap terhadap perusahaan pada saat pengeluaran barang, apabila PCA tidak cocok digunakan terhadap jenis importasi tertentu, contohnya : perusahaan kecil, importir musiman dan perusahaan lokal yang bisnis terbatas. DBH Khusus untuk perusahaan kecil tersebut terbukti sesuai relatif kecil jika dibandingkan dengan total volume impor nasional, administrasi bea dan cukai perlu

memperhitungkan efektifitas dan untung rugi dalam menerapkan DBH khusus ini, dan lebih memilih untuk melakukan pendekatan, pemenuhan manajemen terhadap importir tersebut dari sudut pandang pemasukan barang secara keseluruhan daripada hanya memandang dari segi nilai semata.

E. Bagaimana Kendala dan Upaya Yang Dilaksanakan Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Melaksanakan Pungutan Bea Masuk Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan?

1. Pelanggaran nilai pabean (*Valuation Fraud*) dan langkah langkah untuk menanggulangnya²⁴¹

1.1 Pendahuluan²⁴²

Tidak ada definisi yang tepat untuk mengartikan *valuation fraud*. diperlukan penafsiran yang tepat karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan mungkin pula menyangkut kriminalitas. Karena itu diperlukan pengertian yang tegas dalam undang undang.

Bagaimanapun, definisi yang dianggap tepat akan berbeda untuk tiap tiap administrasi bea dan cukai sehingga tidak akan ada satu definisi yang sama. Oleh karena itu sangat penting bagi tiap pegawai yang terlibat dalam nilai pabean untuk memperhatikan definisi *fraud* sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku.

Penafsirannya dapat berbeda beda, namun kita dapat menjelaskannya dalam istilah yang paling umum digunakan. Pada intinya *fraud* dapat

²⁴¹ Ibid hal 143.

²⁴² Ibid.

diartikan penipuan atau menyajikan fakta yang tidak benar. Dapat diberikan dalam bentuk pertanyaan atau pengumuman secara lisan maupun tertulis atau dalam dokumen pabean.

Bentuk kendala yang di alami oleh bea dan cukai adalah dengan banyaknya pelanggaran yang berupa “perbuatan”, misalnya memberitahukan fakta yang diketahui secara keliru, atau tindakan berupa “kelalaian/tidak mencantumkan”, misalnya tidak mencantumkan atau mengabaikan fakta tertentu yang berhubungan dengan barang impor. Yang termasuk dalam definisi ini antara lain menyatakan tidak benar agar dapat mengimpor barang yang dilarang atau dibatasi. Atau yang paling sering adalah membuat pernyataan tidak benar untuk menghindari bea masuk dan pajak impor, baik sebagian maupun keseluruhan. Dibawah ini diuraikan berbagai bentuk praktik pelanggaran yang berhubungan dengan nilai pabean serta metode untuk medeteksi serta menanggulangnya.

1.2 Motif pelanggaran²⁴³

Dalam setiap pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum, selalu ada motif yang melatarbelakanginya. Dalam kaitannya dengan kepabeanan, motif yang paling sering adalah yang berhubungan dengan keuntungan lebih seperti:

- a. Untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak impor lainnya.
- b. Untuk mengimpor barang yang dilarang atau dibatasi.

²⁴³ Ibid.

- c. Dengan sengaja memberitahukan negara asal yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan perjanjian perdagangan atau untuk menghindari larangan perjanjian perdagangan tertentu.
- d. Untuk memperoleh harga yang kompetitif
- e. Untuk memasuki pasar baru dengan persaingan yang sangat ketat
- f. Keinginan untuk mengurangi pajak fiskal dalam negeri.

1.3 Jenis jenis pelanggaran²⁴⁴

1 *Undervaluation*²⁴⁵

a. Alasan alasan²⁴⁶

Pelanggaran jenis ini yang paling sering dilakukan. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, seperti:

1. Untuk menimalisir jumlah bea masuk yang harus dibayar berdasarkan *bea advalorem*, besarnya bea masuk yang dibayarkan sangat bergantung pada besarnya nilai pabean. Karena sebagian negara memberlakukan *bea advalorem* maka pelanggaran jenis ini paling sering dilakukan
2. Adanya perbedaan antara *formal entry* dan *informal entry*

Di beberapa negara, terdapat perbedaan yang jelas antara *forma entry* dan *informal entry*, yang disebabkan oleh nilai dan/atau penggunaan barang. Proses *informal entry* digunakan pada harga barang yang rendah dengan menggunakan pengapalan perorangan, baik yang melewati pemeriksaan menyeluruh

²⁴⁴ Ibid hal 144.

²⁴⁵ Ibid.

²⁴⁶ Ibid.

maupun sekedar pemeriksaan sebagian. Sedangkan prosedur *formal entry* memerlukan pengisian dokumen formal dan melalui pemeriksaan yang menyeluruh, baik barang maupun dokumen. Jelasnya, jika transaksi bermasalah, namun paramater *informal entry* terpenuhi maka importir lebih mudah untuk menghindar dari pemeriksaan bea dan cukai.

3. Menghindari pembatasan kuota

Untuk impor yang dibatasi kuota, baik kuota dalam jumlah barang maupun tarif yang dipengaruhi jumlah barang impor (misalnya semakin banyak jumlah barang impor semakin tinggi tarifnya). Sangat potensial untuk terjadinya pelanggaran. Nilai barang biasanya digunakan untuk menentukan besarnya kuota. Dengan merendahkan nilai barang, keuntungan kouta dapat tercapai atau larangan kuota dapat dihindari.

4. Mendapatkan bea masuk yang lebih menguntungkan (untuk *sistem advaloren*)

Untuk kondisi tertentu, dalam nomenklatur nasional, tarif bea masuk tergantung pada nilai barang. Jadi nilai barang dibawah X *currency unit* memiliki tarif bea masuk 5% sedangkan nilai barang di atas X *currency unit* dikenakan tarif bea masuk 10%. Jika harga barang yang lebih rendah dikenakan tarif yang rendah pula maka sangat potensial untuk terjadinya *undervaluation*.

b. Metode²⁴⁷

²⁴⁷ Ibid hal 145.

1. Invoice ganda, invoice dengan nilai yang lebih rendah diberitahukan kepada bea dan cukai dan nilai yang sebenarnya disimpan oleh importir untuk keperluan pembayaran.

Metode ini sering terjadi. Eksportir akan memberitahukan invoice pertama dengan nilai yang lebih rendah kepada bea dan cukai. Invoice kedua dengan harga yang benar dan lebih tinggi digunakan importir untuk keperluan pembayaran.

2. Invoice yang tidak benar, nilai tertera di dalam invoice ini bukan nilai yang sesungguhnya, dengan harga atau kuantitas yang lebih rendah.
3. Pembayaran bertahap, invoice tidak mencantumkan pembayaran sebelumnya (uang muka) ataupun pembayaran yang dilakukan secara bertahap, melainkan hanya mencantumkan saldo akhir.
4. Tidak mencantumkan atau tidak memasukan biaya atau nilai *assist*

Biasanya importir tidak memasukan biaya biaya yang tercantum dalam pasal 8.1 *agreement* seperti *assists*, royalti, biaya lisensi dan keuntungan penjualan. Merupakan kewajiban importir untuk memberitahukan semua biaya biaya yang ada. Namun karena deteksi sulit dilakukan maka ada kesengajaan untuk tidak memberitahukan biaya biaya tersebut.

5. Tidak memberitahukan royalti atau biaya lisensi atas penjualan kembali barang impor.

6. Tidak memberitahukan biaya komisi penjualan, atau karakteristik komisi penjualan seperti halnya komisi pembelian.

Komisi merupakan faktor biaya lainnya yang sering diabaikan karena memiliki karakteristik yang hampir sama dengan komisi pembelian. Bedanya adalah komisi penjualan dikenakan bea masuk sedangkan komisi pembelian tidak.

7. Memberitahukan lebih rendah atau lebih tinggi biaya transportasi dan biaya terkait lainnya, sesuai peraturan nasional seperti tercantum pada pasal 8.2 *agreement*.

Biaya transportasi merupakan sumber pelanggaran yang sering dilakukan di beberapa negara. Apabila biaya transportasi termasuk dalam komponen penambahan harga berdasarkan pasal 8.2 *agreement*, kemungkinan akan diberitahukan lebih rendah. Apabila nilai pabean tidak meliputi biaya transportasi, maka umumnya akan diberitahukan lebih tinggi karena menjadi komponen pengurangan harga.

8. Tidak memasukan hubungan antara importir dengan eksportir seperti dijelaskan dalam *article 15*, dimana hubungan tersebut dapat mempengaruhi harga.

Apabila antara penjual dan pembeli (importir) saling berhubungan sebagaimana tercantum dalam pasal 15 *agreement*, harus sebagaimana tercantum dalam pasal 15 *agreement*, harus dibuktikan bahwa hubungan keduanya tidak mempengaruhi harga melalui *test value*. Untuk menghindari harga penelitian tes harga

tersebut, importir harus membuat pernyataan bahwa importir tidak memiliki hubungan dengan penjual.

9. Dengan sengaja memberitahu tidak benar besarnya biaya produksi yang tercantum dalam pasal 6 *agreement* (metode komputasi).

Berdasarkan pasal 6 *agreement*, importir harus melengkapi biaya produksi yang diperoleh dari produsen barang. Karena bea dan cukai sulit memeriksa data produksi, seringkali besarnya biaya tersebut dimanipulasi oleh importir.

10. Menguraikan barang secara tidak benar dalam invoice, misalnya menguraikan kualitas barang A sebagai barang B dengan kualitas yang berbeda.

Cara utama dalam *undervaluation* adalah menguraikan barang secara tidak benar dalam invoice. Dengan demikian, importir dapat membeli diri karena harga rendah yang dinyatakan untuk barang dengan kualitas A, diberitahukan sebagai barang dengan kualitas B dalam invoice. Modus lainnya adalah dengan memberitahukan spareparts teknologi tinggi sebagai spareparts mesin biasa.

11. Invoice yang tidak benar atas sifat dan jumlah barang impor.

Bentuk lain dari *undervaluation* adalah mengidentifikasi barang secara tidak benar (misalnya mesin terurai diberitahukan sebagai bagian dari mesin) atau dengan cara mengurangi jumlah barang sesungguhnya.

c. Deteksi²⁴⁸

Untuk mendeteksi pelanggaran di atas cukup sulit, sangat tergantung pada hukum dan peraturan nasional yang berlaku serta kemampuan petugas bea dan cukai untuk meneliti pelanggaran yang mungkin terjadi. Adapun metode yang mungkin digunakan untuk mendeteksi pelanggaran tersebut adalah:

i. Keahlian/pengetahuan jenis barang²⁴⁹

Metode deteksi yang paling efektif adalah penguasaan jenis barang oleh petugas penilai barang impor. Semakin tinggi keahlian petugas dalam mengerti jenis barang serta bagaimana barang tersebut dibeli kemudian dijual, semakin besar pula kemungkinan ketidak sesuaian dapat ditentukan.

1. Perlunya Kemampuan akan pengetahuan jenis barang²⁵⁰

Dari semua metode deteksi yang ada, metode ini mungkin paling efektif dibandingkan dengan metode lainnya. Pengetahuan tentang barang dan bagaimana barang tersebut di perjualbelikan, yang sering kali akan menyingkap ketidaksesuaian dan membantu dalam pemeriksaan atas kecurangan yang dilakukan. Sebagai contoh, pengetahuan tentang mesin, elektronika, dan kendaraan pada umumnya akan menyebabkan petugas yang menguasainya lebih waspada dalam menghadapi kemungkinan adanya biaya tambahan seperti peralatan dan teknik. Pengetahuan tentang industri bahan kimia dan obat-obatan berikut produk-produknya akan menyebabkan petugas

²⁴⁸ Ibid hal 146.

²⁴⁹ Ibid hal 147.

²⁵⁰ Ibid.

yang menguasainya lebih waspada dalam menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kontrak royalti dan lisensi.

Penguasaan jenis barang juga akan memungkinkan petugas yang menguasainya pada posisi yang lebih baik untuk mengamati kemungkinan timbulnya *undervaluation* karena telah mengetahui kondisi saat barang tertentu dijual dan harga yang ditawarkan.

ii. Pemeriksaan fisik barang²⁵¹

Jika tidak mungkin melakukan pemeriksaan untuk setiap pengapalan dari barang impor, dapat dilakukan pemeriksaan secara selektif berdasarkan kriteria tertentu, misalnya sifat barang, nilai barang, importir atau negara asal barang.

2. Hubungan Antara Pengetahuan Jenis Barang Dengan Pemeriksaan Fisik Barang²⁵²

Memeriksa setiap pengiriman barang impor tidak perlu dilakukan, akan lebih efektif jika dilakukan berdasarkan seleksi. Keahlian mengidentifikasi barang, akan memungkinkan petugas bea dan cukai memperoleh informasi yang tepat dalam mengidentifikasi barang yang bersangkutan untuk pemeriksaan secara selektif. Pemeriksaan fisik barang dapat membantu dalam mendeteksi uraian dalam invoice, jumlah barang dan berat barang yang tidak benar serta pemberitahuan tidak benar atas barang dengan kualitas A diberitahukan sebagai barang dengan kualitas B.

²⁵¹ Ibid hal 147.

²⁵² Ibid.

iii. *Post Clearance Audit*²⁵³

Pendekatan ini memerlukan kunjungan ke importir atau agennya atau tempat tempat dimana catatan transaksi disimpan. Lebih efektif apabila data transaksi dalam bentuk tertulis. Apabila tingkat kecurigaan sangat tinggi. Petugas penilai dapat meminta pertolongan auditor dan/atau investigator yang ada. Dokumen transaksi yang harus diperiksa adalah sebagai berikut:

a. *Copy sales contract*, jika ada²⁵⁴

Kontrak biasanya merupakan sumber informasi yang bagus dan dapat menggambarkan transaksi serta hubungan antara pihak penjual dan pembeli.

b. *Copy purchase order dan confirmation*²⁵⁵

Memperlihatkan informasi mengenai transaksi secara spesifik. Tetapi ingat, *Purchase Order* hanya memperlihatkan sebagian. Untuk memperoleh gambaran lengkap di perlukan *confirmation*.

c. Bukti pembayaran, seperti *cancelled check* atau *copy draft L/C*²⁵⁶

Bukti pembayaran juga sangat penting dan importir, terutama pada bagian accounting, selalu memiliki bukti seberapa besar dan bagaimana barang tersebut dibayar. Bentuknya dapat berupa *cancelled checks* atau *draft L/C*. Bukti pembayaran kemudian dibandingkan dengan nilai dalam P/O dan invoice.

²⁵³ Ibid hal 148.

²⁵⁴ Ibid.

²⁵⁵ Ibid.

²⁵⁶ Ibid.

d. Copy Dokumen Pengiriman Barang.²⁵⁷

Dalam dokumen pengiriman barang terdapat besarnya nilai yang dibayar sebagai dasar perhitungan *freight*, bik kondisi *pre paid* maupun *cash on delivery* (c.o.d).

e. Copy polis asuransi, laut maupun udara²⁵⁸

Polis asuransi baik laut maupun udara, walau kadang nilainya lebih tinggi, merupakan salah satu sumber informasi yang mencerminkan harga barang yang sebenarnya.

f. Copy korespondensi (surat, fax, telex, dsb)²⁵⁹

Korespondensi juga merupakan bukti transaksi yang sangat penting. Seringkali barang dipesan melalui fax atau transmisi telex. Biasanya importir cenderung menyembunyikan dokumen transaksinya, oleh karena itu sebaiknya petugas bea dan cukai meminta dan memeriksanya. Sebagian dari dokumen tersebut telah dirujuk oleh dokumen lain sehingga dapat diketahui keberadaannya.

g. Packing List²⁶⁰

Packing list tidak banyak berguna seperti halnya dokumen lain tetapi merupakan sumber informasi yang menguraikan uraian barang secara jelas serta jumlah barang yang diangkut oleh kapal.

h. Buku besar perusahaan²⁶¹

Buku besar perusahaan dan catatan *accounting* lainnya menunjukkan bukti lengkap dari transaksi sekaligus dapat menjadi bukti apabila

²⁵⁷ Ibid.

²⁵⁸ Ibid.

²⁵⁹ Ibid.

²⁶⁰ Ibid hal 149.

²⁶¹ Ibid.

telah terjadi *undervaluation*. Oleh karena itulah biasanya importir enggan menunjukkannya kecuali diminta atas nama hukum. Apabila petugas tidak paham mengenai accounting dan pembukuan, perlu meminta bantuan dari orang yang lebih ahli.

i. Daftar penerimaan persediaan²⁶²

Daftar persediaan berguna karena menunjukkan jenis barang serta jumlah masing masing jenis dan barang yang diimpor sesungguhnya. Invoice dapat menyajikan data yang tidak benar, tapi daftar penerimaan persediaan selalu menyajikan data yang sesungguhnya.

j. Wawancara dengan karyawan perusahaan²⁶³

Keinginan orang untuk berbicara kadang dapat mengungkap fakta yang disembunyikan daftar orang yang akan diwawancara dibawah ini hanya sekedar saran dan dapat ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan.

1. Bagian accounting
2. Bagian pengiriman barang
3. Bagian pengendalian persediaan
4. Bagian penjualan
5. Bagian ekspor/impor

iv. Mengunjungi outlet yang menjual barang impor untuk konsumsi domestik di negara importir²⁶⁴

Mengunjungi lokasi dimana barang impor dijual eceran untuk konsumsi dalam negeri (jika dapat dilakukan). Bagaimana barang dipasarkan dan

²⁶² Ibid.

²⁶³ Ibid.

²⁶⁴ Ibid.

berapa harganya dapat memberi informasi mengenai bagaimana transaksi impor yang sesungguhnya.

2. *Overvaluation*²⁶⁵

a. Alasan dan jenisnya²⁶⁶

Jika pada umumnya harga barang diberitahukan lebih rendah dari harga barang sebenarnya, sering pula harga barang diberitahukan lebih tinggi dari harga sebenarnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Berusaha menghindari pembatasan kuota²⁶⁷

Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, dimana pembatasan kuota sangat berpengaruh, mungkin juga memberitahukan harga barang lebih tinggi dari harga sebenarnya untuk menghindari pembatasan kuota.

2. Berusaha mencegah atau menghindari kemungkinan adanya

Pemeriksaan atas bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan²⁶⁸

Memberitahukan harga barang lebih rendah dapat menyebabkan kecurigaan sehingga mengakibatkan pemeriksaan bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan. Karena dugaan ini membutuhkan biaya yang tinggi untuk dibuktikan dan dapat menyebabkan biaya ekstra yang besar. Akan lebih ekonomis apabila importir memberitahukan harga barang lebih tinggi untuk menghindari situasi tersebut.

²⁶⁵ Ibid.

²⁶⁶ Ibid.

²⁶⁷ Ibid.

²⁶⁸ Ibid.

3. Bila klasifikasi dan tarif bea masuk tergantung pada harga barang, dimana semakin tinggi nilainya semakin rendah tarifnya²⁶⁹

Apabila klasifikasi dan tingkat tarif bergantung kepada nilai barang, maka harga barang mungkin saja ditinggikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari tarif yang lebih rendah. Hal ini akan terlihat jelas dimana diberitahukan harga yang lebih tinggi akan tetapi tingkat tarif jauh lebih rendah sehingga secara keseluruhan bea yang dibayar lebih kecil.

4. Bila transaksi mencakup *transfer pricing* dan nilai pabean di buat lebih tinggi untuk mengurangi dasar perhitungan pajak dalam negeri.

Dibeberapa negara, pajak dalam negeri yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan keuntungan perusahaan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan pungutan impornya. Karena itu jika memiliki *transfer price* dengan perusahaan yang saling berhubungan, pungutan impor dibuat lebih besar untuk mengurangi pajak dalam negeri yang harus dibayar perusahaan. Karena pajak didasarkan pada keuntungan perusahaan. Karena pajak didasarkan pada keuntungan perusahaan, nilai pabean sehingga keuntungan sebenarnya yang lebih besar akan dikenakan di negara yang memungut pajak dalam negeri lebih rendah.

5. Memberitahukan harga lebih tinggi untuk komoditi dengan tarif bea masuk yang rendah dan sebaliknya memberitahukan harga lebih rendah untuk komoditi dengan tarif bea masuk yang tinggi.

²⁶⁹ Ibid.

Jika mengimpor barang lebih dari 1 jenis barang dari penjual yang sama, dan barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berbeda, importir biasanya menaikkan harga barang yang tarif bea masuknya tinggi. Dengan perjanjian tersebut, penjual memperoleh jumlah yang sama atas pembayaran barang, sedangkan importir secara keseluruhan membayar bea masuk lebih kecil.

b. Deteksi²⁷⁰

1. Sekali lagi, alat yang paling baik untuk mendeteksinya adalah penguasaan jenis barang dan pengetahuan petugas tentang bagaimana barang tersebut diperjual belikan.
2. Memeriksa semua dokumen pendukung, seperti *invoice*, *sales contract*, *purchase order*, dokumen pengiriman barang, dan penerimaan barang, serta metode pembayarannya.
3. Melihat semua pengiriman barang, terutama yang pembayarannya berbentuk kredit atau mendapat potongan harga untuk pengiriman sebelumnya, atau pengiriman barang yang mencangkup barang gratis untuk pengganti apabila ada barang cacat.
4. Memeriksa semua rekening untuk menentukan sifat dan jumlah pembayaran atau potongan harga.

Sekali lagi, mempelajari semua catatan accounting untuk melihat apakah ada potongan harga atau *refund* dapat dimasukkan dalam biaya *freight*. Jika nilai *freight overstated*, cari apakah ada potongan harga dari penjual atau agen pelayaran.

²⁷⁰ Ibid hal 151.

5. Memeriksa catatan pengiriman barang untuk menentukan apakah, potongan harga atau *refund* dapat dimasukkan dalam biaya *freight*. Jika nilai *freight overstated*, cari apakah ada potongan harga dari penjual atau agen pelayaran.
6. Memberi atensi pada barang yang memerlukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang secara mendalam, yaitu barang yang klasifikasi dan besarnya tarif bea masuk tergantung pada nilai barang.

Jika tarif BM bergantung pada harga barang, terutama bila semakin tinggi harga barang semakin rendah tarifnya, maka perlu atensi. Hal ini terjadi terutama apabila potongan untuk perubahan tarif BM sangat sedikit perbedaannya (misalnya untuk barang dengan nilai di atas 2 *currency unit* tarifnya lebih rendah dari barang yang nilainya dibawah 2 *currency unit* dan nilai barang diberitahukan sebesar 0,02 *currency unit*).

3. Uraian Invoice Tidak Benar²⁷¹

a. Alasan dan jenisnya²⁷²

1. Uraian invoice yang tidak benar dapat mempengaruhi harga barang misalnya:
 - a. Menguraikan barang dengan kualitas A sebagai barang berkualitas B
 - b. Memberitahukan logam mulia sebagai logam dasar
 - c. Tidak mencantumkan merk dagang atau merk barang

²⁷¹ Ibid hal 152.

²⁷² Ibid.

Uraian invoice yang tidak benar sangat membantu, baik untuk *undervaluation*, maupun *overvaluation*.

2. Uraian jumlah atau berat barang yang tidak benar dalam invoice
3. Uraian kegunaan/fungsi akhir barang yang tidak benar dalam invoice, dimana hal tersebut mempengaruhi tarif bea masuk

Beberapa negara memiliki kebijaksanaan keringan atau pembebasan BM tergantung pada penggunaan barang setelah importasi (untuk keperluan pertanian, riset kedokteran, jenis produksi khusus dsb.) atau untuk siapa barang tersebut diimpor (misalnya organisasi non profit, perguruan tinggi, dan universitas, institusi agama, dsb). Fakta ini dapat dipalsukan untuk kepentingan pribadi.

4. Uraian yang salah untuk menghindari pembatasan kuota atau untuk menghindari bea masuk imbalan dan bea masuk antidumping

Hasil penelitian terhadap dumping atau subsidi akan memberi gambaran lengkap tentang barang yang menjadi obyek dumping atau subsidi. Oleh karena itu uraian barang yang tidak benar digunakan untuk menghindari pembayaran bea masuk.

5. Uraian yang salah dengan tujuan memasukan barang ke perdagangan suatu negara dimana barang tersebut dilarang atau dibatasi

Uraian barang sengaja diberitahukan tidak benar untuk menghindari larangan atau pembatasan jenis barang tersebut.

6. Pernyataan yang salah tentang kandungan suatu barang yang mempengaruhi klasifikasi dan tarif bea masuk, seperti:
 - a. Logam mulia vs logam dasar

- b. Batu mulai vs semi batu mulia
- c. Kandungan bahan tenunan untuk pakaian dan perlengkapannya
- d. Uraian bagian dari mesin diberitahukan sebagai mesin terurai karena tarif BM untuk mesin lebih rendah
- e. Identifikasi dari kandungan bahan lokal mengingat tidak dikenakan tarif BM atas barang lokal.

b. Deteksi²⁷³

1. Keahlian/penguasaan jenis barang
2. Pemeriksaan fisik barang
3. Pemeriksa atas seluruh dokumen impor dan dokumen korespondensi (*post audit*)
4. Analisis kimia

Apabila invoice memuat rincian komponen atau bahan pembentuk material, seperti kandungan logam, kandungan bahan tenunan atau campurannya serta bahan mentahnya, sangat perlu untuk memiliki keahlian analisis kimia untuk menentukan apakah rincian tersebut sudah tepat. Jika tidak tersedia laboratorium bea dan cukai, dapat digunakan laboratorium swasta atau dapat menggunakan laboratorium perguruan tinggi atau universitas (terutama institusi negeri) atau dapat pula menggunakan laboratorium milik organisasi pemerintah lainnya.

5. Mengamati bagaimana barang dipasarkan setelah diimpor
6. Verifikasi atas seluruh gugatan yang berkaitan dengan penggunaan/fungsi akhir

²⁷³ Ibid hal 153.

Penggunaan akhir dapat diverifikasi dengan pemeriksaan fisik barang setelah importasi.

4. Uraian negara asal tidak benar²⁷⁴

a. Alasan dan jenisnya²⁷⁵

1. Untuk menghindari pembatasan kuota yang diberlakukan di masing masing negara.

Biasanya pembatasan kuota diterapkan berbeda beda untuk tiap tiap negara. Uraian negara asal diberitahukan tidak benar untuk menghindari larangan kuota.

2. Untuk menghindari bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan

Bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan biasanya diterapkan diperusahaan/negara tertentu. Uraian negara asal diberitahukan tidak benar untuk menghindari bea masuk tersebut.

3. Untuk mendapatkan keuntungan dari program khusus yang ditawarkan berupa keringan dan pembebasan bea masuk (GSP, *Free Trade Agreement*, MFN, dsb.)

Beberapa negara menawarkan keringan atau pembebasan BM dengan program perdagangan khusus, seperti *Generalized System of Preference*, atau program khusus perdagangan bebas bilateral, atau tarif yang berbeda untuk negara negara tertentu seperti tarif MFN (*Most Favoured Nation*).

Dari beberapa fasilitas tersebut, pokok persoalan adalah negara asal barang yang sangat menentukan apakah program perdagangan khusus

²⁷⁴ Ibid.

²⁷⁵ Ibid.

tersebut dapat diterapkan. Negara asal biasanya ditetapkan sebagai persyaratan dasar atau bagian penting dari isian formulir. Biaya atau operasi ini dapat lebih besar atau lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh dari program perdagangan tersebut.

4. Untuk menghindari pembatasan atau larangan atau untuk menghindar dari embargo.

Untuk berbagai alasan, negara akan mengembargo barang dari satu atau beberapa negara. Uraian negara asal diberitahukan tidak benar untuk menghindari sanksi perdagangan.

5. Untuk memperkuat pemberitahuan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah (*undervaluation*).

6. Menyembunyikan negara asal yang asli dengan *transhipping* (pemindahan dari suatu alat pengangkut ke alat angkut lain) melalui pelabuhan negara ketiga.

Metode yang biasa digunakan untuk mencapainya adalah memindahkan barang dari satu alat pengangkut ke alat pengangkut lain melalui pelabuhan transit untuk menyamarkan atau menyembunyikan negara asal yang sebenarnya.

7. Mencampur barang dari satu negara dengan negara lainnya untuk menyembunyikan negara asal yang sebenarnya.

Barang dari satu negara dapat dicampur dengan barang dari negara lainnya untuk menghindari bea masuk yang seharusnya dibayar. Barang dapat dicampur dengan barang lain dalam kotak atau container atau

dapat pula barang tersebut dimasukkan ke dalam barang lain dari negara lainnya.

b. Deteksi²⁷⁶

1. Keahlian/penguasaan jenis barang
2. Pemeriksaan fisik barang
3. Memeriksa atau meminta *Certificate of Origin*
4. Memeriksa seluruh korespondensi yang berhubungan dengan importasi barang
5. Memeriksa barang setelah importasi terutama pada tingkat penjual eceran untuk mengetahui apakah tanda negara asal tidak diubah.
6. Memeriksa seluruh catatan pengiriman barang untuk menentukan keberangkatan pengiriman barang yang sebenarnya berikut rute perjalanan yang ditempuh.

5.4 Langkah dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Pelanggaran Nilai Pabean²⁷⁷

Untuk menjawab kekhawatiran negara negara anggota ASEAN, bagian ini membahas langkah langkah untuk memerangi pelanggaran nilai pabean. Langkah ini berdasarkan pada praktik yang direkomendasikan oleh WCO, yang terutang dalam pedoman WCO.

Sebagai pedoman umum, langkah langkah untuk menanggulangi pelanggaran nilai pabean dapat ditempuh dengan menggunakan tiga strategi pokok yang mencakup: meningkatkan sistem dan prosedur organisasi,

²⁷⁶ Ibid. Hal 154.

²⁷⁷ Ibid.

menyusun hukum dan peraturan dalam sistem domestik legal untuk mengakomodir perjanjian, dan meningkatkan profesionalisme SDM dalam organisasi sesuai ketentuan *agreement*.

1. Menyediakan administrasi bea dan cukai dengan struktur hukum yang tetap untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien, terutama dengan cara:²⁷⁸
 - a. Menciptakan suatu unit untuk memberikan penjelasan tentang perjanjian untuk mendukung tugas pegawai dilapangan.
 - b. Menciptakan unit sentral dan lokal untuk melaksanakan pekerjaan *post clearance audit*
 - c. Memperkuat dukungan intelijen
 - d. Pemeriksaan fisik yang tepat
 - e. Menciptakan hubungan kerja yang baik antara bagian dan divisi dalam administrasi bea dan cukai
 - f. Mengurangi persaingan yang tidak produktif, seperti:
 1. *Clearance vs post clearance audit*
 2. *Post clearance audit vs enforcement*
 3. *Post clearance audit vs clearance*
 4. *Valuation vs PCA, Clearance, dan Enforcement*
- Dengan demikian pembagian informasi dan inteligen dalam administrasi bea dan cukai
5. Komputerisasi prosedur pabean
 6. Sentralisasi informasi untuk analisis yang lebih baik

²⁷⁸ Ibid hal 155.

2. Mengawasi dan mempersiapkan kerangka aturan yang tepat dengan membuat hukum dan peraturan baru atau mengubah hukum yang ada agar dapat mengakomodir hal hal sebagai berikut:²⁷⁹
 - a. Sistem *post clearance audit* dengan sistem penyimpanan data
 - b. Profil importir dan supplier diluar negeri
 - c. Pembagian tanggung jawab dengan importir
 - d. Penukaran informasi dan kerjasama dengan badan lainnya, baik nasional maupun internasional, demikian pula dengan komunitas perdagangan.
 - e. Pembebanan denda dan pinalti lainnya
 - f. Pengawasan *e commerce* (*papperless trading*)
3. Peningkatan kualitas SDM²⁸⁰
 - a. Meningkatkan pemahaman tugas dibagian lapangan tentang sistem dalam perjanjian dan meningkatkan keahlian di bidang data *processing*.
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis transaksi dimasing masing pasar/sektor industri
 - c. Meningkatkan pengetahuan tentang komoditi dan perdagangan internasional melalui pendidikan dan pelatihan.

²⁷⁹ Ibid.

²⁸⁰ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap penegakan hukum oleh direktorat jendral bea dan cukai dalam melaksanakan pungutan bea masuk terhadap impor tekstil dan produk tekstil berdasarkan undang undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan, memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Bea Masuk di dasarkan kepada hasil dari uji kewajaran terhadap nilai pabean yang sebenarnya di bayar atau seharusnya dibayar, di dalam hasil uji kewajaran terdapat nilai pabean yang di nilai tidak wajar oleh pejabat bea dan cukai di terbitkan Informasi Nilai Pabean (INP) dan balas dengan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dengan di sertai dokumen pelengkap, dan/atau jawaban jawaban dari hasil konsultasi. Dan apabila DNP dan Konsultasi masih tidak dapat juga di simpulkan bahwa nilai transaksi yang dilaporkan oleh importir adalah nilai dari harga barang yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar, maka penetapan nilai pabean dilakukan secara *official assesment* oleh pejabat bea dan cukai, dengan berdasarkan 6 Metode penentuan nilai pabean yang dilakukan secara hirarki, yaitu:
 - a. Metode nilai transaksi

- b. Metode nilai barang identik
- c. Metode nilai barang serupa
- d. Metode deduksi
- e. Metode komputasi, dan.
- f. Metode pengulangan (*fallback*)

Dan setelah syarat syarat di atas telah terpenuhi dan sudah dilakukan pembayaran oleh pihak importir bea dan cukai menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dari daerah pabean.

2. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi pelanggaran *valuation fraud* atau pelanggaran nilai pabean yang marak dilakukan oleh pihak importir adalah dengan mengandalkan deteksi oleh petugas pemeriksa pengetahuan jenis barang dan pengetahuan tentang bagaimana barang tersebut diperjual belikan oleh petugas pemeriksa bea dan cukai, pemeriksaan fisik barang, Pemeriksaan atas seluruh dokumen impor dan dokumen korespondensi (*post audit*), dan analisis kimia (uji laboratorium) terhadap jenis barang untuk mendapatkan keakuratan jenis barang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap penegakan hukum oleh direktorat jendral bea dan cukai dalam melaksanakan pungutan bea masuk terhadap impor tekstil dan produk tekstil berdasarkan undang undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan, memberikan saran sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya jika peraturan peraturan terkait tidak berubah ubah sehingga membingungkan bagi masyarakat impor dan ekspor, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, melainkan hanya pengumuman oleh media elektronik saja yang tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan.
2. Saran terhadap upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam meminimalisir pelanggaran *valuation fraud* atau pelanggaran nilai pabean adalah dengan penegasan sanksi, seperti penambahan sanksi pidana apabila terbukti adanya pelanggaran nilai pabean yang dilakukan secara sengaja oleh importir, penambahan sanksi pidana selain untuk menimbulkan ketegasan kepada para pelaku importir yang ingin berbuat curang, adalah karena pelanggaran nilai pabean (*valuation fraud*) termasuk perbuatan penipuan atau pemalsuan nilai dari harga barang sebenarnya atau harga yang seharusnya dibayar yang di buat seolah olah lebih kecil dengan tujuan pembebasan bea masuk atau meringankan bea masuk, sehingga pungutan pajak melalui bea masuk tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Ali Purwito M, 2006, Kepabeanan Konsep dan Aplikasi, Jakarta: Samudra Ilmu.

Bala Ramasamy, An Analysis Of Import-Export Procedures And Processes In China, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No 88 December 2010

Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta.

Bambang Sugono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djauhari Ahsjar, 2007, Pedoman Transaksi Ekspor & Impor, Jakarta:Prestasi Pustaka.

Eddhi Sutarto, 2010, Rekonstruksi Hukum Pabean Di Indonesia, Jakarta:Erlangga.

Hamdani, 2003, Seluk Beluk Perdagangan Ekspor, Jakarta:Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia.

Mochamad Anwar, 2001, Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan, Bandung: Alumni.

Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta:GP Press Group.

Roselyne Hutabarat, 1997, Transaksi Ekspor-Import , Jakarta: Erlangga.

Semedi Bambang, 2013, Pengawasan Kepabeanan, Jakarta:Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai.

Shant Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta:Liberty.

Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rajawali Pers.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), Bandung:Alfabeta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

ASEAN CUSTOMS VALUATION GUIDE PETUNJUK PENETAPAN NILAI PABEAN, cetakan pertama November 2005.

Emmy Latifah, Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum Yang Ditimbulkannya, Yustisia, Volume 4 , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret , 2015.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 6/PMK.10/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Sanksi Administratif Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai nomor P38/BC/2010 Tentang
Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean
Untuk Perhitungan Bea Masuk.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK04/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010 Tentang Nilai Pabean
Untuk Perhitungan Bea Masuk.

Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor Per18/BC/2016 Tentang
Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean dan/atau Tarif.

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per16/BC/2016 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai.

Internet

<http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/overview/wto-valuation-agreement.aspx>

<http://www.beacukai.go.id/berita/tutup-tahun-2017-penerimaan-bea-cukai-jakarta-lampaui-target.html>

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/struktur-organisasi.html>

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/logo-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html>

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

<http://industri.bisnis.com/read/20170720/257/673440/impor-tekstil-capai-310.000-ton->

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48